



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Jambi

NOVEMBER 2025





LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Jambi

NOVEMBER
2025



VISI **Bank Indonesia**

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju.



MISI **Bank Indonesia**

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

VISI **Kantor Perwakilan Bank Indonesia**

Menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang kredibel dalam mendukung Kebijakan Bank Indonesia dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

MISI **Kantor Perwakilan Bank Indonesia**

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) dan kehandalan Sistem Pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

Kata Pengantar

Pertama-tama izinkanlah kami memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga Laporan Perekonomian Provinsi Jambi periode November 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Perekonomian merupakan salah satu terbitan periodik Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi sebagai sarana diseminasi data dan informasi, baik dengan stakeholders internal maupun eksternal. Selanjutnya, para pemangku kepentingan seperti pelaku usaha, perbankan dan terutama Pemerintah Daerah Jambi (provinsi dan kabupaten/kota) diharapkan dapat memperoleh masukan dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi daerah.

Laporan ini mencakup beberapa aspek seperti perkembangan ekonomi makro regional, keuangan pemerintah daerah, inflasi daerah, stabilitas keuangan daerah, pengembangan akses keuangan dan UMKM, penyelenggaraan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, serta ketenagakerjaan dan kesejahteraan. Publikasi ini juga memuat perkiraan pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah.

Berdasarkan asesmen atas data dan informasi triwulan III 2025, ekonomi Provinsi Jambi tumbuh 4,77% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,99% (yoy) pada triwulan II 2025. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai LU Informasi dan Komunikasi yang tumbuh 9,00 (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi adalah Net Ekspor sebesar 12,93% (yoy) seiring membaiknya produktivitas komoditas unggulan ekspor.

Pada Triwulan III 2025, inflasi *year-on-year* Provinsi Jambi tercatat sebesar 3,77% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,34% (yoy). Realisasi inflasi tersebut juga tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat 2,65% (yoy). Laju inflasi Provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi di Kota Jambi, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Kerinci.

Pertumbuhan kredit korporasi di Provinsi Jambi pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 49,72% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 43,99% (yoy). Dari sisi risiko kredit, terjadi sedikit penurunan kualitas kredit korporasi yang tercemin dari NPL sebesar 1,47% (*gross*) sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,46% (*gross*). Sementara itu, NPL sektor utama di Provinsi Jambi terpantau tetap dan tidak melebihi *threshold* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2025 melanjutkan tren pertumbuhan positif didukung terjaganya permintaan domestik didukung kebijakan Pemerintah untuk menyalurkan berbagai program jaring pengaman sosial turut menopang perbaikan konsumsi masyarakat dan dunia usaha. Lebih lanjut, berlanjutnya pengerjaan proyek infrastruktur diperkirakan akan menopang kinerja positif investasi di Provinsi Jambi.

Dalam penyusunan laporan ini, kami banyak memperoleh dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah, instansi, perbankan, BUMN/BUMD, dan pelaku usaha. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak. Semoga kerjasama yang telah terjalin baik selama ini dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

Seiring dengan keterbatasan yang ada, kami mengharapkan kritik dan saran dalam meningkatkan kualitas laporan ini agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, untuk kemakmuran masyarakat Jambi.

Jambi, November 2025

**Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Jambi**

ttd
Warsono

Daftar Isi

Visi dan Misi	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Grafik	vii
Daftar Tabel	x
Ringkasan Eksekutif	xii
Tabel Indikator Makro	xvi

01 Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

1.1	Perkembangan Umum	02
1.2	PDRB Sisi Pengeluaran	02
1.2.1	Konsumsi Rumah Tangga	03
1.2.2	Konsumsi Pemerintah	04
1.2.3	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)	05
1.2.4	Perdagangan Eksternal	05
1.3	PDRB Sisi Lapangan Usaha	07
1.3.1	Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	08
1.3.2	Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian	08
1.3.3	Lapangan Usaha Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	09
1.3.4	Lapangan Usaha Industri Pengolahan	09
1.3.5	Lapangan Usaha Lainnya	10
BOKS 1:	Forum Ekonomi Dan Bisnis Provinsi Jambi Juli 2025 “Optimalisasi Minerba dan Migas Menuju Daya Saing Ekspor”	13

02 Keuangan Pemerintah Daerah

2.1	Realisasi Pendapatan Daerah	18
2.2	Realisasi Belanja Daerah	19
2.3	Keuangan Pemerintah Pusat di Daerah	20
2.4	Keuangan Pemerintah Daerah	23

03 Perkembangan Inflasi Daerah

3.1	Kajian Umum	26
3.2	Inflasi Kota Jambi Berdasarkan Kelompok Barang	27
3.2.1	Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau	28
3.2.2	Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	29
3.2.3	Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	30
3.2.4	Kelompok Transportasi	30
3.2.5	Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah	30
3.2.6	Kelompok Pakaian dan Alas Kaki	31
3.2.7	Kelompok Pendidikan	31
3.2.8	Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya	31
3.2.9	Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	31
3.2.10	Kelompok Kesehatan	31
3.2.11	Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	31
3.3	Inflasi Kabupaten Bungo Berdasarkan Kelompok Barang	34
3.3.1	Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau	35
3.3.2	Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	36
3.3.3	Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah	36

3.3.4	Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	36
3.3.5	Kelompok Kesehatan	36
3.3.6	Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya	37
3.3.7	Kelompok Pendidikan	37
3.3.8	Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	37
3.3.9	Kelompok Penyediaan Makanan dan Minum/ Restoran	37
3.3.10	Kelompok Transportasi	37
3.3.11	Kelompok Pakaian dan Alas Kaki	38
3.4	Inflasi Kabupaten Kerinci Berdasarkan Kelompok Barang	41
3.4.1	Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau	41
3.4.2	Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah	42
3.4.3	Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	42
3.4.4	Kelompok Pakaian dan Alas Kaki	42
3.4.5	Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	43
3.4.6	Kelompok Kesehatan	43
3.4.7	Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya	43
3.4.8	Kelompok Pendidikan	43
3.4.9	Kelompok Penyediaan Makanan dan Minum/ Restoran	43
3.4.10	Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	44
3.4.11	Kelompok Transportasi	44

04

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

4.1	Ketahanan Sektor Korporasi	50
4.1.1	Sumber Kerentanan Sektor Korporasi	50
4.1.2	Kinerja Korporasi dan Penilaian Risiko	50
4.1.3	Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi	50
4.2	Ketahanan Sektor Rumah Tangga	51
4.2.1	Dana Pihak Ketiga Perseorangan di Perbankan	52
4.2.2	Kredit Rumah Tangga di Perbankan	52
4.3	Perkembangan Kredit UMKM	53
4.4	Perkembangan Bank Umum	54
4.4.1	Perkembangan Aset Bank	54
4.4.2	Perkembangan Dana Masyarakat	55
4.4.3	Perkembangan Kredit/Penyaluran Dana	56

05

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

5.1	Perkembangan Transaksi Tunai dan Nontunai	64
5.1.1	Perkembangan Transaksi Tunai	64
5.1.2	Perkembangan Transaksi Nontunai	64
5.2	Penyediaan Uang Layak Edar	65
5.3	Perkembangan Temuan Uang Rupiah yang	66
5.4	Inklusi Keuangan dan Elektronifikasi	66
5.5	Perkembangan QRIS	69
5.6	Perlindungan Konsumen	71
BOKS 2:	Gebyar Ekonomi Digital dan Literasi Jambi (Gentala Arasi) 2025	72

06

Ketenagakerjaan dan
Kesejahteraan

6.1 Ketenagakerjaan Daerah	76
6.1.1 Perkembangan Ketenagakerjaan	76
6.1.2 Prospek Ketenagakerjaan	78
6.2 Kesejahteraan	78
6.2.1 Kemiskinan	78
6.2.2 Kesejahteraan Petani	81

07

Prospek Perekonomian
Daerah

7.1 Prospek Perekonomian Jambi Tahun 2025	84
7.1.1 Komponen Pengeluaran	84
7.1.2 Komponen Lapangan Usaha	85
7.2 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2026	85
7.3 Prospek Inflasi Tahun 2025	86
7.4 Prospek Inflasi Tahun 2026	86
7.5 Rekomendasi Kebijakan	86

Daftar Grafik

01

Grafik 1.1	Perkembangan PDRB Provinsi Jambi (yoy)	02
Grafik 1.2	Distribusi PDRB Triwulan III 2025 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran	03
Grafik 1.3	Indeks Penghasilan	04
Grafik 1.4	Perkembangan Kredit Konsumsi	04
Grafik 1.5	Perkembangan Jumlah Tamu Menginap	04
Grafik 1.6	Perkembangan Kredit Investasi	05
Grafik 1.7	Ekspor Non Migas ke Tiongkok	05
Grafik 1.8	Pangsan Ekspor Non Migas Berdasarkan Komoditas	06
Grafik 1.9	Perkembangan Ekspor Non Migas Berdasarkan Negara Tujuan	06
Grafik 1.10	Perkembangan Ekspor Non Migas Berdasarkan Komoditas	06
Grafik 1.11	Pangsa Ekspor Non Migas Berdasarkan Negara Tujuan	06
Grafik 1.12	Perkembangan Impor Non Migas Berdasarkan Komoditas	06
Grafik 1.13	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan usaha	08
Grafik 1.14	Perkembangan Harga CPO internasional, serta TBS 10 Tahun	08
Grafik 1.15	Perkembangan Harga Minyak WTI	09
Grafik 1.16	Perkembangan Jumlah Kendaraan Baru	09
Grafik 1.17	Produksi Karet	10
Grafik 1.18	Perkembangan Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang	11
Grafik 1.19	Perkembangan Jumlah Bongkar dan Muat Barang (Kargo)	11
Grafik 1.20	Perkembangan Konsumsi Semen	12

02

Grafik 2.1	Pangsa Realisasi Pendapatan Triwulan III 2025 Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi	22
Grafik 2.2	Pangsa Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Triwulan III 2025 di Provinsi Jambi	22
Grafik 2.3	Perkembangan Simpanan Pemerintah Provinsi Jambi di Perbankan	23

03

Grafik 3.1	Perkembangan Inflasi Provinsi Jambi	26
Grafik 3.2	Perkembangan Inflasi Tahunan Jambi (yoy)	28
Grafik 3.3	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Kota Jambi	28
Grafik 3.4	Perbandingan Inflasi Tahunan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera	28
Grafik 3.5	Perkembangan Harga Beras Kota Jambi Perkembangan Harga Bawang Putih dan Merah	29
Grafik 3.6	Perkembangan Harga Aneka Cabai Kota Jambi	29
Grafik 3.7	Perkembangan Harga Aneka Daging Kota Jambi	29
Grafik 3.8	Perkembangan Harga Emas Internasional	29
Grafik 3.9	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki Kota Jambi	30
Grafik 3.10	Perkembangan Inflasi Tahunan Bungo (yoy)	31
Grafik 3.11	Perkembangan Inflasi Tahunan	35
Grafik 3.12	Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau Kab. Bungo	35
Grafik 3.13	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan Kab. Bungo	36

Grafik 3.14	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Kab. Bungo	37
Grafik 3.15	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran Kab. Bungo	37
Grafik 3.16	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki Kab. Bungo	38
Grafik 3.17	Perkembangan Inflasi Tahunan Kerinci (yoy)	41
Grafik 3.18	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau Kab. Kerinci (yoy)	42
Grafik 3.19	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki Kab. Kerinci	43
Grafik 3.20	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan Kab. Kerinci	43
Grafik 3.21	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Kab. Bungo	44

04

Grafik 4.1	Survei Kegiatan Dunia Usaha Provinsi Jambi	50
Grafik 4.2	Pertumbuhan Kredit Korporasi	50
Grafik 4.3	Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Utama Provinsi Jambi	51
Grafik 4.4	Proporsi Kredit Korporasi menurut Sektor Utama Provinsi Jambi	51
Grafik 4.5	Proporsi Kredit Korporasi Per Jenis Penggunaan	51
Grafik 4.6	NPL Kredit Korporasi Sektor Utama Provinsi Jambi	51
Grafik 4.7	IKE, IEK, dan IKK Survei Konsumen Provinsi Jambi	51
Grafik 4.8	Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga	52
Grafik 4.9	Komposisi Dana Pihak Ketiga	52
Grafik 4.10	Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga	52
Grafik 4.11	Pangsa Dana Pihak Ketiga	52
Grafik 4.12	Perkembangan Pembiayaan Sektor Rumah Tangga per Jenis Penggunaan	53
Grafik 4.13	Pertumbuhan KPR per Tipe Perkembangan NPL Sektor Rumah Tangga per Jenis Pengeluaran	53

Grafik 4.14	Perkembangan Kredit UMKM Bank Umum Provinsi Jambi	53
Grafik 4.15	Pangsa Kredit Bank Umum Menurut Jenis Kredit UMKM	53
Grafik 4.16	Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan	53
Grafik 4.17	Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi	54
Grafik 4.18	NPL UMKM Provinsi Jambi	54
Grafik 4.19	NPL UMKM Menurut Sektor Ekonomi	54
Grafik 4.20	Perkembangan Aset Bank Umum	54
Grafik 4.21	Return on Asset	54
Grafik 4.22	BOPO	55
Grafik 4.23	Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum	55
Grafik 4.24	Perkembangan <i>Loan to Deposit</i> (LDR) Bank Umum Provinsi Jambi	57
Grafik 4.26	Suku Bunga Rata-Rata Tertimbang Kredit dan Deposito Bank Umum di Provinsi Jambi	57

05

Grafik 5.1	<i>Inflows, Outflows</i> dan <i>Netflows</i> di Provinsi Jambi	64
Grafik 5.2	Perkembangan Volume dan Nilai Kliring di Provinsi Jambi	64
Grafik 5.3	Perkembangan Volume dan Nilai RTGS di Provinsi Jambi	65
Grafik 5.4	Perkembangan Transaksi Kartu ATM dan/atau Kartu Debit	65
Grafik 5.5	Perkembangan Transaksi Kartu Kredit Perkembangan Transaksi Uang Elektronik	65
Grafik 5.6	Perkembangan Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya di Provinsi Jambi	66
Grafik 5.8	Realisasi penyaluran Program Sembako di Provinsi Jambi	67
Grafik 5.9	Perkembangan <i>Merchant</i> yang Memiliki QRIS di Provinsi Jambi	70
Grafik 5.10	Perkembangan QRIS- <i>Merchant</i> di Provinsi Jambi	70
Grafik 5.11	Perkembangan QRIS-User di Provinsi Jambi	71

06

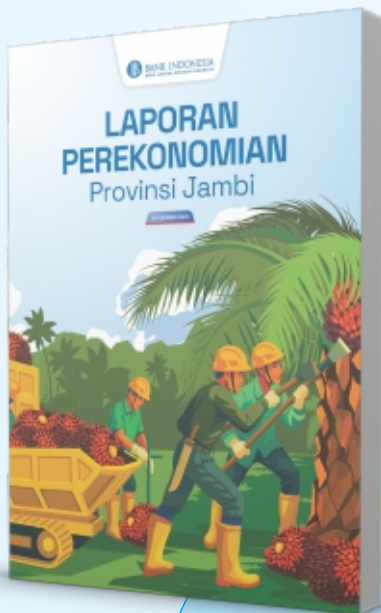
Grafik 6.1	Penyerapan Tenaga Kerja	78
Grafik 6.2	Distribusi Pengeluaran Penduduk	80
Grafik 6.3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80
Grafik 6.4	Nilai Tukar Petani	81

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Kontribusi PDRB Sisi Penggunaan Terhadap Pertumbuhan (yoy)	03
Tabel 1.2	Indeks Keyakinan Konsumen	04
Tabel 1.3	Realisasi Investasi	05
Tabel 1.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Jambi (yoy)	07
Tabel 2.1	Perkembangan Pendapatan APBD Provinsi Jambi	19
Tabel 2.2	Perkembangan Belanja APBD Provinsi Jambi	20
Tabel 2.3	Perkembangan Realisasi Pendapatan Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi	21
Tabel 2.4	Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi	22
Tabel 3.1	Perkembangan Inflasi Kota Jambi (Tahun Dasar 2022)	27
Tabel 3.2	Perkembangan Inflasi Kota Jambi Berdasarkan Kelompok dan Sub Kelompok Barang dan Jasa (Tahun Dasar 2022)	32
Tabel 3.3	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Bulanan (mtm) Kota Jambi Berdasarkan Komoditas	34
Tabel 3.4	Perkembangan Inflasi Bungo (Tahun Dasar 2022)	35
Tabel 3.5	Perkembangan Inflasi Kota Bungo Berdasarkan Sub Kelompok Barang dan Jasa (Tahun Dasar 2022)	38
Tabel 3.6	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Bulanan (mtm) Bungo Berdasarkan Komoditas	40
Tabel 3.7	Perkembangan Inflasi Kerinci (Tahun Dasar 2022)	41
Tabel 3.8	Perkembangan Inflasi Kerinci Berdasarkan Kelompok dan Sub Kelompok Barang dan Jasa (Tahun Dasar 2022)	44
Tabel 3.9	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Bulanan (mtm) Kerinci Berdasarkan Komoditas	46
Tabel 4.1	Penghimpunan Dana Bank Umum Provinsi Jambi (Rp Juta)	55
Tabel 4.2	Perkembangan Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Golongan Pemilik (Rp Juta)	56
Tabel 4.3	Perkembangan Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Lokasi Bank (Rp Juta)	56
Tabel 4.4	Perkembangan Kredit Bank Umum Provinsi Jambi (Rp Juta)	57
Tabel 4.5	Perkembangan <i>Non-Performing Loan</i> (NPL) Gross Bank Umum di Provinsi Jambi	58
Tabel 5.1	Perkembangan Sistem Pembayaran melalui KPwBI Provinsi Jambi	63
Tabel 5.2	Kas Keliling dan Penukaran Uang Tidak Layak Edar di Provinsi Jambi Tw III Tahun 2025	66
Tabel 5.3	Perkembangan Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Golongan Pemilik (Rp Juta)	68
Tabel 6.1	Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja	76
Tabel 6.2	Pekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama (ribu orang)	77
Tabel 6.3	Pekerja Berdasarkan Status Pendidikan (ribu orang)	77
Tabel 6.4	Pekerja berdasarkan Lapangan Usaha	78
Tabel 6.5	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jambi	79
Tabel 6.6	Garis Kemiskinan Provinsi Jambi	79
Tabel 6.7	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Provinsi Jambi	79
Tabel 6.8	<i>Gini Ratio</i> Provinsi Jambi	80
Tabel 6.9	Indeks Pembangunan Manusia menurut komponen	81



Ringkasan Eksekutif



Ekonomi Makro Regional

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan III 2025 sebesar 4,77% (yoy) atau terdeselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 4,99%(yoy). Angka tersebut lebih rendah dari regional Sumatera yang tercatat tumbuh sebesar 4,90%(yoy) serta lebih rendah dari nasional yang tumbuh sebesar 5,04%(yoy).

Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh LU Konstruksi yang tercatat masih mengalami penurunan aktivitas proyek konstruksi di Provinsi Jambi. Namun, perlambatan lebih dalam tertahan oleh meningkatnya produktivitas LU Pertanian dari subsektor perkebunan kelapa sawit yang tercatat meningkat pada periode laporan.

Di sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan III 2025 tertahan oleh kinerja investasi yang tercatat menurun sejalan dengan minimnya aktivitas konstruksi. Namun, perlambatan lebih dalam tertahan oleh kinerja ekspor dan konsumsi rumah tangga yang terjaga pada periode laporan.

Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jambi tercatat mencapai Rp2,7 Triliun, atau 60,50% dari target pendapatan APBD 2025 sebesar Rp4,48 Triliun. Capaian tersebut masih rendah dari prakiraan awal dampak dari penurunan penerimaan pajak, serta ketergantungan besar pada dana transfer pusat yang ikut tertekan akibat blokir anggaran. Berdasarkan komponennya, kontributor terbesar terhadap realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Jambi hingga triwulan III 2025 berasal dari komponen Pendapatan Transfer melalui pos Transfer Pemerintah Pusat, dengan nilai realisasi sebesar Rp1,58 Triliun atau 58,55% dari total pendapatan daerah.

Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi hingga triwulan III 2025 tercatat mencapai Rp2,5 Triliun, atau 56,26% terhadap pagu anggaran belanja daerah 2025 senilai Rp4,5 Triliun. Capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama dampak dari rasio serapan belanja modal dan proyek fisik yang belum penuh, banyak potensi belanja pembangunan atau layanan publik belum terealisasi, sehingga efektivitas APBD pun terbatas. Selanjutnya, Belanja Transfer memberikan kontribusi sebesar 26,5% terhadap total realisasi belanja daerah dengan nilai realisasi sebesar Rp677 Miliar.

Perkembangan Inflasi Daerah



Pada Triwulan III 2025, inflasi *year-on-year* Provinsi Jambi tercatat sebesar 3,77% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,34% (yoy). Realisasi inflasi tersebut juga tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat 2,65% (yoy). Laju inflasi Provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi di Kota Jambi, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Kerinci yang masing-masing tercatat sebesar 3,06% (yoy), 4,47% (yoy) dan 5,90% (yoy), angka realisasi Triwulan III 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada triwulan sebelumnya yang tercatat masing-masing sebesar 0,94% (yoy), 2,03% (yoy), dan 2,37% (yoy) untuk Kota Jambi, Kabupaten Bungo, dan Kab. Kerinci.

Secara triwulanan, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Jambi pada Triwulan III 2025 mengalami inflasi sebesar 1,38% (qtq), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,25% (qtq). Selanjutnya, secara kumulatif, pergerakan IHK Provinsi Jambi sampai triwulan III 2025, tercatat mengalami inflasi sebesar 3,05% (ytd), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,65% (ytd). Kenaikan inflasi tersebut didorong oleh kenaikan harga pada komoditas VF seiring dengan keterbatasan pada pasokan cabai merah di wilayah Sumatera secara umum dan kenaikan tarif pendidikan sejalan dengan masuknya tahun ajaran baru di Provinsi Jambi.

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM



Pertumbuhan kredit korporasi di Provinsi Jambi pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 49,72% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 43,99% (yoy). Berdasarkan lapangan usaha, sektor perdagangan tumbuh 29,82% (yoy) pada triwulan III 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,41% (yoy). Pertumbuhan kredit juga didorong oleh sektor lain-lain yang tumbuh sebesar 62,98% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang menurun sebesar 26,62% (yoy).

Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan mencapai Rp50,96 triliun atau tumbuh sebesar 12,46% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,47% (yoy). Pertumbuhan DPK disebabkan oleh pertumbuhan giro, deposito, dan tabungan yang tumbuh masing-masing sebesar 21,71% (yoy), 13,05% (yoy), dan 9,55% (yoy).

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



Transaksi tunai di Provinsi Jambi pada triwulan III 2025 menunjukkan net outflow sebesar Rp1,78 triliun. Total aliran uang kartal yang masuk KPwBI Provinsi Jambi pada triwulan III 2025 sebesar Rp834 miliar, sementara total aliran uang kartal yang diedarkan sebesar Rp2,61 triliun. Hal ini sejalan dengan meningkatnya aliran uang keluar karena periode libur panjang anak sekolah, masa pembayaran biaya kuliah dan penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi pada awal periode laporan.

Jumlah Pengguna QRIS juga terus tumbuh positif pada triwulan III 2025 mencapai 603.823 pengguna atau lebih tinggi dari triwulan II 2025 yang mencapai 593.890 pengguna. Volume transaksi QRIS di Provinsi Jambi juga terus mengalami peningkatan, hingga September 2025 tercatat sebanyak 9.543.967 transaksi dengan nilai Rp1,231 triliun.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan



Data posisi Agustus 2025 menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Jambi tercatat sebanyak 1,85 juta orang atau meningkat 2,64% dibandingkan Februari 2025. Peningkatan jumlah tenaga kerja tersebut sejalan dengan penurunan pada jumlah angka pengangguran di Provinsi Jambi yang tercatat turut menurun sebesar -2,64% (qta) atau menurun menjadi 82,30 ribu orang dari yang sebelumnya 84,50 ribu orang pada Februari 2025. Jumlah tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan angka pengangguran bulan Agustus 2025 yang tercatat sebanyak 86,08 ribu orang. Berdasarkan penurunan jumlah pengangguran tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 4,26% pada Agustus 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 4,48%.

Dari sisi kesejahteraan, indikator kemiskinan pada Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi tercatat meningkat sebanyak 5,52 ribu orang atau sebesar 0,46% (qta) dibandingkan dengan September 2024. Lebih lanjut, tingkat garis kemiskinan yang merupakan dasar penentuan pengelompokan penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,12% menjadi sebesar 75,50%.

Tingkat kesejahteraan petani di Provinsi Jambi pada Triwulan III 2025 terpantau lebih tinggi dibandingkan Triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Nilai Tukar Petani (NTP)¹ tercatat masih berada di atas 100, mencerminkan bahwa petani mengalami *surplus* di mana pendapatan yang diterima lebih tinggi dibandingkan beban pengeluaran. Data Triwulan III 2025 menunjukkan rerata NTP Provinsi Jambi sebesar 170,58, meningkat sebesar 2,83 poin dibanding rerata Triwulan III 2024 yang tercatat sebesar 157,75.

1. Sejak Januari 2020, data NTP telah menggunakan Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun Dasar 2018 dalam perhitungan data NTP.

Prospek Perekonomian Daerah



Perekonomian Provinsi Jambi diperkirakan tetap kuat pada tahun 2025, yaitu pada rentang 4,05% - 4,85% (yoy), didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat seiring dengan perbaikan kinerja lapangan usaha utama, seperti pertanian dan pertambangan, yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan. LU Pertanian diperkirakan akan tetap kuat seperti kinerja dari tahun sebelumnya, LU Pertambangan, khususnya pada sektor pertambangan batubara diproyeksikan mengalami perbaikan kinerja yang lebih baik. LU Industri Pengolahan, diperkirakan akan tumbuh melambat khususnya pada pengolahan crumb rubber akibat kendala pasokan bahan baku.

Inflasi gabungan Provinsi Jambi pada tahun 2025 diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran target inflasi nasional sebesar $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya memastikan ketersediaan stok pangan serta menekan volatilitas harga melalui berbagai langkah strategis. Beberapa program yang telah diimplementasikan mencakup pelaksanaan sidak, operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah mitigasi terhadap lonjakan harga pangan, pemberian subsidi ongkos angkut guna menekan biaya distribusi komoditas utamanya cabai merah dan implementasi Lahan Holtikultura Abadi (LAHTIBA).

Tabel Indikator Makro

Perekonomian Provinsi Jambi

1. INFLASI, PDRB, DAN EKSPOR IMPOR

Indikator	2024		2025		
	III	IV	I	II	III
INFLASI ¹⁾					
Indeks Harga Konsumen Kota Jambi	105,54	106,35	106,33	107,62	108,77
Indeks Harga Konsumen Bungo	105,71	106,46	107,80	108,70	110,43
Indeks Harga Konsumen Kerinci ²⁾	106,75	107,27	108,78	110,48	113,05
Laju Inflasi Tahunan (y-o-y) Kota Jambi	1,65	1,16	-0,06	0,94	3,06
Laju Inflasi Tahunan (y-o-y) Kabupaten Muaro Bungo	2,29	2,04	1,80	2,03	4,47
Laju Inflasi Tahunan (y-o-y) Kabupaten Kerinci ²⁾	2,81	2,07	0,98	2,37	5,90
PDRB - Harga Konstan (Juta Rp) ³⁾	45.187.262	45.596.116	43.886.780	46.345.712	47.349.355
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.165.249	12.445.227	11.880.197	12.546.826	13.003.855
Pertambangan dan Penggalian	9.718.598	9.759.474	9.628.721	9.910.882	10.138.690
Industri Pengolahan	4.583.190	4.489.216	4.412.008	4.629.359	4.745.734
Pengadaan Listrik, Gas	30.126	29.808	28.687	30.651	31.458
Pengadaan Air	57.041	56.225	56.913	57.631	56.765
Konstruksi	3.673.959	3.775.956	3.195.309	3.396.357	3.442.291
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.698.009	4.681.369	4.572.163	5.068.501	5.085.713
Transportasi dan Pergudangan	1.548.719	1.598.554	1.627.386	1.617.303	1.677.354
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	556.150	559.896	545.762	551.444	583.822
Informasi dan Komunikasi	1.970.404	1.937.491	1.885.558	2.163.722	2.147.796
Jasa Keuangan	963.434	919.941	1.005.227	987.636	1.022.855
Real Estate	652.214	655.764	667.112	669.074	672.970
Jasa Perusahaan	576.432	576.060	587.235	603.620	614.596
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.321.647	1.435.204	1.356.911	1.413.561	1.342.095
Jasa Pendidikan	1.545.384	1.525.114	1.344.224	1.550.175	1.626.273
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	658.909	641.283	637.362	648.378	678.495
Jasa lainnya	467.798	509.534	456.005	500.593	478.597
Pertumbuhan (y-o-y) Provinsi Jambi	4,01	6,00	4,55	4,99	4,77
Nilai Ekspor Non Migas (ribu USD) ⁴⁾	218.782	313.860	277.526	284.390	310.023
Nilai Impor Nonmigas (ribu USD) ⁵⁾	14.167	16.431	8.398	20.507	15.816

Sumber : BPS Provinsi Jambi & Bea Cukai (diolah)

Catatan

1) Sejak Januari 2024 perhitungan perkembangan IHK menggunakan SBH 2022, tahun 2022-2023 menggunakan perhitungan SBH 2018

2) Sejak Januari 2024 terdapat penambahan cakupan kota inflasi di Provinsi Jambi dari sebelumnya hanya Kota Jambi menjadi Kota Jambi, Kab. Bungo, dan Kab. Kerinci

3) Perhitungan PDRB masih menggunakan TD 2010

4) Pengklasifikasian komoditi menggunakan 21 kelompok barang berdasarkan SITC 2 digit yang berlaku.

5) Pengklasifikasian komoditi dalam statistik impor menggunakan SITC 2 digit

2. PERBANKAN

Indikator	2024		2025		
	III	IV	I	II	III
PERBANKAN					
A. Bank Umum:					
DPK (Rp Juta)	42.274.691	43.132.525	45.194.746	45.487.388	47.978.894
- Tabungan	7.361.713	6.261.509	6.946.989	7.698.346	8.944.131
- Giro	25.994.480	28.011.303	27.959.735	28.324.127	28.421.033
- Deposito	8.918.498	8.859.713	10.288.022	9.464.915	10.613.730
Kredit (Rp Juta) - berdasarkan Lokasi Proyek	82.760.950	74.957.030	86.278.536	85.134.475	88.321.363
- Modal Kerja	28.796.749	22.542.969	30.414.510	29.161.626	30.638.413
- Konsumsi	27.853.933	25.600.285	26.997.954	27.263.020	29.850.640
- Investasi	26.110.268	26.813.776	28.866.072	28.709.829	27.832.311
- LDR (%)	195,77	173,78	190,90	187,16	184,08
Kredit (Rp Juta) - berdasarkan Kantor Cabang	60.089.391	51.863.911	59.980.860	59.778.900	63.031.544
- Modal Kerja	20.900.723	14.695.588	21.106.509	20.263.268	22.178.264
- Investasi	15.836.501	14.713.027	15.555.149	15.946.864	16.779.493
- Konsumsi	23.352.167	22.455.296	23.319.202	23.568.768	24.073.787
- LDR (%)	142,14	120,24	132,72	131,42	131,37
- NPL Gross Nominal	991.296	774.450	948.498	964.595	1.149.597
- NPL Gross (%)	1,65	1,49	1,58	1,61	1,82
Kredit Mikro (< Rp 50 juta) (Rp Juta)	4.173.549	4.215.929	4.369.276	4.475.522	4.438.552
- Kredit Modal Kerja	2.629.649	2.603.632	2.736.739	2.809.076	2.755.034
- Kredit Investasi	566.021	598.160	603.249	608.447	594.657
- Kredit Konsumsi	977.879	1.014.137	1.029.288	1.057.999	1.088.862
Kredit Kecil (Rp 50 < x = Rp500 juta) (Rp Juta)	26.566.689	26.583.241	26.760.081	26.991.883	27.297.419
- Kredit Modal Kerja	4.772.634	4.539.614	4.566.709	4.646.377	4.583.597
- Kredit Investasi	5.397.490	5.524.526	5.695.778	5.749.958	5.826.769
- Kredit Konsumsi	16.396.565	16.519.101	16.497.594	16.595.549	16.887.053
Kredit Menengah (Rp500 juta < x = Rp5 miliar) (Rp Juta)	7.083.560	7.379.605	7.009.301	7.303.449	7.525.628
- Kredit Modal Kerja	3.153.186	3.230.756	3.132.074	3.256.242	3.319.449
- Kredit Investasi	1.674.730	1.804.267	1.835.193	1.948.315	2.058.826
- Kredit Konsumsi	2.255.644	2.344.582	2.042.034	2.098.892	2.147.353
Total Kredit MKM (Rp Juta) *)	37.823.798	38.178.775	38.138.658	38.770.855	39.261.599
- NPL MKM Gross (%)	2,16	1,74	2,04	2,04	2,05
- NPL MKM Gross Nominal	815.719	662.961	778.312	792.643	806.059

Sumber: LBU Bank Indonesia
*) Kategori Kredit MKM menggunakan pendekatan nominal kredit yang disalurkan untuk seluruh jenis kredit (UMKM dan Non UMKM)

3. SISTEM PEMBAYARAN

Uraian	2025			Pertumbuhan (yoy)		Pertumbuhan (qtq)	
	I	II	III	Nominal	Persen	Nominal	Persen
NON TUNAI							
KLIRING							
Nilai Kliring (juta Rp)	675.008	639.929	686.190	(58.513)	(0,08)	46.261	0,07
Volume Kliring (lembar warkat)	11.985	11.522	12.595	(1.135)	(0,08)	1.073	0,09
CEK DAN BIRO GILYET KOSONG							
Nominal (juta Rp)	13.097	11.301	15.215	2.493	0,20	3.914	0,35
Lembar	262	234	246	19	0,08	12	0,05
TUNAI							
NET INFLOWS/OUTFLOWS (JUTA RP)	(386.160)	412.814	(1.778.703)	(1.146.104)	0,55	(2.191.517)	(5,31)
Aliran Uang Masuk/ <i>Inflows</i> (juta Rp)	1.690.353	2.100.623	834.754	(473.759)	(2,76)	(1.265.869)	(0,60)
Aliran Uang Keluar/ <i>Outflows</i> (juta Rp)	2.076.513	1.687.809	2.613.457	672.344	2,89	925.648	0,55

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi



01. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah



“

**Perekonomian Provinsi Jambi triwulan
III 2025 tumbuh sebesar 4,77% (yoy),
tumbuh melambat dibandingkan
triwulan sebelumnya. Pertumbuhan
tersebut didorong oleh meningkatnya
produktivitas sektor perkebunan
kelapa sawit.**

1.1 Perkembangan Umum

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan III 2025 sebesar 4,77% (yoy) atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 4,99% (yoy) serta lebih rendah dibandingkan Nasional yang tumbuh sebesar 5,04 (yoy) (**GRAFIK 1.1**). Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh kinerja LU Konstruksi yang tercatat masih berkontraksi pada triwulan laporan akibat dari berkurangnya aktivitas pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis pemerintah. Dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi proyek strategis nasional pada tahun 2025 mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun nilai investasi.

Dari sisi pengeluaran, kinerja ekonomi Provinsi Jambi pada periode laporan didukung oleh pertumbuhan positif di beberapa komponen utama. Ekspor Provinsi Jambi tercatat meningkat, sejalan dengan peningkatan kinerja sektor perkebunan. Peningkatan ini sebagian besar ditopang oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mencatatkan kinerja positif. Komoditas unggulan seperti Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, karet, dan hasil perkebunan lainnya tetap menjadi penyumbang utama dalam mendorong pertumbuhan ekspor di triwulan laporan. Peningkatan permintaan global serta perbaikan pada sisi produktivitas dan efisiensi distribusi turut memperkuat daya saing komoditas daerah di pasar internasional.

Selain itu, LU Pertambangan dan Penggalan, khususnya minyak dan gas bumi (migas) yang turut memberikan kontribusi terhadap ekspor Provinsi Jambi. Intensitas eksplorasi dan produksi migas yang tetap relatif tinggi selama periode laporan berperan penting dalam menjaga stabilitas volume ekspor serta memperkuat neraca perdagangan daerah di tengah dinamika perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian. Di sisi konsumsi rumah tangga, pertumbuhan tetap terjaga kuat sejalan dengan tingginya permintaan domestik. Ketahanan konsumsi tersebut tercermin dari stabilnya daya beli masyarakat, yang didukung oleh perbaikan pendapatan pada sebagian besar kelompok masyarakat, khususnya pada sektor-sektor yang

masih menunjukkan aktivitas ekonomi positif seperti pertanian dan perdagangan.

Di sisi lain, pemanfaatan layanan keuangan digital yang semakin meluas serta program bantuan sosial yang tepat sasaran turut berperan dalam menjaga likuiditas dan kapasitas belanja masyarakat, terutama pada kelompok rumah tangga berpendapatan rendah. Optimisme konsumen yang tercermin dari survei konsumen pada level ekspansif juga memperkuat daya dorong konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, konsumsi pemerintah tercatat tumbuh meningkat pada periode laporan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh akselerasi realisasi belanja pemerintah daerah, terutama belanja barang dan jasa serta belanja operasional yang didorong oleh optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada semester kedua tahun anggaran.

Pada sisi lapangan usaha (LU), LU Pertanian mencatatkan peningkatan kinerja yang didorong oleh subsektor tanaman perkebunan, khususnya kelapa sawit, yang menunjukkan perbaikan produktivitas seiring membaiknya kondisi cuaca serta semakin optimalnya kegiatan pemeliharaan tanaman oleh pelaku usaha perkebunan. Perbaikan harga TBS kelapa sawit di tingkat petani turut memberikan dukungan positif terhadap peningkatan pendapatan petani. Kenaikan harga tersebut dipengaruhi oleh kondisi permintaan global yang relatif kuat serta stabilnya serapan industri hilir dalam negeri.

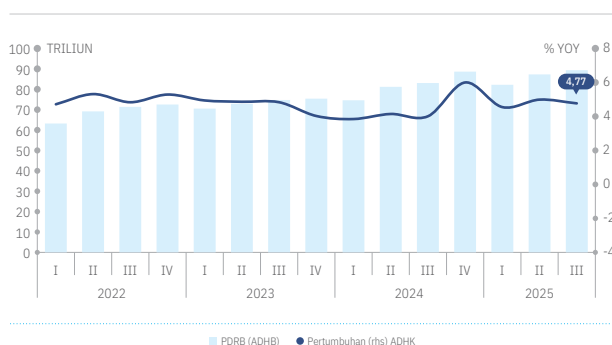
Kemudian, LU Perdagangan tercatat masih tumbuh tinggi, didukung oleh meningkatnya aktivitas distribusi dan transaksi perdagangan, baik yang bersumber dari penjualan komoditas perkebunan unggulan maupun produk konsumsi masyarakat. Peningkatan nilai tukar petani dan pendapatan masyarakat, terutama yang berasal dari subsektor perkebunan kelapa sawit, memberikan dorongan terhadap daya beli yang kemudian tercermin dalam meningkatnya permintaan barang konsumsi sehari-hari dan barang tahan lama. Di sisi lain, LU Konstruksi masih mencatatkan penurunan dipengaruhi oleh minimnya pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur skala besar, seperti jalan tol, bendungan atau PLTA, jaringan transportasi publik, serta kawasan industri sehingga menghambat kinerja LU dari yang sebelumnya menjadi penggerak utama LU Konstruksi.

1.2 PDRB Sisi Pengeluaran

Di sisi pengeluaran, pertumbuhan kinerja ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan III 2025 dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan konsumsi pemerintah yang tercatat tumbuh meningkat.

Peningkatan ekspor didorong oleh menguatnya permintaan global terhadap komoditas unggulan daerah, terutama dari LU pertanian dan LU pertambangan migas, sehingga memberikan

Grafik 1.1. Perkembangan PDRB Provinsi Jambi (yoy)



Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Tabel 1.1. Kontribusi PDRB Sisi Penggunaan Terhadap Pertumbuhan (yoy)

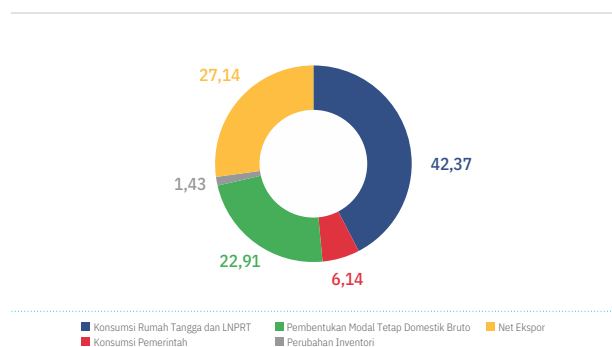
Jenis Pengeluaran	2024				2024	2025		
	I	II	III	IV		I	II	III
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,59	4,58	4,83	4,56	4,41	4,90	4,83	4,43
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga LNPR	29,11	7,99	9,98	4,91	12,42	(7,52)	8,65	2,50
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	21,48	7,55	11,04	(14,06)	4,54	3,22	(22,35)	5,01
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	(2,26)	2,60	8,39	11,86	6,78	1,78	3,22	(1,61)
Perubahan Inventori	(105,03)	(65,27)	240,54	(142,89)	(15,88)	259,09	(10,12)	(15,30)
Ekspor	5,50	5,94	(1,00)	8,33	3,54	3,61	4,56	7,24
Impor	1,15	5,70	3,41	5,47	3,90	0,81	(2,73)	3,27
PDRB	3,85	4,15	4,01	6,00	4,51	4,55	4,99	4,77

Sumber: BPS Provinsi Jambi

kontribusi signifikan terhadap penguatan neraca perdagangan daerah. Perbaikan harga komoditas perkebunan, terutama kelapa sawit, serta tingginya aktivitas eksplorasi migas di wilayah Jambi menjadi faktor yang menjaga ketahanan sektor eksternal. Penguatan ekspor ini tidak hanya mengonfirmasi daya saing komoditas primer Jambi dalam rantai perdagangan global, namun juga menghasilkan dampak ikutan berupa peningkatan likuiditas ekonomi di level daerah, terutama pada wilayah yang berbasis hasil alam.

Sementara itu, konsumsi pemerintah juga mencatatkan pertumbuhan positif sebagai hasil dari akselerasi realisasi belanja pemerintah daerah pada semester kedua tahun 2025. Optimalisasi pelaksanaan program prioritas, peningkatan belanja barang dan jasa, serta kelancaran penyaluran transfer dari pemerintah pusat turut memperkuat stimulus fiskal terhadap perekonomian daerah. Belanja pemerintah tersebut memberikan efek pengganda terhadap aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor-sektor yang terkait langsung dengan penyediaan layanan publik dan pelaksanaan proyek pembangunan daerah.

Di sisi lain, Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Provinsi Jambi pada periode laporan tercatat mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 1.2. Distribusi PDRB Triwulan III 2025 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran

Sumber: BPS Provinsi Jambi (dolah)

Minimnya pelaksanaan proyek-proyek strategis serta belum optimalnya realisasi investasi swasta memberikan tekanan terhadap kinerja PMTB secara keseluruhan. Tertahannya investasi konstruksi berdampak pada penurunan permintaan terhadap barang modal seperti alat berat, material bangunan, dan fasilitas infrastruktur lainnya. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global dan proses penyesuaian kebijakan fiskal turut menahan keputusan investor untuk memulai maupun melanjutkan proyek investasi baru. Kondisi tersebut memberikan sinyal bahwa kepercayaan pelaku usaha masih bersifat hati-hati di tengah prospek pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya merata. (TABEL 1.1)

Konsumsi rumah tangga turut terjaga didukung oleh program perlindungan sosial yang tetap tersalurkan dengan baik juga memberikan peran penting dalam menjaga likuiditas rumah tangga, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, sehingga kapasitas belanja mereka tetap dapat terjaga. Hal tersebut sejalan dengan hasil Survei Konsumsi Bank Indonesia yang menunjukkan keyakinan konsumen dan daya beli masyarakat berada pada level optimis yang dapat dilihat dari inflasi Provinsi Jambi yang masih terjaga pada triwulan III 2025 yang turut mendorong kinerja positif konsumsi rumah tangga.

Berdasarkan distribusinya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada Triwulan III 2025 masih didominasi dari konsumsi rumah tangga dan LNPR sebesar 42,37%. Selanjutnya, diikuti oleh net ekspor sebesar 27,14%, PMTDB dengan pangsa sebesar 22,91%, konsumsi pemerintah sebesar 6,14% dan perubahan inventori sebesar 1,43% (GRAFIK 1.2).

1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga

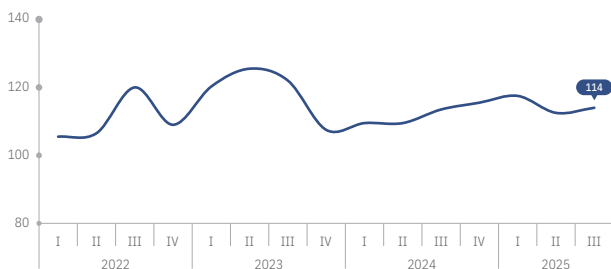
Konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh 4,43% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,83% (yoy).

Berlanjutnya tren pertumbuhan positif konsumsi rumah tangga didorong oleh masih terjaganya daya beli masyarakat seiring dengan harga yang terjaga. Selain itu, berbagai insentif dan jaring

Tabel 1.2. Indeks Keyakinan Konsumen

Indeks	2024				2025		
	I	II	III	IV	I	II	III
Indeks Kondisi Ekonomi	108,33	105,70	110,70	114,80	111,50	102,70	99,50
Indeks Ekspektasi Konsumen	111,33	110,80	111,50	119,50	112,80	116,70	118,20
Indeks Keyakinan Konsumen	109,83	108,30	111,10	117,20	112,20	109,70	108,80

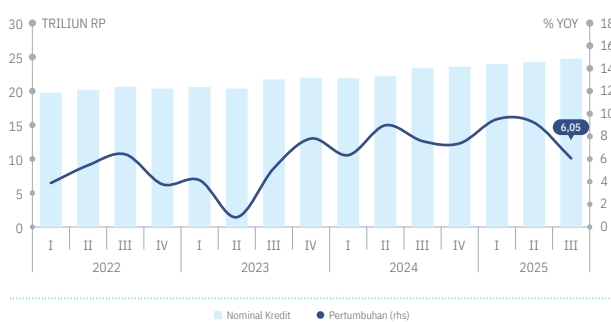
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

Grafik 1.3. Indeks Penghasilan

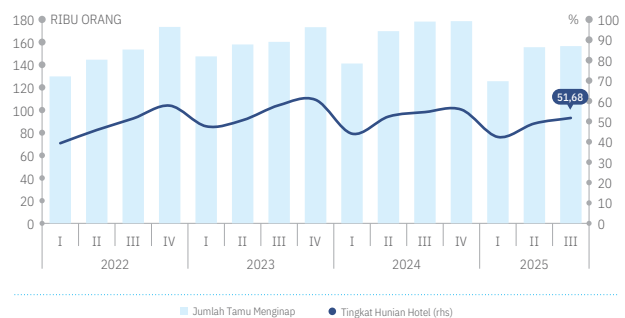
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia (diolah)

pengaman sosial yang telah disiapkan oleh Pemerintah, antara lain melalui penyaluran bansos sembako, bansos non tunai, dan program keluarga harapan juga turut menopang daya beli masyarakat. Terjaganya keyakinan konsumen dan daya beli masyarakat sejalan dengan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang terjaga pada level optimis (indeks >100). Indeks keyakinan konsumen di Provinsi Jambi pada triwulan III 2025 sebesar 108,80. (TABEL 1.2). Lebih lanjut, terjaganya daya beli masyarakat juga terkonfirmasi dari Indeks Penghasilan Konsumen sebesar 114 pada triwulan III 2025. (GRAFIK 1.3).

Terjaganya daya beli masyarakat, juga terlihat dari perkembangan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel sebesar 51,68% atau meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (GRAFIK 1.5). Disamping itu, kegiatan konsumsi yang dibiayai mulai kredit juga masih tetap positif namun relatif melambat. Kredit konsumsi pada periode laporan tumbuh

Grafik 1.4. Perkembangan Kredit Konsumsi

Sumber: LBU Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.5. Perkembangan Jumlah Tamu Menginap

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

sebesar 6,05% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,21% (yoy) (GRAFIK 1.4). Pertumbuhan kredit ini ditopang oleh berlanjutnya tren pertumbuhan positif kredit rumah tangga sub sektor multiguna, kepemilikan rumah (KPR) dan pemilikan kendaraan bermotor (KKB).

1.2.2 Konsumsi Pemerintah

Konsumsi pemerintah pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh sebesar 5,01% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 22,35% (yoy).

Peningkatan kinerja tersebut didorong dengan semakin akseleratifnya realisasi belanja pemerintah daerah di paruh kedua tahun anggaran. Optimalisasi pelaksanaan program prioritas pembangunan dan peningkatan belanja barang dan jasa menjadi faktor utama yang menggerakkan peningkatan permintaan domestik dari sisi fiskal. Peningkatan konsumsi pemerintah turut dipengaruhi oleh efisiensi penyaluran transfer ke daerah dari pemerintah pusat yang berjalan lebih tepat waktu, sehingga memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam melaksanakan agenda pembangunan strategis, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik dan penguatan kesejahteraan masyarakat. Stimulus fiskal ini memberikan efek pengganda yang positif terhadap aktivitas ekonomi, terutama pada sektor yang secara langsung terkait dengan belanja pemerintah seperti jasa pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintah, serta jasa penyediaan barang pendukung proyek pemerintah.

Selain itu, berlanjutnya penyaluran berbagai jaring pengaman sosial, antara lain melalui penyaluran bansos sembako, bansos non tunai, program keluarga harapan dan upaya pengendalian inflasi yang mendorong realisasi belanja subsidi dan belanja hibah.

1.2.3 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)

Perkembangan investasi yang terlihat dari PMTDB tercatat berkontraksi sebesar 1,61% (yoy) pada triwulan III 2025, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,22% (yoy).

Secara nominal kinerja PMTDB masih didorong oleh investasi dalam negeri. Hal ini tercermin dari komponen Penanaman Modal Asing (PMA) pada triwulan III 2025 tercatat meningkat secara nominal dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp 586 Miliar atau tumbuh sebesar 294,83% (yoy). Di sisi lain, komponen Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada triwulan III 2025 tercatat menurun secara nominal dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp 3,1 Triliun atau berkontraksi sebesar 15,39% (yoy).

Penurunan kinerja investasi di Jambi terutama dipicu oleh menurunnya kegiatan konstruksi. Hal ini terjadi karena beberapa proyek infrastruktur besar yang sebelumnya menjadi motor utama investasi sudah mencapai tahap penyelesaian pada tahun 2024. Dengan rampungnya proyek-proyek tersebut, kontribusi sektor konstruksi terhadap total investasi secara otomatis menurun. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa pipeline investasi baru dari sektor swasta belum berkembang secara optimal untuk menggantikan peran investasi pemerintah. Dengan demikian, upaya penguatan iklim usaha dan percepatan masuknya investasi langsung sektor produktif, seperti industri pengolahan berbasis sumber daya alam, pariwisata, serta energi terbarukan, menjadi sangat krusial. Diversifikasi sumber investasi tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pertumbuhan investasi daerah dan mengurangi ketergantungan pada proyek infrastruktur pemerintah semata.

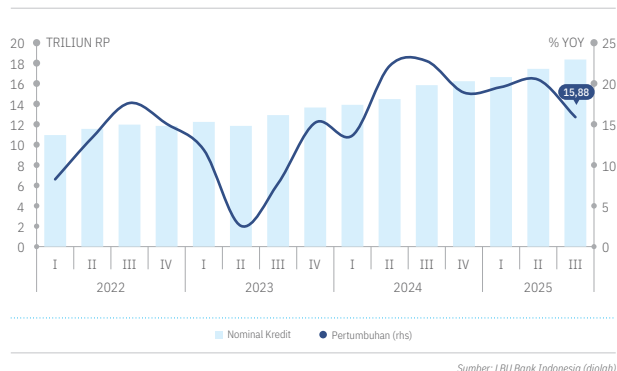
Sejalan dengan penurunan kinerja PMTDB, penyaluran pembiayaan kredit investasi pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh sebesar 15,88% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 20,47% (yoy). (GRAFIK 1.6).

Tabel 1.3. Realisasi Investasi

	2024				2025		
	I	II	III	IV	I	II	III
PMA (USD Juta)	45,78	10,13	9,28	40,40	25,02	9,12	36,64
PMDN (RP Miliar)	1.754,08	2.136,73	3.668,53	2.426,90	3.335,71	4.689,94	3.103,98

Sumber: BKPM (diolah)

Grafik 1.6. Perkembangan Kredit Investasi



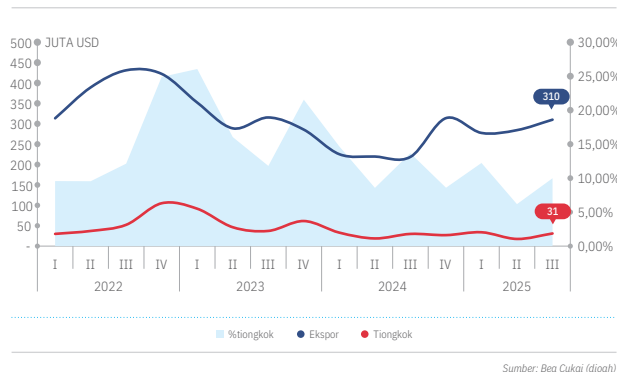
1.2.4 Perdagangan Eksternal

Kinerja perdagangan eksternal tercatat tumbuh tinggi pada triwulan III 2025. Dari sisi ekspor, kinerja ekspor pada periode laporan tumbuh sebesar 7,24% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,56% (yoy). Sementara itu, kinerja impor pada triwulan III 2025 turut tumbuh sebesar 3,27% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 2,73% (yoy).

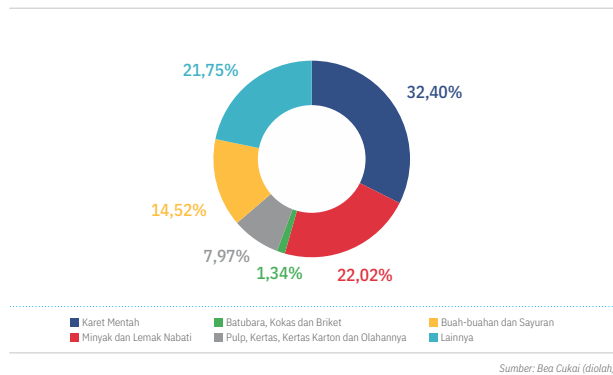
Secara keseluruhan dengan memperhitungkan ekspor-impor, *net* ekspor Provinsi Jambi tumbuh sebesar 12,93% (yoy), atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 16,81% (yoy).

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, nilai ekspor non migas Provinsi Jambi pada triwulan III 2025 tercatat sebesar US\$ 310.023 juta atau tumbuh sebesar 41,70% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 29,48% (yoy). Perbaikan kinerja ekspor tersebut terutama ditopang oleh meningkatnya volume ekspor komoditas

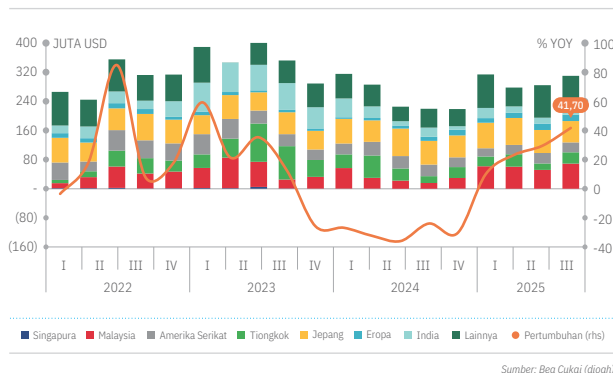
Grafik 1.7. Ekspor Non Migas ke Tiongkok



Grafik 1.8. Pangsa Ekspor Non Migas Berdasarkan Komoditas



Grafik 1.9. Perkembangan Ekspor Non Migas Berdasarkan Negara Tujuan

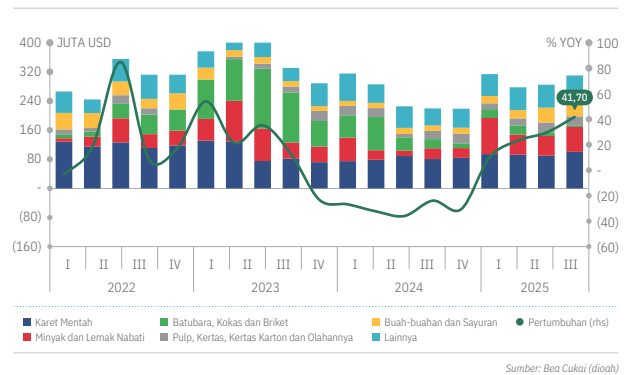


unggulan daerah, yaitu *Crude Palm Oil* (CPO). Pemulihan produktivitas komoditas perkebunan kelapa sawit, seiring membaiknya pasokan Tandan Buah Segar (TBS) setelah berakhirnya musim trek, mendorong peningkatan kapasitas pengolahan dan volume ekspor CPO selama periode laporan.

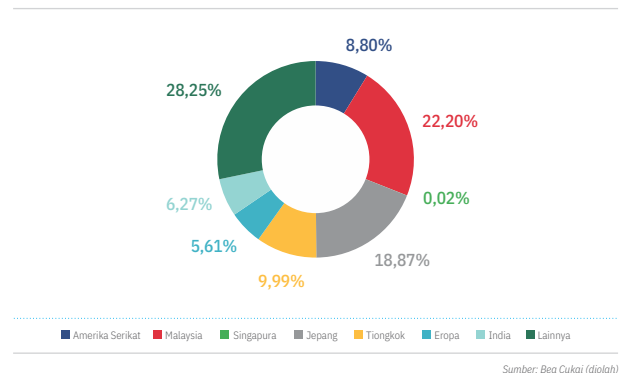
Pangsa ekspor non migas berdasarkan negara tujuan menunjukkan Malaysia menjadi importir terbesar komoditas Provinsi Jambi pada periode laporan. Nilai ekspor ke Malaysia tercatat sebesar US\$ 68,81 juta (pangsa 22,20% dari total ekspor). Selanjutnya, diikuti oleh Jepang dengan nilai ekspor US\$ 58,50 juta (pangsa 18,87% dari total ekspor), Tiongkok dengan nilai ekspor US\$30,97 (pangsa 9,99% dari total ekspor), Amerika Serikat dengan nilai ekspor US\$ 27,28 juta (pangsa 8,80% dari total ekspor), India dengan nilai ekspor US\$ 19,42 juta (pangsa 6,27% dari total ekspor), Eropa dengan nilai ekspor sebesar US\$ 17,37 juta (pangsa 5,61% dari total ekspor), dan lainnya US\$ 87,58 juta (pangsa 28,25% dari total ekspor) (GRAFIK 1.8).

Berdasarkan komoditasnya, kontribusi ekspor non migas terbesar masih disumbangkan oleh kelompok komoditas karet mentah sebesar US\$ 100,42 juta atau 32,40% dari total ekspor luar negeri non migas. Selanjutnya, diikuti oleh kelompok komoditas minyak dan lemak nabati yang tercatat sebesar US\$ 68,27 juta dengan pangsa 22,02%. Kemudian ekspor buah-

Grafik 1.10. Perkembangan Ekspor Non Migas Berdasarkan Komoditas



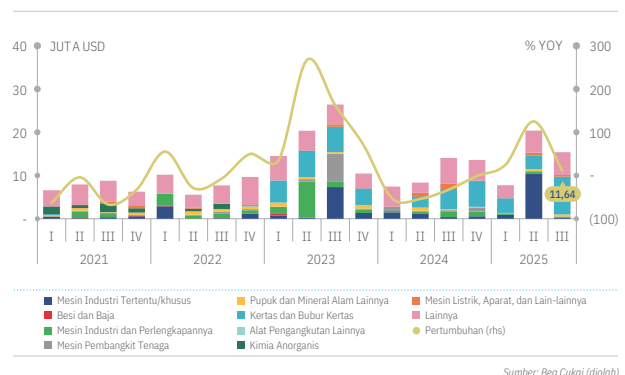
Grafik 1.11. Pangsa Ekspor Non Migas Berdasarkan Negara Tujuan



buahan dan sayuran memiliki pangsa 14,52% dengan nilai ekspor sebesar US\$ 45,02 juta dan diikuti oleh kelompok *pulp*, kertas, kertas karton dan olahannya yang tercatat sebesar US\$ 24,69 juta dengan pangsa 7,97%. Adapun kelompok komoditas batubara, kokas dan briket berada di posisi terakhir dan tercatat sebesar US\$ 4,15 juta dengan pangsa 1,34% (GRAFIK 1.9).

Peningkatan kinerja ekspor non migas terjadi pada kelompok komoditas minyak dan lemak nabati dan komoditas buah-buahan dan sayuran yang masing masing tumbuh sebesar 155,67% (yoy) dan 178,46% (yoy). Selanjutnya, kelompok komoditas buah-buahan dan sayuran tumbuh sebesar 170,50% (yoy), serta ekspor karet mentah tumbuh sebesar 20,90% (yoy).

Grafik 1.12. Perkembangan Impor Non Migas Berdasarkan Komoditas



Peningkatan kinerja lebih lanjut tertahan oleh penurunan kinerja kelompok batubara, kokas dan briket yang pada triwulan laporan masih berkontraksi sebesar 68,52% (yoy). Terkontraksinya kinerja ekspor batubara pada periode berjalan dipengaruhi oleh menurunnya produksi batubara dampak dari berlanjutnya perlemahan HBA serta terganggunya distribusi jalur angkutan komoditi batubara (GRAFIK 1.10).

Sementara itu, impor non migas didominasi oleh kelompok komoditas kertas dan bubur kertas sebesar US\$ 8,7 juta atau menyumbang 55,35% dari total impor non migas. Selanjutnya, kelompok komoditas pupuk dan mineral alam lainnya menyumbang 3,04% dengan nilai US\$ 0,48 juta. Kemudian, mesin industri tertentu/khusus sebesar US\$ 0,29 juta dengan pangsa pasar sebesar 1,87%. Komoditas mesin industri dan perlengkapan dengan nilai sebesar US\$ 0,21 juta dengan pangsa sebesar 1,35%. Sedangkan sisanya dengan pangsa sebesar 33,29% didominasi oleh kelompok lainnya dengan nilai sebesar US\$ 5,26 juta. (GRAFIK 1.12).

1.3. PDRB Sisi Lapangan Usaha

Pertumbuhan perekonomian Provinsi Jambi pada Triwulan III 2025 terutama didorong oleh kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta LU Perdagangan Besar dan Eceran yang mencatatkan pertumbuhan positif dan menjadi penopang utama aktivitas ekonomi daerah pada periode laporan. Kinerja

LU Pertanian menunjukkan peningkatan yang kuat seiring dengan pulihnya produktivitas perkebunan kelapa sawit dan karet. Perbaikan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani dan meningkatnya harga CPO global memberikan dorongan signifikan terhadap pendapatan masyarakat, khususnya yang bergantung pada komoditas perkebunan. Peningkatan daya beli masyarakat kemudian tercermin langsung pada pertumbuhan LU Perdagangan yang tetap tinggi.

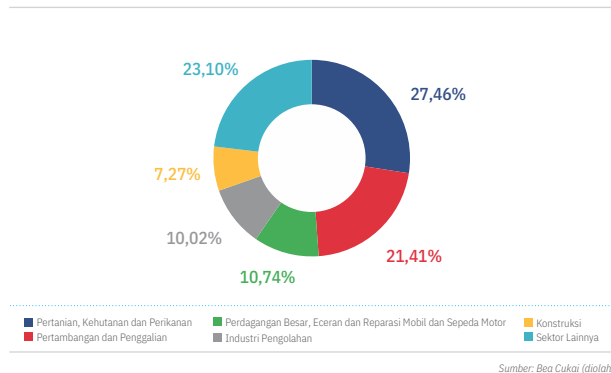
Di sisi lain, LU Konstruksi tercatat masih berkontraksi yang disebabkan oleh berkurangnya aktivitas pembangunan fisik, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis pemerintah maupun realisasi investasi swasta yang belum menunjukkan pemulihan optimal. LU Industri Pengolahan juga tercatat mengalami perlambatan meskipun produksi *Crude Palm Oil* (CPO) meningkat seiring dengan pulihnya pasokan bahan baku tandan buah segar (TBS), dampaknya terhadap pertumbuhan industri pengolahan belum optimal.

Adapun kinerja terbaik dengan pertumbuhan tertinggi pada triwulan III 2025 terjadi pada LU Informasi dan Komunikasi yang mengalami pertumbuhan sebesar 9,00% (yoy). Selanjutnya, berturut-turut diikuti oleh LU Perdagangan tumbuh sebesar 7,91% (yoy). Kemudian, LU Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,49% (yoy) serta LU Petanian sebesar 7,01% (yoy) (TABEL 1.4). Pertumbuhan lapangan usaha di atas, antara lain didorong oleh meningkatnya daya beli masyarakat dan aktivitas

Tabel 1.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Jambi (yoy)

Kelompok	2024				2024	2025		
	I	II	III	IV		I	II	III
LAPANGAN USAHA								
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2,63	3,06	2,61	9,01	4,25	6,57	5,47	7,01
Pertambangan dan Penggalian	(6,10)	(0,94)	(3,50)	7,84	(0,87)	3,84	4,97	4,32
Industri Pengolahan	7,16	5,88	3,72	2,47	4,73	4,46	5,32	3,55
Pengadaan Listrik dan Gas	9,45	9,42	7,32	4,71	7,65	1,35	2,60	4,42
Pengadaan Air	1,18	1,29	1,14	4,29	1,96	3,81	2,04	(0,49)
Konstruksi	6,60	12,19	10,91	9,49	9,83	(0,83)	(1,93)	(6,31)
Perd. Besar, Eceran, Rep. Mobil dan Spd Motor	8,11	6,10	7,97	1,42	5,90	5,42	11,36	7,91
Transportasi dan Pergudangan	10,16	8,21	8,54	4,03	8,19	12,54	9,61	7,49
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,48	11,50	8,39	5,66	9,64	1,27	0,94	5,03
Informasi dan Komunikasi	6,50	4,97	7,61	2,06	5,24	1,45	12,68	9,00
Jasa Keuangan	1,98	0,56	3,70	2,12	2,32	6,58	4,72	5,24
Real Estate	4,84	5,41	6,08	4,86	5,30	4,66	4,33	3,18
Jasa Perusahaan	19,52	6,48	7,78	5,88	9,53	7,90	5,42	6,62
Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jam. Sos. Wajib	31,33	5,40	16,21	0,07	11,31	3,04	(8,70)	2,20
Jasa Pendidikan	8,26	6,86	16,32	3,11	8,46	2,95	0,50	5,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28,67	14,74	11,59	4,74	13,26	1,37	1,55	3,96
Jasa Lainnya	14,81	3,46	4,60	10,58	8,20	(2,98)	4,54	2,31
PDRB	3,85	4,15	4,01	6,00	4,51	4,55	4,99	4,77

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Grafik 1.13. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan usaha

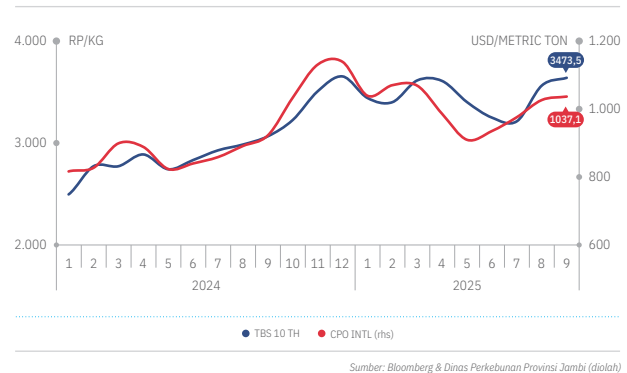
konsumsi, terlebih didukung oleh momentum peningkatan permintaan barang konsumsi pada periode perayaan keagamaan serta semakin meluasnya pemanfaatan *platform* perdagangan digital. Arus distribusi barang dan mobilitas masyarakat juga turut meningkat, dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi maupun aktivitas perdagangan antarwilayah yang semakin intensif. Ketersediaan layanan logistik yang semakin membaik turut menjadi faktor pendukung bagi sektor ini.

Berdasarkan LU, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada Triwulan III 2025 masih didominasi dari LU Pertanian sebesar 27,46%. Selanjutnya, diikuti oleh LU Pertambangan sebesar 21,41%, LU Perdagangan dengan pangsa sebesar 10,74%, LU Industri sebesar 10,02% dan LU Konstruksi sebesar 7,27% (GRAFIK 1.13).

1.3.1 Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kinerja LU Pertanian pada triwulan III 2025 kembali melanjutkan tren positif dan tercatat tumbuh sebesar 7,01% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,47% (yoy). LU Pertanian memiliki andil sebesar 1,31% terhadap PDRB Provinsi Jambi.

Pada sisi lapangan usaha pertanian, kinerja pada periode laporan mengalami peningkatan. Berakhirnya musim trek serta kondisi cuaca kemarau yang relatif kondusif justru mendorong masuknya periode panen, sehingga volume produksi Tandan Buah Segar (TBS) mengalami peningkatan selama periode laporan. Peningkatan pasokan TBS ini tidak hanya memperkuat sektor perkebunan, tetapi juga memberikan dorongan terhadap aktivitas industri pengolahan kelapa sawit, sehingga kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian semakin menguat. Di sisi harga, TBS kelapa sawit di tingkat lokal yang masih berada pada level yang cukup tinggi dan tercatat sebesar Rp3.473,56/kg pada triwulan laporan atau tumbuh 16,02% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 21,21% (yoy). Di pasar global, harga jual CPO

Grafik 1.14. Perkembangan Harga CPO internasional, serta TBS 10 Tahun

tercatat sebesar US\$1.013,493/MT atau tumbuh sebesar 13,74% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,91% (yoy). (GRAFIK 1.14)

Namun demikian, pertumbuhan lebih tinggi akibat harga komoditas karet alam di tingkat petani masih mengalami tekanan sejalan dengan lemahnya permintaan global, terutama dari industri manufaktur ban dan otomotif di negara-negara mitra dagang utama. Rata-rata harga komoditas karet alam diperjualbelikan pada harga USD 2.30/kg atau terkontraksi sebesar 7,85% (yoy), membaik jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 9,85% (yoy).

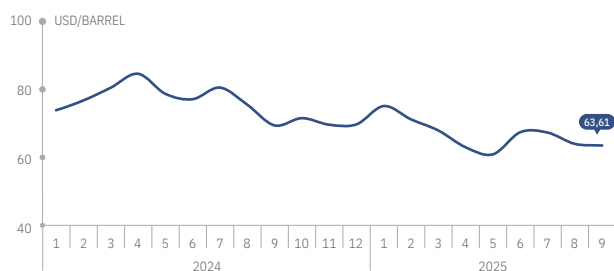
1.3.2 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

Kinerja LU Pertambangan pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh sebesar 4,32% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,97% (yoy). LU Pertambangan memiliki andil sebesar 1,02% terhadap PDRB Provinsi Jambi.

Pertumbuhan LU Pertambangan ditopang oleh masih tingginya produktivitas minyak dan gas bumi di Provinsi Jambi. Subsektor migas menjadi motor utama pertumbuhan seiring keberlanjutan peningkatan produksi dan stabilitas kegiatan operasional di berbagai blok migas yang beroperasi di wilayah Jambi. Konsistensi kinerja produksi migas tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan sektor pertambangan secara keseluruhan, serta menopang kinerja ekspor daerah selama periode laporan.

Perekonomian Jambi turut didukung oleh perkembangan sektor migas melalui beroperasinya *Akatara Gas Processing Facilities* (AGPF) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Fasilitas yang dioperasikan oleh *Jadestone Energy* ini menelan investasi sekitar USD 130 juta atau setara Rp2 triliun dan telah beroperasi penuh sejak akhir 2024. Kapasitas produksinya mencapai sekitar 25,5 juta standar kaki kubik gas per hari, 185 metrik ton LPG per hari, dan 1.098 barel kondensat per hari. Keberadaan

Grafik 1.15. Perkembangan Harga Minyak WTI



Sumber: Bloomberg (dialah)

AGPF memberikan kontribusi strategis terhadap ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan impor LPG serta memperkuat pasokan energi domestik.

Namun demikian, komoditas batubara masih mengalami tekanan yang membatasi potensi kontribusi terhadap pertumbuhan sektor pertambangan. Pembatasan jalur distribusi angkutan darat batubara, yang sebelumnya sempat ditutup karena isu keselamatan dan kemacetan lalu lintas, hanya kembali dibuka secara terbatas.

Meski merupakan langkah strategis awal, operasional distribusi darat masih belum optimal sehingga pemulihan aktivitas pengangkutan dan pemasaran batubara berjalan lambat. Sebagai upaya jangka menengah, pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan tengah memprioritaskan pembangunan jalur khusus angkutan batubara, yang ditargetkan dapat mulai beroperasi pada tahun mendatang. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu mengatasi hambatan distribusi yang selama ini menjadi kendala utama sektor batubara, serta meningkatkan efisiensi logistik dan daya saing komoditas.

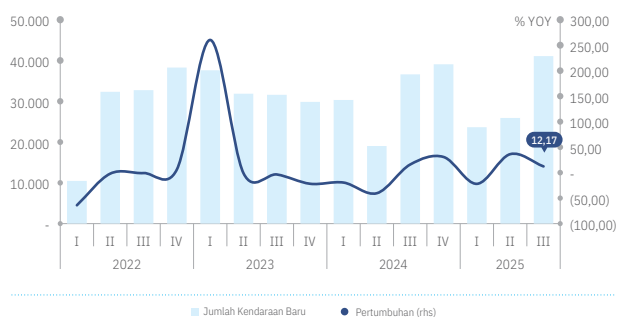
Pada komoditas migas, rata-rata harga minyak pada triwulan III 2025 tercatat sebesar US\$ 65,03/bbl atau terkontraksi sebesar 13,52% (yoy), tidak sedalam triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 20,32% (yoy) dengan rata-rata harga sebesar US\$ 73,87/bbl. (GRAFIK 1.15)

Tekanan harga ini dipicu oleh kombinasi beberapa faktor global, antara lain kebijakan tarif tambahan Amerika Serikat terhadap mitra dagang utama yang memicu kekhawatiran perlambatan ekonomi global, serta rencana OPEC+ untuk mempercepat pengakhiran kebijakan pemangkasan produksi mulai September sehingga pasokan minyak berpotensi meningkat signifikan.

1.3.3 Lapangan Usaha Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

LU Perdagangan masih melanjutkan tren positif di triwulan III 2025 dan tumbuh sebesar 7,91% (yoy), melambat

Grafik 1.16. Perkembangan Jumlah Kendaraan Baru



Sumber: Bakeda Provinsi Jambi

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 11,36% (yoy). LU Perdagangan memiliki andil sebesar 0,51% terhadap PDRB Provinsi Jambi.

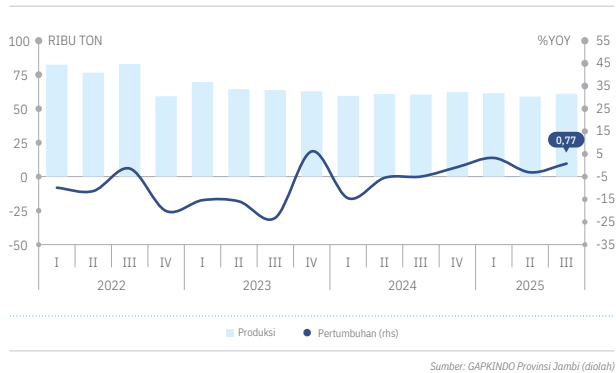
Kinerja sektor ini terutama ditopang oleh meningkatnya volume perdagangan ritel, baik pada perdagangan barang kebutuhan pokok maupun pada kelompok barang tahan lama seperti kendaraan bermotor. Pertumbuhan jumlah kendaraan baru di Provinsi Jambi pada triwulan III 2025 tercatat sebanyak 41.048 penambahan kendaraan atau tumbuh sebesar 12,17%, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 36,23 % (yoy) (GRAFIK 1.16). Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus, yang diikuti dengan penyelenggaraan serangkaian kegiatan masyarakat serta meningkatnya mobilitas penduduk, memberikan dorongan tambahan terhadap permintaan barang dan jasa. Selain itu, adanya sejumlah hari libur nasional dan long weekend pada periode tersebut semakin memperkuat aktivitas belanja.

Stabilitas inflasi pada tingkat yang terkelola dengan baik turut memperkuat keyakinan konsumen dalam melakukan belanja, yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang tetap berada pada zona optimis. Kinerja yang solid pada subsektor perdagangan kendaraan bermotor menjadi indikator tambahan atas meningkatnya selera konsumsi masyarakat kelas menengah, sehingga memperkuat dorongan ekspansi aktivitas perdagangan secara keseluruhan.

1.3.4 Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Lapangan usaha industri pengolahan tumbuh sebesar 3,55% (yoy) pada triwulan III 2025, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,32% (yoy). LU Industri memiliki andil sebesar 0,48% terhadap PDRB Provinsi Jambi.

Perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh melemahnya kinerja industri pengolahan karet yang masih mengalami tekanan, baik dari sisi harga maupun permintaan. Harga karet alam yang belum menunjukkan pemulihan signifikan turut menurunkan minat

Grafik 1.17. Produksi Karet

produksi pengolahan karet di Provinsi Jambi, sehingga kapasitas pemanfaatan industri dan nilai tambah yang dihasilkan belum dapat meningkat secara optimal. Penurunan permintaan global terhadap produk olahan karet, khususnya dari industri manufaktur ban dan otomotif di negara mitra dagang utama, semakin membatasi ruang ekspansi subsektor ini. Kondisi tersebut berdampak pada pendapatan pelaku usaha pengolahan karet dan menahan geliat industri, terutama yang berskala kecil hingga menengah di wilayah sentra karet Provinsi Jambi.

Namun, penurunan harga tersebut belum tercermin dari produksi *crumbrubber* di Provinsi Jambi triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 0,77% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 3,11% (yoy) (GRAFIK 1.17).

Meski demikian, perlambatan kinerja industri pengolahan tidak terjadi lebih dalam berkat peningkatan produksi dan aktivitas industri pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO). Peningkatan pasokan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebagai bahan baku industri, seiring berakhirnya musim trek, mendorong peningkatan output pengolahan sawit. Selain itu, harga CPO yang masih berada pada level yang cukup menguntungkan tetap menjadi faktor penahan perlambatan industri secara keseluruhan. Pada saat yang sama, kebijakan pemerintah terkait pemenuhan *Domestic Market Obligation* (DMO) minyak goreng serta penguatan hilirisasi sawit termasuk pengembangan biodiesel, oleokimia, dan produk turunan lainnya yang turut menopang stabilitas permintaan dalam negeri terhadap CPO.

Program hilirisasi yang terus diperkuat tersebut mendorong peningkatan kapasitas serapan industri domestik, sehingga mampu mengurangi tekanan dari fluktuasi harga CPO global yang masih menunjukkan pola moderasi. Dengan lebih besarnya porsi pemanfaatan CPO untuk kebutuhan domestik melalui DMO dan sektor hilir, ketergantungan industri terhadap pasar ekspor dapat ditekan, sekaligus memperkuat ketahanan sektor industri pengolahan sawit di tengah volatilitas pasar internasional.

Penurunan ini tidak hanya disebabkan oleh lemahnya permintaan eksternal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor domestik seperti cuaca yang kurang mendukung, produktivitas tanaman yang menurun akibat usia pohon karet yang relatif tua, serta keterbatasan peremajaan perkebunan karet rakyat.

1.3.5 Lapangan Usaha Lainnya

Secara umum, masih terdapat LU yang melanjutkan tren pertumbuhan positif pada triwulan III 2025 dengan **LU Transportasi dan Pergudangan** merupakan salah satu LU yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar **7,49% (yoy)**, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar **9,61% (yoy)**.

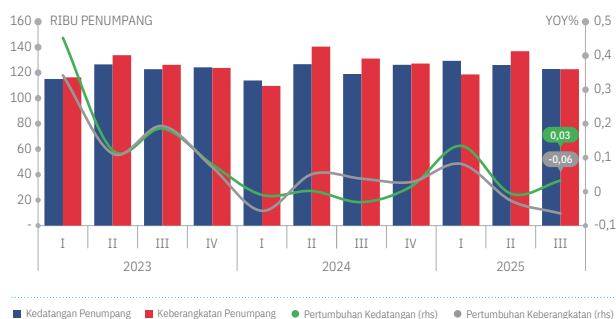
Pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari meningkatnya volume mobilitas masyarakat dan distribusi barang, yang terdorong oleh kuatnya konsumsi rumah tangga serta pertumbuhan LU Perdagangan yang tetap tinggi pada periode laporan. Momentum musiman seperti perayaan Hari Kemerdekaan dan sejumlah long weekend turut meningkatkan permintaan jasa transportasi, baik perjalanan antarwilayah maupun transportasi dalam kota. Meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat di pusat-pusat perdagangan, pusat rekreasi, serta permintaan layanan logistik dari perdagangan daring semakin memperkuat kinerja sektor ini, terutama pada subsektor angkutan jalan dan pergudangan.

Di sisi lain, meningkatnya distribusi komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit dan produk olahannya, turut mendukung mobilitas perdagangan antara daerah sentra produksi dan lokasi pemasaran atau pelabuhan ekspor. Kondisi ini semakin menegaskan peran LU Transportasi dan Pergudangan sebagai komponen penting dalam rantai pasok sektor pertanian dan industri pengolahan di Provinsi Jambi.

Perbaikan kinerja transportasi udara tercermin pada jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang angkutan udara pada triwulan III 2025. Total penumpang kedatangan di Bandara Sultan Thaha Jambi tercatat sebesar 122.900 ribu atau tumbuh sebesar 3,27% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya serta jumlah keberangkatan penumpang sebanyak 122.658 ribu, meskipun menurun secara nilai dibandingkan triwulan sebelumnya (GRAFIK 1.18).

Namun demikian kinerja positif yang terjadi pada jasa transportasi udara belum tercermin pada kinerja bongkar muat barang yang justru kegiatan bongkar tercatat berkontraksi sebesar 27,08% (yoy) di triwulan III 2025, lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga berkontraksi sebesar 13,62% (yoy). Sedangkan kegiatan muat turut berkontraksi sebesar 18,82% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 33,31% (yoy) (GRAFIK 1.19).

Grafik 1.18. Perkembangan Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang



Sumber: PT. Angkasa Pura II (PERSERO) Sultan Thaha Jambi (diolah)

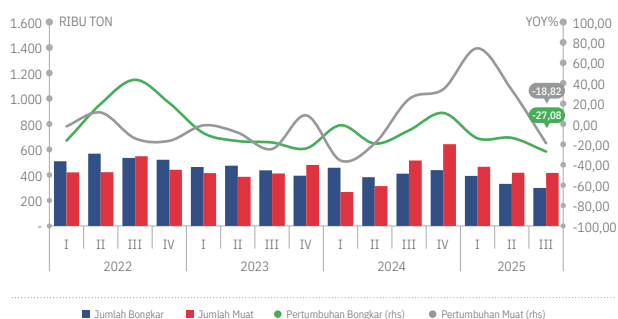
Selanjutnya, LU Jasa Keuangan dan Asuransi tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,24% (yoy) serta LU Jasa Perusahaan turut tumbuh sebesar 6,62%(yoy).

Peningkatan kinerja sektor ini terutama ditopang oleh intermediasi perbankan yang semakin kuat, tercermin dari meningkatnya penyaluran kredit, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun pembiayaan sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan UMKM. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tetap solid menjadi indikator kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang terjaga dengan baik. Selain itu, digitalisasi layanan keuangan turut memperluas akses pembiayaan dan transaksi ekonomi di berbagai wilayah, sehingga memperkuat fungsi intermediasi sektor ini sebagai penopang perekonomian daerah.

Peningkatan aktivitas pada LU utama mendorong bertambahnya kebutuhan terhadap berbagai layanan perusahaan, seperti jasa konsultasi, penyediaan tenaga kerja, jasa kebersihan, keamanan, hingga layanan pendukung usaha lainnya. Perkembangan ini menunjukkan adanya ekspansi usaha dan peningkatan kebutuhan operasional perusahaan yang bergerak dalam sektor-sektor utama tersebut. Selain itu, meningkatnya adopsi teknologi dan platform digital turut memperluas jangkauan layanan sektor jasa perusahaan.

Di sisi lain, LU Adminstrasi Pemerintahan tumbuh sebesar 2,20%(yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 8,70% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya kinerja konsumsi pemerintah yang tercatat terkontraksi pada triwulan laporan. LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tercatat tumbuh sebesar 5,03% (yoy), dampak meningkatnya aktivitas layanan pemerintahan dan pelaksanaan program-program publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Peningkatan tersebut sejalan dengan akselerasi realisasi anggaran pemerintah daerah pada paruh kedua tahun anggaran, terutama untuk belanja barang dan jasa serta pelaksanaan program pelayanan publik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Grafik 1.19. Perkembangan Jumlah Bongkar dan Muat Barang (Kargo)



Sumber: PT. Angkasa Pura II (PERSERO) Sultan Thaha Jambi (diolah)

Kemudian, momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus. Kegiatan perayaan peringatan 17 Agustus yang melibatkan pemerintah pusat maupun daerah memerlukan peningkatan intensitas penyelenggaraan pelayanan publik, koordinasi kelembagaan, serta dukungan logistik dan anggaran. Pelaksanaan berbagai acara kenegaraan, upacara, dan kegiatan masyarakat turut meningkatkan aktivitas birokrasi dan realisasi belanja pemerintah pada periode tersebut, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan LU Akmamin.

Selanjutnya, LU konstruksi tercatat terkontraksi sebesar 6,31% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,93% (yoy).

Kontraksi ini sejalan dengan masih terbatasnya pelaksanaan proyek pembangunan fisik, baik yang bersumber dari investasi swasta maupun pemerintah. Minimnya progres proyek strategis di berbagai wilayah menurunkan permintaan terhadap jasa konstruksi, sehingga aktivitas sektor ini belum menunjukkan pemulihan yang berarti dibandingkan tahun sebelumnya.

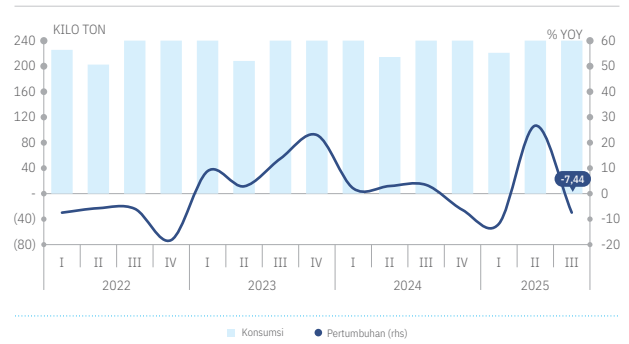
Perlambatan kinerja konstruksi juga sejalan dengan kontraksi pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang mencerminkan melemahnya investasi pada barang modal dan infrastruktur. Ketidakpastian ekonomi global serta penyesuaian kebijakan fiskal membuat sebagian besar pelaku usaha dan investor bersikap lebih berhati-hati dalam memulai ataupun melanjutkan proyek investasi baru. Kondisi tersebut turut memengaruhi rantai pasok konstruksi, di mana permintaan terhadap material bangunan, alat berat, dan tenaga kerja konstruksi mengalami penurunan.

Meskipun demikian, prospek pemulihan sektor konstruksi masih dapat didorong melalui percepatan realisasi belanja modal pemerintah serta peningkatan kemitraan pemerintah dengan sektor swasta (*public-private partnership*). Penguatan koordinasi dalam penyelesaian proyek infrastruktur prioritas, termasuk perbaikan akses logistik dan fasilitas penunjang

ekonomi produktif, diharapkan dapat mengakselerasi pemulihan sektor konstruksi pada periode berikutnya. Optimalisasi pelaksanaan program pembangunan daerah ke depan menjadi faktor penting untuk mengembalikan peran konstruksi sebagai pilar pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Namun, penurunan kinerja LU Konstruksi tercermin pada jumlah konsumsi semen di Provinsi Jambi pada periode laporan sebesar 286.503 ribu ton, atau berkontraksi sebesar 7,44% (yoy) menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 26,68% (yoy) atau sebesar 271.731 ribu ton.

Grafik 1.20. Perkembangan Konsumsi Semen



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (diolah)

FORUM EKONOMI DAN BISNIS PROVINSI JAMBI JULI 2025 “OPTIMALISASI MINERBA DAN MIGAS MENUJU DAYA SAING EKSPOR”

BOKS 1

Perekonomian Provinsi Jambi terus menghadapi dinamika perubahan yang menuntut strategi adaptif dan inovatif, khususnya pada sektor-sektor utama yang menjadi penopang pertumbuhan daerah. Untuk memperkuat koordinasi dalam perumusan arah kebijakan ekonomi ke depan, diselenggarakan Forum Ekonom dan Bisnis Provinsi Jambi yang dirangkaikan dengan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) serta Diskusi Panel Sektor Minerba dan Migas. Forum ini mengusung tema “Optimalisasi Minerba dan Migas Jambi: Tantangan Hilirisasi, Peluang Hub Energi, dan Daya Saing Ekspor” yang diselenggarakan di Hotel BW *Luxury*, Jambi pada 22 Juli 2025. Forum ini mempertemukan sejumlah pemikir dan pelaku pembangunan ekonomi diantaranya pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, perbankan.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang berkompeten dari SKK Migas Sumbagsel dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Peserta forum meliputi unsur pemerintah daerah, akademisi, perbankan, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan strategis lainnya. Tujuan utama forum adalah menyediakan ruang dialog untuk menyelaraskan strategi pembangunan sektor energi Jambi dengan agenda transformasi ekonomi nasional, khususnya melalui peningkatan nilai tambah komoditas energi.

Dalam pemaparan Kepala Perwakilan BI Provinsi Jambi, dijelaskan bahwa sektor minerba dan migas masih menjadi salah satu penopang ekspor dan PDRB Provinsi Jambi.

Namun, kontribusi ekonominya masih didominasi ekspor bahan mentah, sehingga nilai tambah yang diterima daerah belum optimal. Hilirisasi kemudian dipandang sebagai instrumen penting dalam memperbaiki struktur ekonomi, memperkuat ketahanan energi, serta meningkatkan daya saing ekspor daerah di pasar global. Upaya ini juga membuka peluang penyerapan tenaga kerja lokal serta penciptaan rantai industri yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Diskusi panel menegaskan bahwa Provinsi Jambi memiliki posisi strategis untuk berkembang sebagai hub energi Sumatera. Ketersediaan sumber daya minyak, gas, dan batubara yang masih besar menjadi modal penting untuk pengembangan kawasan industri berbasis energi. Meski demikian, sejumlah tantangan struktural perlu dijawab bersama, di antaranya keterbatasan infrastruktur pengolahan dan distribusi energi, kebutuhan investasi yang signifikan, kepastian regulasi, serta penguatan kompetensi SDM lokal agar selaras dengan kebutuhan industri masa depan.

Selain pembahasan mengenai potensi dan tantangan sektor minerba serta migas, forum ini juga menyoroti pentingnya integrasi pengembangan energi dengan kawasan industri yang telah direncanakan di Provinsi Jambi. Pembangunan kawasan industri berbasis energi, baik pada wilayah dekat pelabuhan maupun pusat produksi migas, dinilai akan menjadi katalis bagi pertumbuhan industri hilir. Keberadaan fasilitas pengolahan seperti mini



Gambar 1. Pemaparan Perekonomian Provinsi Jambi Triwulan II 2025 oleh Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jambi



Gambar 2. Diskusi Panel Bersama Dengan Narasumber dari Kementerian ESDM dan SKK Migas Sumbagsel

BOKS 1

refinery dan *smelter* akan memperpendek rantai logistik, meningkatkan efisiensi produksi, serta semakin memperkuat daya saing komoditas energi Jambi di pasar domestik dan internasional.

Forum turut memberikan perhatian pada isu transisi energi global. Meski Jambi memiliki ketergantungan yang besar pada migas dan batubara, arah kebijakan pembangunan tetap diarahkan agar selaras dengan prinsip rendah karbon dan keberlanjutan lingkungan. Pemanfaatan teknologi bersih, efisiensi energi, serta eksplorasi peluang energi baru dan terbarukan menjadi agenda yang perlu dirumuskan secara bertahap. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan sektor energi tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan sosial masyarakat.

Melalui rangkaian pembahasan tersebut, forum menyimpulkan bahwa keberhasilan optimalisasi sektor minerba dan migas Jambi sangat ditentukan oleh kolaborasi erat lintas sektor. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan kebijakan, dukungan infrastruktur, serta percepatan layanan perizinan yang berbasis digital. Dengan langkah-langkah terencana dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, Jambi diyakini mampu melakukan lompatan transformasi ekonomi dan memperkuat posisinya sebagai pusat energi yang berpengaruh di kawasan Sumatera dan di tingkat nasional.



Gambar 3. Foto Bersama Dengan Seluruh Peserta Forum
Ekonomi dan Bisnis Provinsi Jambi Juli 2025



02.

Keuangan Pemerintah Daerah



“

Pada triwulan III 2025, realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jambi tercatat mencapai Rp2,7 Triliun, atau 60,50% dari target pendapatan APBD 2025 sebesar Rp4,48 Triliun. Realisasi tersebut tercatat 25,50% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu senilai Rp3,6 Triliun atau 78% terhadap target pendapatan APBD 2024 senilai Rp4,6 Triliun.

Pada triwulan III 2025, realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jambi tercatat mencapai Rp2,7 Triliun, atau 60,50% dari target pendapatan APBD 2025 sebesar Rp4,48 Triliun. Berdasarkan komponennya, kontributor terbesar terhadap realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi hingga triwulan III 2025 berasal dari komponen Pendapatan Transfer melalui pos Transfer Pemerintah Pusat, dengan nilai realisasi sebesar Rp1,58 Triliun atau 58,55% dari total pendapatan daerah. Selain itu, komponen lain yang juga memiliki porsi besar terhadap total pendapatan daerah Provinsi Jambi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan nilai realisasi sebesar Rp1,12 Triliun atau 41,43% dari total pendapatan daerah.

Lebih lanjut, realisasi Belanja Daerah Provinsi Jambi hingga triwulan III 2025 tercatat mencapai Rp2,5 Triliun, atau 56,26% terhadap pagu anggaran belanja daerah 2025 senilai Rp4,5 Triliun. Berdasarkan komposisinya, serapan realisasi anggaran pada triwulan III 2025 didominasi oleh Belanja Operasi dengan total realisasi sebesar Rp1,72 Triliun atau 67,52% dari total belanja. Selanjutnya, Belanja Transfer memberikan kontribusi sebesar 26,5% terhadap total realisasi belanja daerah dengan nilai realisasi sebesar Rp677 Miliar. Selain itu, Belanja Modal juga memberikan kontribusi sebesar 6% terhadap total realisasi belanja daerah, dengan nilai realisasi sebesar Rp150 Miliar.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi pada triwulan III 2025 mencapai Rp1,57 Triliun, 28,27% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencatat Rp2,2 Triliun. Komponen yang memiliki peran besar dalam realisasi tersebut merupakan komponen Pajak Dalam Negeri yang berkontribusi sebesar 75,60% terhadap total realisasi, dengan nilai Rp1,1 Triliun.

Sementara itu, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi hingga triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp6,2 Triliun, 6,7% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, senilai Rp6,6 Triliun.

Selain itu, jumlah simpanan Pemerintah Daerah di perbankan Jambi pada akhir Triwulan III 2025 adalah sebesar Rp3,4 Triliun, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 22,74% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatat nilai Rp2,7 Triliun. Secara proporsi, simpanan pemerintah daerah lebih banyak ditempatkan dalam bentuk Giro (83,45%), diikuti oleh Deposito (15,95%) dan Tabungan (0,59%).

2.1 Realisasi Pendapatan Daerah

Pada triwulan III 2025, realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jambi tercatat mencapai Rp2,7 Triliun, atau 60,50% dari target pendapatan APBD 2025 sebesar Rp4,48 Triliun. Realisasi tersebut tercatat 25,50% (yoy) lebih rendah

dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu senilai Rp3,6 Triliun atau 78% terhadap target pendapatan APBD 2024 senilai Rp4,6 Triliun (TABEL 2.1).

Berdasarkan komponennya, kontributor terbesar terhadap realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi hingga triwulan III 2025 berasal dari komponen Pendapatan Transfer melalui pos Transfer Pemerintah Pusat, dengan nilai realisasi sebesar Rp1,58 Triliun atau 58,55% dari total pendapatan daerah. Realisasi tersebut mencapai 66,41% target Pendapatan Transfer pada APBD 2025 sebesar Rp2,39 Triliun. Lebih lanjut, pendapatan ini tercatat 23,5% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan transfer yang diterima pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan III 2024, nilai pendapatan transfer tercatat senilai Rp2,07 Triliun atau 85,34% terhadap target Pendapatan Transfer pada APBD tahun 2024 senilai Rp2,4 Triliun.

Memahami tingginya ketergantungan pemerintah daerah Provinsi Jambi terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah didorong untuk dapat mengidentifikasi potensi sumber pendapatan daerah, memperluas basis pajak, serta mengoptimalkan penggunaan aset sebagai sumber pendapatan.

Selain itu, komponen lain yang juga memiliki porsi besar terhadap total pendapatan daerah Provinsi Jambi hingga Triwulan III 2025 adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan nilai realisasi sebesar Rp1,12 Triliun atau 41,43% dari total pendapatan daerah. Realisasi tersebut mencapai 54,15% target PAD pada APBD 2025 sebesar Rp2 Triliun. Selanjutnya, realisasi PAD tercatat 28,16% (yoy) lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan III 2024, realisasi PAD berjumlah Rp1,56 Triliun atau 70,74% terhadap target PAD APBD 2024 senilai Rp2,2 Triliun.

Pos dengan kontribusi terbesar pada komponen PAD merupakan Pajak Daerah, dengan nilai realisasi sebesar Rp983,71 Miliar atau 87,57% terhadap total PAD. Realisasi tersebut mencapai 57,62% target penerimaan Pajak Daerah pada APBD 2025 sebesar Rp1,7 Triliun. Lebih lanjut, kinerja Pajak Daerah tercatat 28,25% (yoy) lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan III 2024, realisasi Pajak Daerah mencapai Rp1,3 triliun atau 73,95% dari target penerimaan Pajak Daerah APBD 2024 sebesar Rp1,85 Triliun. Lebih lanjut, pos yang juga memberikan kontribusi terhadap komponen PAD merupakan Retribusi Daerah senilai Rp58 Miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senilai Rp41,7 Miliar, serta Lain-Lain (Pendapatan Asli Daerah yang Sah) senilai Rp39,97 Miliar. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jambi telah menerima Pendapatan Lain-Lain yang Sah berupa Pendapatan Hibah senilai Rp472 Juta.

Tabel 2.1 Perkembangan Pendapatan APBD Provinsi Jambi

URAIAN	APBD 2025	S.D. TW II-2025		S.D. TW III-2025	
		NOMINAL (Rp. Miliar)	Persen (thd APBD 2025)	NOMINAL (Rp. Miliar)	Persen (thd APBD 2025)
PENDAPATAN	4.481,17	1.672,79	37,33	2.711,35	60,51
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.074,50	698,92	33,69	1.123,37	54,15
Pajak Daerah	1.707,18	606,80	35,54	983,71	57,62
Retribusi Daerah	206,12	17,83	8,65	57,99	28,14
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	125,36	41,70	33,26	41,70	33,26
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	35,84	32,59	90,93	39,97	111,52
PENDAPATAN TRANSFER	2.390,32	973,87	40,74	1.587,50	66,41
Transfer Pemerintah Pusat	2.390,32	973,87	40,74	1.587,50	66,41
Dana Perimbangan	-	121,63	-	121,71	-
Bagi Hasil Pajak	468,96	83,10	17,72	289,16	61,66
Bagi Hasil Pajak/bukan SDA	-	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum	1.366,50	730,82	53,48	1.116,81	81,73
Dana Alokasi Khusus	554,87	38,32	6,91	59,82	10,78
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	16,34	0,004	0,02	0,472	2,89
Pendapatan Hibah	16,34	0,004	0,02	0,47	2,89
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Unaudited, (diolah)

2.2 Realisasi Belanja Daerah

Hingga triwulan III 2025, realisasi Belanja Daerah Provinsi Jambi tercatat mencapai Rp2,5 Triliun, atau 56,26% terhadap pagu anggaran belanja daerah 2025 senilai Rp4,5 Triliun. Realisasi tersebut tercatat 14,45% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Rp2,98 Triliun atau 57,54% dari Anggaran Belanja Daerah 2024 senilai Rp5 Triliun. Rendahnya capaian tersebut dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran, di mana pemerintah memotong atau menahan belanja pada pos-pos non-prioritas seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan berbagai belanja rutin aparatur. (TABEL 2.2).

Berdasarkan jenisnya, serapan realisasi anggaran pada triwulan III 2025 didominasi oleh komponen Belanja Operasi dengan total realisasi sebesar Rp1,72 Triliun atau 67,52% dari total belanja. Realisasi tersebut mencapai 57% dari pagu Belanja Operasi pada APBD 2025 senilai Rp3 Triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi Belanja Operasi tercatat menurun 7,24% (yoy). Pada triwulan III 2024, realisasi Belanja Operasi tercatat senilai Rp1,85 Triliun atau 60,60% terhadap pagu Belanja Operasi APBD 2024 sebesar Rp3 Triliun.

Pos dengan realisasi terbesar dalam Belanja Operasi merupakan Belanja Pegawai dengan nilai realisasi sebesar Rp1,15 Triliun

atau 66,86% dari total Belanja Operasi. Realisasi tersebut mencapai 62,61% dari pagu Belanja Pegawai APBD 2025 sebesar Rp1,8 Triliun. Lebih lanjut, realisasi Belanja Pegawai tercatat meningkat 2,09% (yoy) dibandingkan triwulan III 2024, dengan realisasinya senilai Rp1,127 Triliun atau 65,87% dari pagu Belanja Pegawai APBD 2024 sebesar Rp1,7 Triliun.

Selain itu, pos Belanja Barang dan Jasa pada komponen Belanja Operasi mencatat realisasi sebesar Rp538,83 Miliar atau 31% terhadap total Belanja Operasi. Realisasi tersebut mencapai 50,62% dari pagu Belanja Barang dan Jasa APBD 2025 sebesar Rp1 Triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi Belanja Barang dan Jasa tercatat mengalami penurunan sebesar 2,48% (yoy) senilai Rp552 Miliar atau 50% terhadap pagu Belanja Barang dan Jasa APBD 2024 senilai Rp1,1 Triliun.

Selanjutnya, komponen Belanja Transfer memberikan kontribusi sebesar 26,5% terhadap total realisasi belanja daerah dengan nilai realisasi sebesar Rp677 Miliar. Realisasi tersebut mencapai 74% pagu Belanja Transfer pada APBD 2025 sebesar Rp915 Miliar. Komponen Belanja Transfer tercatat mengalami penurunan sebesar 3,9% (yoy) dibandingkan triwulan III 2024, dengan realisasi senilai Rp540 Miliar atau 51% terhadap pagu Belanja Transfer APBD 2024 sebesar Rp1,050 Triliun.

Tabel 2. 2 Perkembangan Belanja APBD Provinsi Jambi

URAIAN	APBD 2025	S.D. TW II-2025		S.D. TW III-2025	
		NOMINAL (Rp. Miliar)	Persen (thd APBD 2025)	NOMINAL (Rp. Miliar)	Persen (thd APBD 2025)
BELANJA	4.531,02	1.456,46	32,14	2.549,23	56,26
BELANJA OPERASI	3.009,65	1.092,17	36,29	1.721,12	57,19
Belanja Pegawai	1.838,17	779,11	42,38	1.150,83	62,61
Belanja Barang dan Jasa	1.064,56	304,85	28,64	538,83	50,62
Belanja Subsidi	2,19	1,11	50,58	1,64	74,78
Belanja Hibah	103,78	7,11	6,85	29,83	28,74
Belanja Bantuan Sosial	0,95	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan					
BELANJA MODAL	412,90	30,52	7,39	150,67	36,49
Belanja Tanah	-	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	190,60	16,61	8,71	92,48	48,52
Belanja Bangunan dan Gedung	118,27	2,29	1,94	29,36	24,83
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	81,08	11,60	14,31	28,64	35,33
Belanja Aset Tetap Lainnya	22,57	-	-	0,10	0,44
Belanja Aset Lainnya	0,38	0,02	4,79	0,08	21,48
BELANJA TAK TERDUGA	192,92	-	-	-	-
Belanja Tak Terduga	192,92	-	-	-	-
BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	-	-	-	-	-
BELANJA TRANSFER	915,56	333,76	36,45	677,44	73,99
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Pajak	729,20	288,97	39,63	512,01	70,22
Belanja Bantuan Keuangan	186,35	44,79	24,04	165,43	88,77

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Unaudited, (diolah)

Sebesar 75,5% dari realisasi Belanja Transfer berasal dari pos Bagi Hasil Pajak, dengan nilai realisasi Rp512 Miliar. Realisasi tersebut mencapai 70% dari pagu Bagi Hasil Pajak APBD 2025 sebesar Rp729 Miliar. Lebih lanjut, realisasi Bagi Hasil Pajak tercatat 2,8% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan III 2024 dengan nilai realisasi Rp498 Miliar atau 56% dari pagu Bagi Hasil Pajak APBD 2024 sebesar Rp882 Miliar.

Selain itu, komponen Belanja Modal memberikan kontribusi sebesar 6% terhadap total realisasi belanja daerah, dengan nilai realisasi sebesar Rp150 Miliar. Realisasi tersebut mencapai 36,5% dari pagu Belanja Modal APBD 2025 sebesar Rp412 Miliar. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi Belanja Modal tercatat menurun cukup dalam senilai 74,20% (yoy), dengan nilai Rp584 Miliar atau 55% terhadap pagu Belanja Modal APBD 2024 sebesar Rp1,055 Triliun.

2.3 Keuangan Pemerintah Pusat di Daerah

Realisasi Pendapatan Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi pada triwulan III 2025 mencapai Rp1,57 Triliun, 28,27% (yoy) lebih

rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencatat Rp2,2 Triliun (TABEL 2.3).

Kontraksi pada Pendapatan Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi didorong oleh realisasi pendapatan pada komponen Pajak Dalam Negeri senilai Rp1,2 Triliun, 36,68% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencatat Rp1,8 Triliun.

Pos dengan kontribusi terbesar pada komponen Pajak Dalam Negeri merupakan pos Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan andil 47,12% senilai Rp.562 Miliar, 48,25% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencatat Rp1,08 Triliun. Lebih lanjut, pos yang juga memiliki kontribusi besar terhadap komponen Pajak Dalam Negeri merupakan Pajak Penghasilan (PPH) dengan andil 31,66% senilai Rp377 Miliar, 43,57% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencatat Rp669 Miliar.

Tabel 2.3. Perkembangan Realisasi Pendapatan Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi

Realisasi Pendapatan	2024 Rp Juta			2025 Rp Juta		
	II	III	IV	I	II	III
I Pajak Dalam Negeri	1.811.568	1.884.186	2.450.288	542.625	1.519.860	1.192.986
PPH	763.075	669.311	738.373	340.631	624.824	377.683
PPN	964.939	1.086.085	1.648.928	91.117	614.310	562.083
PBB	66.395	110.442	44.791	461	6.329	33.426
Pendapatan BPHTB	-	-	-	-	-	-
Cukai	128	-	-	32	107	824
Lainnya	17.031	18.348	18.196	110.384	274.289	218.971
Pengembalian Pendapatan Pajak Dan Cukai	-	-	-	-	-	-
II Pajak Perdagangan Internasional	30.559	28.098	114.177	109.137	88.587	68.878
Pendapatan Bea Masuk	2.348	4.137	3.134	1.468	4.486	2.171
Pendapatan Bea Keluar/Pungutan Ekspor	28.211	23.962	111.043	107.669	84.101	66.707
Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor	-	-	-	-	-	-
III Penerimaan SDA	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Pertambangan Umum	-	-	-	-	-	-
Pendapatan kehutanan	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Perikanan	-	-	-	-	-	-
IV PNBP Lainnya	160.893	287.787	367.612	173.094	93.889	221.013
V Pendapatan Hibah	-	-	64.327	-	-	-
VI Pendapatan Bagian Laba BUMN	-	-	-	-	-	-
VII Pendapatan Badan Layanan UMUM	-	-	-	86.088	82.376	95.177
VIII Pendapatan Penyesuaian	-	-	-	-	-	-
TOTAL REALISASI PENDAPATAN	2.003.019	2.200.071	2.932.077	910.943	1.784.712	1.578.054

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil V Jambi, Laporan Realisasi Pendapatan Wilayah Jambi. Unaudited, (diolah)

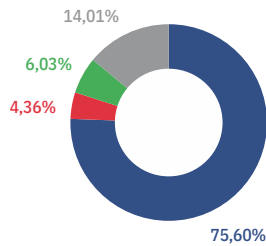
Realisasi penerimaan Pajak Dalam Negeri ditopang oleh pertumbuhan aktivitas 6 (enam) sektor dominan, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial; Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; serta Aktivitas Keuangan dan Asuransi. Pertumbuhan aktivitas industri unggulan kemudian meningkatkan pembayaran PPN Dalam Negeri.

Komponen PNBP Lainnya juga mendorong penurunan realisasi pendapatan Pemerintah Pusat, dengan nilai realisasi Rp221 Miliar, 23,20% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencatat Rp93,8 Miliar. Kontraksi yang lebih dalam terhadap Pendapatan Pemerintah Pusat tertahan oleh pertumbuhan pada komponen Pajak Perdagangan Internasional senilai Rp68,8 Miliar, meningkat sebesar 145% (yoy) dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang mencatat Rp28 Miliar. Pos dengan kontribusi terbesar pada komponen Pajak Perdagangan Internasional merupakan Pendapatan Bea Keluar / Pungutan Ekspor dengan andil 96,85% yang mencatat Rp66 Miliar, tumbuh 178% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencatat Rp23 Miliar. Selain

itu, tercatat pendapatan Badan Layanan Umum senilai Rp95 Miliar, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencatat tidak adanya penerimaan.

Lebih lanjut, tidak tercatat adanya penerimaan Pemerintah Pusat melalui komponen Penerimaan SDA, Pendapatan Hibah, Pendapatan Bagian Laba BUMN, serta Pendapatan Penyesuaian pada triwulan III 2025. Secara garis besar, realisasi pendapatan pemerintah pusat diperoleh melalui Pajak Dalam Negeri (75,60%), diikuti oleh PNBP Lainnya (14%), Pajak Perdagangan Internasional (4,36%), serta Badan Layanan Umum (6%) (GRAFIK 2.1).

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi hingga triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp6,2 Triliun, 6,7% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, senilai Rp6,6 Triliun (TABEL 2.4). Penurunan realisasi belanja pemerintah pusat didorong oleh komponen Belanja Barang dengan nilai realisasi Rp584 Miliar, 13% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan belanja pemerintah pusat pada periode yang sama tahun sebelumnya dengan nilai Rp668 Miliar.

Grafik 2.1. Pangsa Realisasi Pendapatan Triwulan III 2025 Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi

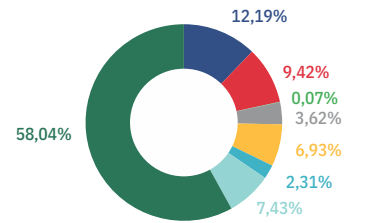
■ Pajak Dalam Negeri ■ Pajak Perdagangan INT. ■ Pendapatan BLU ■ PNPB Lainnya

Sumber: Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI Kanwil Provinsi Jambi (diolah)

Selain itu, Belanja Modal juga terpantau mendorong adanya penurunan realisasi belanja pemerintah pusat. Pada triwulan laporan, tercatat realisasi senilai Rp224 Miliar, atau 81,9% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencatat Rp1,24 Triliun.

Berikutnya, belanja DAK Fisik juga terpantau sebagai salah satu faktor pendorong penurunan realisasi belanja pemerintah pusat dengan nilai realisasi Rp143 Miliar. Nilai realisasi tersebut 68,5% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatat realisasi Rp9 Miliar. Selain itu, komponen Belanja Bantuan Sosial juga terpantau sebagai penahan penurunan realisasi belanja dengan realisasi Rp4,2 Miliar. Realisasi tersebut 13,1% lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya dengan realisasi Rp4,3 Miliar.

Adapun beberapa komponen yang menjadi penahan dari penurunan realisasi belanja Pemerintah Pusat yaitu komponen Belanja lain-lain dengan realisasi senilai Rp3,6 Triliun, 28% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya dengan realisasi senilai Rp2,8 Triliun. Realisasi

Grafik 2.2. Pangsa Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Triwulan III 2025 di Provinsi Jambi

■ Belanja Pegawai ■ Belanja Bantuan Sosial ■ Dana Desa ■ DAK Non Fisik ■ Belanja Barang ■ Belanja Modal ■ DAK Fisik ■ Belanja Lainnya

Sumber: Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI Kanwil Provinsi Jambi (diolah)

tersebut mencakup belanja Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Fiskal, serta Dana Hibah.

Selanjutnya, komponen Belanja Pegawai mencatat realisasi senilai Rp756 Miliar, meningkat sebesar 13% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencatat Rp668 Miliar. Selain itu, belanja DAK Non-Fisik juga mendorong peningkatan realisasi belanja. Tercatat realisasi senilai Rp461 Miliar, 11% (yoy) lebih tinggi dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatat nilai Rp413 Miliar.

Lebih lanjut, belanja Dana Desa juga mendorong peningkatan realisasi belanja. Tercatat realisasi senilai Rp430 Miliar. Realisasi tersebut tercatat 12,38% (yoy) lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp382 Miliar. Berdasarkan pangsa, realisasi belanja pemerintah pusat sebagian besar digunakan untuk Belanja Lain Lain (58,04%), Belanja Pegawai (12,19%), Belanja Barang (9,42%), Belanja DAK Non-Fisik (7,43%), Belanja Dana Desa (6,93%), Belanja Modal (3,62%), Belanja DAK Fisik (2,31%), serta Belanja Bantuan Sosial (0,07%) (GRAFIK 2.2).

Tabel 2.4. Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi

Realisasi Belanja	2024 (Rp Juta)			2025 (Rp Juta)		
	II	III	IV	I	II	III
I Belanja Pegawai	862.898	668.543	804.947	804.947	850.414	756.732
II Belanja Barang	612.991	672.837	672.837	276.095	444.151	584.607
III Belanja Denda dan Subsidi Perusahaan	-	-	-	-	-	-
III Belanja Bantuan Sosial	1.978	4.331	4.331	10.738	4.626	4.257
IV Belanja Lain-lain	2.787.402	2.814.636	3.014.384	-	3.187.329	3.603.286
V Belanja Modal	902.840	1.241.420	1.241.420	3.989	73.263	224.648
VI Dana Desa	421.863	382.785	382.785	441.346	217.114	430.162
VII DAK Fisik	58.504	456.418	456.418	-	9.012	143.712
VIII DAK Non Fisik	574.570	413.419	413.419	527.873	510.955	461.009
TOTAL REALISASI BELANJA	6.223.045	6.654.389	6.990.541	4.217.335	5.296.865	6.208.413

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil V Jambi, Laporan Realisasi Pendapatan Wilayah Jambi. Unaudited, (diolah)

2.4 Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah simpanan Pemerintah Daerah di perbankan Jambi pada akhir Triwulan III 2025 adalah sebesar Rp3,4 Triliun, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 22,74% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatat nilai Rp2,7 Triliun (GRAFIK 2.3). Lebih lanjut, tren peningkatan total simpanan Pemerintah Daerah telah berlangsung sejak triwulan I 2025.

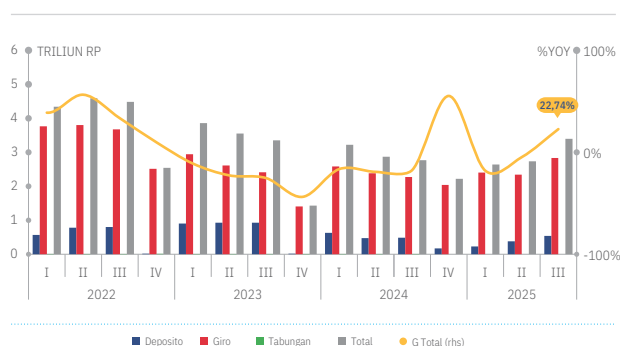
Peningkatan pada triwulan III 2025 didorong oleh simpanan Pemerintah Daerah pada baik rekening Giro, Tabungan, Maupun Deposito.

Simpanan pada rekening Giro tercatat meningkat sebesar 24,77% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya dengan nominal Rp2,83 Triliun.

Selain itu, rekening Deposito juga tercatat meningkat sebesar 11,44% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya dengan nominal Rp.540 Miliar.

Lebih lanjut, peningkatan juga didorong oleh simpanan pada rekening Tabungan yang meningkat sebesar 115,15% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya dengan nominal Rp20 Miliar. Secara proporsi, simpanan pemerintah daerah lebih banyak ditempatkan dalam bentuk Giro (83,45%), diikuti oleh Deposito (15,95%) dan Tabungan (0,59%).

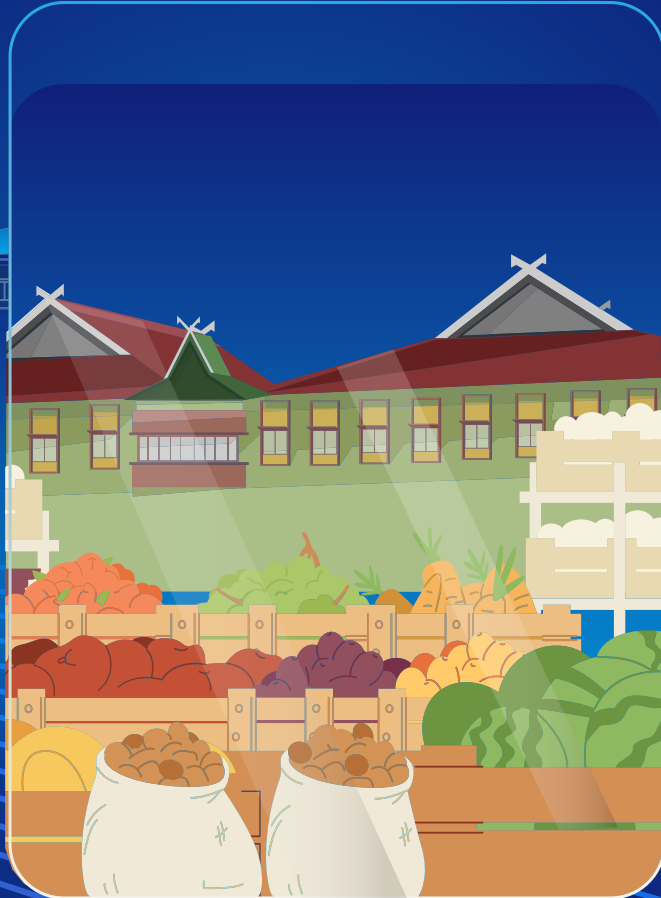
Grafik 2.3. Perkembangan Simpanan Pemerintah Provinsi Jambi di Perbankan



Sumber: LBU Bank Indonesia

03.

Perkembangan Inflasi Daerah



“

Pada Triwulan III 2025, IHK Provinsi Jambi tercatat mengalami inflasi sebesar 3,77% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,34% (yoy). Inflasi tersebut terutama disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau; perawatan pribadi dan jasa lainnya; penyediaan makanan dan minuman/restoran; transportasi; pendidikan; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; rekreasi, olahraga, dan budaya; dan pakaian dan alas kaki.

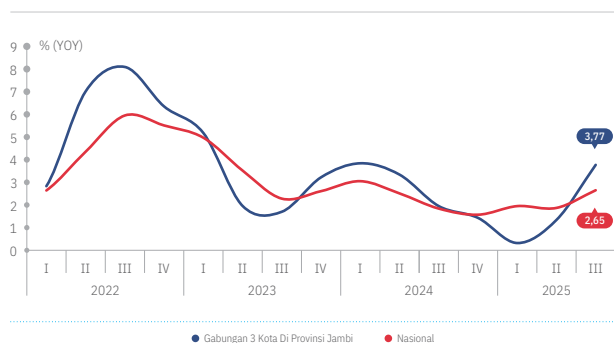
3.1 Kajian Umum

Pada Triwulan III 2025, inflasi *year-on-year* Provinsi Jambi tercatat sebesar 3,77% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,34% (yoy). Realisasi inflasi tersebut juga tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat 2,65% (yoy) (GRAFIK 3.1). Laju inflasi Provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi di Kota Jambi, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Kerinci yang masing-masing tercatat sebesar 3,06% (yoy), 4,47% (yoy) dan 5,90% (yoy)², angka realisasi Triwulan III 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada triwulan sebelumnya yang tercatat masing-masing sebesar 0,94% (yoy), 2,03% (yoy), dan 2,37% (yoy) untuk Kota Jambi, Kabupaten Bungo, dan Kab. Kerinci.

Secara triwulanan, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Jambi pada Triwulan III 2025 mengalami inflasi sebesar 1,38% (qtd), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,25% (qtd). Selanjutnya, secara kumulatif, pergerakan IHK Provinsi Jambi sampai triwulan III 2025, tercatat mengalami inflasi sebesar 3,05% (ytd), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,65% (ytd). Kenaikan inflasi tersebut didorong oleh kenaikan harga pada komoditas VF seiring dengan keterbatasan pada pasokan cabai merah di wilayah Sumatera secara umum dan kenaikan tarif pendidikan sejalan dengan masuknya tahun ajaran baru di Provinsi Jambi.

Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan (yoy) Provinsi Jambi pada Triwulan III 2025 utamanya disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran, kelompok transportasi, kelompok pendidikan, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, dan kelompok pakaian dan alas kaki. Selanjutnya, perkembangan inflasi Provinsi Jambi pada periode rilis bulan September 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya pada bulan yang sama.

Grafik 3.1. Perkembangan Inflasi Provinsi Jambi



Sumber: BPS Provinsi Jambi (dolah)

Secara tahunan, pada bulan September 2025, Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 3,06% (yoy) terutama disumbangkan oleh peningkatan IHK pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Peningkatan pada kelompok tersebut diakibatkan oleh kenaikan yang terjadi pada komoditas daging ayam ras dan cabai merah yang disebabkan oleh pasokan yang terbatas dan harga produksi yang meningkat. Bahkan sebagian hasil panen cabai merah terindikasi mengalir ke luar provinsi karena harga yang lebih tinggi. Namun demikian, inflasi yang lebih tinggi di Kota Jambi tertahan oleh adanya deflasi yang terjadi pada kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang disebabkan oleh penurunan harga pada beberapa komoditas secara umum.

Sejalan dengan Kota Jambi, pada bulan September 2025, Kabupaten Bungo tercatat mengalami inflasi sebesar 4,47% (yoy). Inflasi tersebut tercatat disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dan utamanya mengalami kenaikan akibat inflasi pada cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras. Adapun inflasi Kabupaten Bungo yang lebih tinggi dapat tertahan oleh adanya deflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki.

Lebih lanjut, pada bulan September 2025, Kabupaten Kerinci juga mengalami inflasi tahunan sebesar 5,90% (yoy). Inflasi tersebut juga disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok tersebut memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan yang terjadi di Kabupaten Kerinci sejalan dengan peningkatan harga cabai merah, beras, daging ayam ras, dan bawang merah pada Triwulan III tahun 2025. Lebih lanjut, inflasi Kabupaten Kerinci yang lebih tinggi juga tertahan oleh penurunan IHK pada kelompok transportasi dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada bulan Juli dan Agustus, Provinsi Jambi secara bulanan mencatatkan inflasi sebesar 0,52% dan 0,05% (mtm) secara berurutan. Serta secara tahunan realisasi inflasi di Provinsi Jambi tercatat sebesar 2,71% dan 2,76% (yoy) pada bulan Juli dan Agustus secara berurutan. Realisasi tersebut menyebabkan inflasi *year-to-date* (ytd) Provinsi Jambi hingga bulan September 2025 yaitu 3,07% (ytd). Ke depan, pada Triwulan IV 2025, inflasi Provinsi Jambi diperkirakan akan lebih rendah apabila dibandingkan Triwulan III 2025. Hal tersebut diperkirakan akan terjadi didorong oleh harga komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras yang berpotensi mengalami penurunan yang disebabkan oleh normalisasi harga pakan jagung ternak sejalan dengan pasokan yang lebih stabil dengan masuknya SPHP Jagung Bulog. Penyesuaian harga pupuk subsidi sebesar 20% mulai tanggal 22 Oktober, juga berpotensi menyebabkan penurunan harga komoditas hortikultura utama di Provinsi Jambi. Lebih lanjut, pemerintah juga berpotensi untuk kembali

2. Sejak Januari 2024 terdapat penambahan cakupan kota inflasi di Provinsi Jambi dari sebelumnya hanya Kota Jambi dan Muara Bungo menjadi Kota Jambi, Muara Bungo, dan Kerinci; Secara nasional, dengan TD 2022 terdapat penambahan kota sampel inflasi dari 90 kota menjadi 150 kota.

memberikan kebijakan diskon untuk seluruh tiket penerbangan sama seperti yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Berbagai upaya stabilisasi harga dan pasokan juga akan terus dilakukan oleh TPID Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota melalui penguatan sinergi dengan instansi terkait. Mempertimbangkan hal tersebut, inflasi Triwulan IV 2025 diperkirakan akan lebih rendah namun tetap berada di antara rentang sasaran inflasi nasional 2,5%+1% (yoy), sejalan dengan upaya TPID untuk mengendalikan inflasi sesuai dengan koridor 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat respon koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat dan daerah serta mitra strategis lainnya melalui penguatan efektivitas pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menyelenggarakan berbagai kegiatan Pencanangan GNPIP Provinsi Jambi sejak tahun 2022. Penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen dan sinergi KPwBI Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah dalam menjaga terkendalinya inflasi di Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jambi, Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi, FORKOPIMDA Provinsi Jambi, Kepala Instansi Vertikal, serta OPD terkait.

Selanjutnya, sebagai upaya pengendalian inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi telah melakukan berbagai upaya pengendalian harga selama tahun 2025 melalui kerangka 4K di antaranya:

1. Pelaksanaan *High Level Meeting* (HLM) sebanyak 6 kali dan Rakor TPID sebanyak 8 kali;
2. Penyaluran beras SPHP, Operasi Pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Pasar Murah sebanyak 143 kali di berbagai titik pada 11 kota/kab di Provinsi Jambi;
3. 3 kali pelaksanaan *Capacity Building* dengan pemenang TPID pada tahun sebelumnya oleh TPID se-Provinsi Jambi.

Lebih Lanjut, untuk mengantisipasi inflasi pada musim HBKN Nataru pada Triwulan IV 2025, TPID Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota akan tetap melakukan upaya stabilisasi harga melalui berbagai upaya intervensi seperti sidak pasar dan operasi pasar secara rutin untuk memantau keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, penguatan sinergi TPID se-Provinsi Jambi dengan instansi terkait, melanjutkan program subsidi angkut, dan pelaksanaan HLM serta Rakor TPID di seluruh Provinsi Jambi.

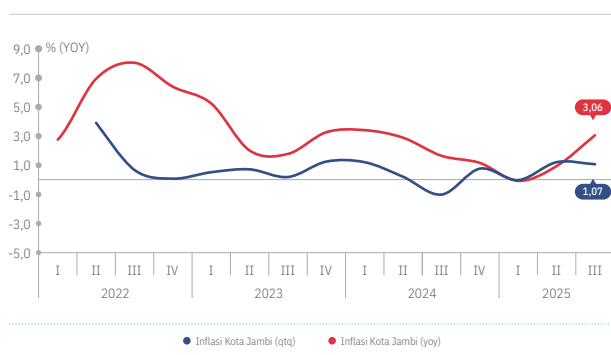
3.2 Inflasi Kota Jambi Berdasarkan Kelompok Barang

Kota Jambi pada Triwulan III 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 3,06% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,94% (yoy) (GRAFIK 3.2). Meningkatnya laju inflasi Kota Jambi pada Triwulan III 2025 utamanya didorong oleh peningkatan tingkat inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sehubungan dengan kenaikan harga dari komoditas daging ayam ras, cabai merah, bawang merah, ikan dencis, petai, dan beras. Kota Jambi berada pada peringkat 54 dari 150 Kab/Kota IHK di Indonesia, dan peringkat 29 dari total 41 Kab/Kota IHK di wilayah Sumatera.

Tabel 3.1. Perkembangan Inflasi Kota Jambi (Tahun Dasar 2022)

Kelompok	(qtq %) II-25		(yoy %) II-25		(qtq %) III-25		(yoy %) III-25	
	Inflasi	Smbgn	Inflasi	Smbgn	Inflasi	Smbgn	Inflasi	Smbgn
Makanan, Minuman dan Tembakau	-1,62	-0,46	-0,65	-0,18	3,58	1,04	7,64	2,21
Pakaian dan Alas Kaki	0,05	0,00	1,28	0,07	-0,06	0,00	0,88	0,05
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	8,33	1,22	1,07	0,16	0,03	0,00	0,44	0,06
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin RT	-0,35	-0,02	-0,21	-0,01	-0,71	-0,04	-1,06	-0,05
Kesehatan	0,52	0,02	-1,39	-0,04	-0,20	-0,01	-1,55	-0,05
Transportasi	1,69	0,22	1,67	0,22	-0,18	-0,02	1,37	0,18
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,11	-0,01	-1,23	-0,06	-0,11	-0,01	-0,77	-0,04
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,56	0,01	1,27	0,02	0,25	0,00	1,03	0,02
Pendidikan	0,00	0,00	0,74	0,04	2,06	0,11	2,18	0,12
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	1,64	0,16	3,66	0,36	0,07	0,01	3,18	0,31
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	2,15	0,16	5,53	0,41	0,05	0,00	4,79	0,35
INFLASI	1,21	1,21	0,94	0,94	1,07	1,07	3,06	3,06

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Tahunan Jambi (yoy)

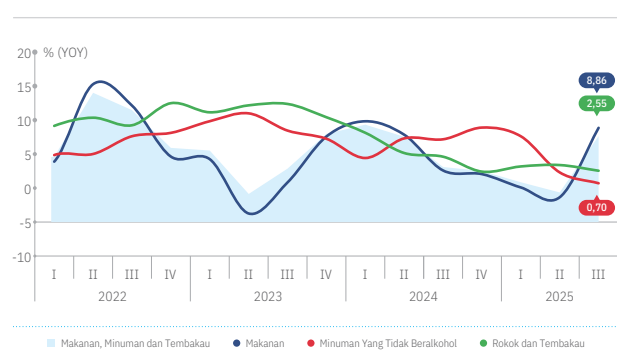
Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

3.2.1 Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Pada Triwulan III 2025, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 7,64% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 0,65% (yoy). Kelompok ini tercatat menjadi penyumbang inflasi terbesar di Kota Jambi pada Triwulan III 2025 dengan sumbangan terhadap inflasi sebesar 2,21% (yoy).

Berdasarkan sub kelompoknya, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada Triwulan III 2025 terutama disumbangkan oleh sub kelompok makanan sebesar 8,86% (yoy) dengan sumbangan terhadap inflasi sebesar -2,14%. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya yaitu terdeflasi sebesar 1,35% (yoy) dengan sumbangan sebesar -0,32%. Inflasi pada sub kelompok makanan tersebut didorong oleh adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti cabai merah, daging ayam ras, bawang merah, ikan dencis, petai, beras, ikan gabus, dan tomat yang didorong oleh penurunan jumlah pasokan akibat belum masuknya musim panen di Provinsi Jambi serta kenaikan harga produksi yang mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, sub rokok dan tembakau juga terpantau mengalami inflasi pada Triwulan III 2025 sebesar 2,55% (yoy) dengan sumbangan sebesar 0,07% (yoy), lebih rendah dibandingkan

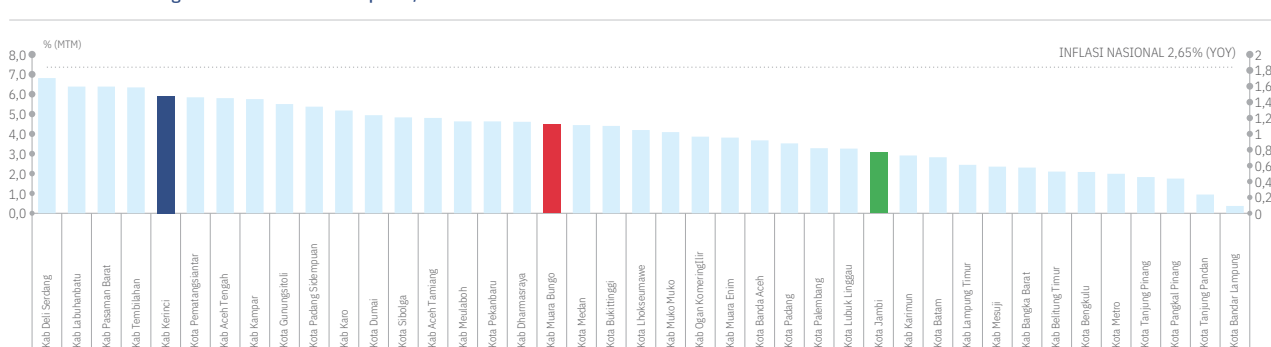
Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Kota Jambi

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

triwulan sebelumnya yang tercatat mengalami inflasi sebesar 3,38% (yoy) dengan andil 0,10%. Selanjutnya, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga disumbangkan oleh inflasi pada sub kelompok minuman yang tidak beralkohol sebesar 0,70% (yoy) dengan andil 0,01% atau tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan inflasi pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,30% (yoy) dengan andil sebesar 0,04%.

Secara keseluruhan, berdasarkan komoditasnya, inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama disumbangkan oleh komoditas cabai merah (andil 0,69% yoy), daging ayam ras (andil 0,68% yoy), bawang merah (andil 0,57% yoy), ikan dencis (andil 0,16% yoy), petai (andil 0,15% yoy), beras (andil 0,10% yoy), ikan gabus (andil 0,07% yoy), tomat (andil 0,07% yoy), kangkung (andil 0,06% yoy), dan minyak goreng (andil 0,06% yoy).

Cabai merah merupakan komoditas yang memiliki bobot sumbangan tertinggi pada perhitungan inflasi di Triwulan III 2025. Berdasarkan rilis BPS, harga komoditas cabai merah, tercatat meningkat sebesar 58,89% (yoy) dengan andil sebesar 0,69%. Hal serupa juga ditunjukkan pada hasil survei Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang menunjukkan bahwa rerata harga cabai merah pada September 2025

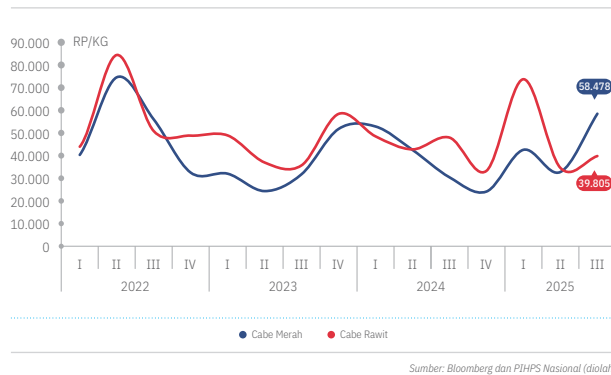
Grafik 3.4. Perbandingan Inflasi Tahunan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Grafik 3.5 Perkembangan Harga Beras Kota Jambi



Grafik 3.7 Perkembangan Harga Aneka Cabai Kota Jambi

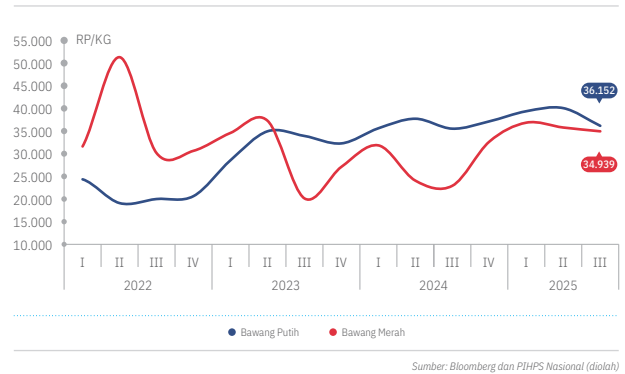


mengalami peningkatan sebesar 92,28% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan harga cabai merah teokrsebut utamanya didorong oleh pasokan yang terbatas dari dalam maupun luar daerah. Produksi lokal tercatat belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi Provinsi Jambi, bahkan sebagian hasil panen terindikasi mengalir ke luar provinsi karena harga lebih tinggi. Kondisi tersebut ditambah dengan tertundanya panen raya di daerah produsen seperti di daerah Jawa, menyebabkan pasokan yang berada di Sumatera cenderung terbatas (GRAFIK 3.7).

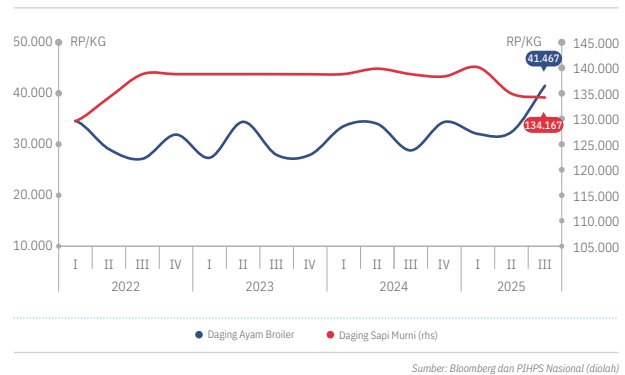
Selain itu, peningkatan harga juga terjadi untuk komoditas daging ayam ras di Kota Jambi pada Triwulan III 2025. Berdasarkan data BPS, harga daging ayam ras, tercatat meningkat sebesar 30,02% (yoy) dengan andil sebesar -0,68%. Hal tersebut juga terkonfirmasi oleh pencatatan PIHPS yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang mencatat bahwa komoditas daging ayam ras mengalami kenaikan sebesar 43,99% (yoy). Kenaikan komoditas tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan biaya produksi di tingkat peternak. Salah satu faktor utama adalah kenaikan harga DOC (*Day Old Chick*) dan kenaikan harga pakan ternak juga meningkat karena keterbatasan pasokan jagung pipilan kering, yang merupakan bahan baku utama (GRAFIK 3.8).

Selanjutnya, peningkatan harga juga tercatat terjadi untuk komoditas bawang merah pada Triwulan III 2025. Dari hasil rilis

Grafik 3.6 Perkembangan Harga Bawang Putih dan Merah



Grafik 3.8 Perkembangan Harga Aneka Daging Kota Jambi



BPS, harga komoditas bawang merah tercatat mengalami kenaikan sebesar 81,03% (yoy) dengan andil sebesar 0,57%. Adapun kenaikan harga bawang merah tersebut disebabkan oleh normalisasi harga setelah pada tahun sebelumnya bawang merah di Provinsi Jambi memiliki pasokan berlimpah (GRAFIK 3.6).

Lebih lanjut, komoditas beras tercatat mengalami kenaikan harga sebesar 2,70% (yoy) dengan andil sebesar 0,10%, disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk meningkatkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras sesuai keputusan Kepala Bapanas Nomor 299 Tahun 2025 (GRAFIK 3.5).

Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi di Kota Jambi tertahan oleh adanya penurunan harga beberapa komoditas seperti tempe (-24,37% yoy), kentang (-7,94% yoy), jeruk (-7,64% yoy), bawang putih (-7,94% yoy), dan kacang panjang (-26,06% yoy) dengan sumbangan masing-masing sebesar -0,06%; -0,05%; -0,03%; -0,02%; -0,02%.

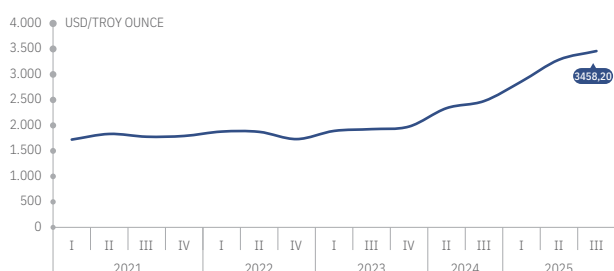
3.2.2 Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Pada Triwulan III 2025, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya tercatat mengalami inflasi sebesar 4,79% (yoy) dengan andil 0,35% atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,53% (yoy) dengan andil sebesar 0,41%. Inflasi kelompok tersebut utamanya disumbang oleh sub kelompok perawatan pribadi lainnya yang terpantau mengalami

inflasi sebesar 14,76% (yoy) dengan andil sebesar 0,29%, peningkatan harga sub kelompok tersebut didorong oleh kenaikan harga pada komoditas emas perhiasan sebesar 34,28% (yoy), dengan andil 0,37%. Peningkatan harga emas perhiasan didorong oleh masih berlanjutnya penguatan harga emas global di Triwulan III 2025. Sejalan dengan hal tersebut, data *Bloomberg* menunjukkan bahwa rerata harga emas perhiasan 24 karat pada bulan September 2025 sebesar \$3.458,20/troy ons, lebih tinggi dibandingkan dengan harga pada tahun sebelumnya yang sebesar \$2.476,76/troy ons. Adapun peningkatan harga emas dunia diindikasikan terjadi seiring dengan meningkatnya permintaan akan komoditas selaku *safe-haven assets* seiring peningkatan tensi geopolitik global (GRAFIK 3.09).

Lebih lanjut, sub kelompok perawatan pribadi juga terpantau mengalami inflasi sebesar 1,32% (yoy) dengan andil sebesar 0,07%, yang didorong oleh kenaikan harga pada komoditas *shampo* (3,81%, yoy), *tissue* (2,41%, yoy), pembersih/penyegar (7,69%, yoy), sabun mandi (2,11%, yoy), *deodorant* (3,20%, yoy), dan *creambath* (6,06%, yoy).

Grafik 3.9. Perkembangan Harga Emas Internasional



Sumber: Bloomberg (diolah)

3.2.3 Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran pada Triwulan III 2025 mengalami inflasi sebesar 3,18% (yoy) dengan andil sebesar 0,31%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat naik sebesar 3,66% (yoy) dengan andil sebesar 0,36%. Inflasi pada kelompok ini didorong oleh kenaikan harga pada komoditas kue kering berminyak, ayam goreng, sate, mie, dan rendang dengan kenaikan harga masing-masing sebesar 26,49% (yoy), 8,75% (yoy), 6,25% (yoy), 2,06% (yoy), dan 13,18% (yoy). Inflasi pada komoditas tersebut sejalan dengan inflasi pada bahan utama dan pendukungnya seperti tepung, minyak goreng, dan aneka olahan daging.

3.2.4 Kelompok Transportasi

Selanjutnya, kelompok transportasi tercatat mengalami inflasi sebesar 1,37% (yoy) dengan andil 0,18%. Inflasi tersebut tercatat menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat mengalami inflasi sebesar 1,67% (yoy) dengan andil sebesar 0,22%. Inflasi pada kelompok ini utamanya disumbang oleh inflasi pada sub kelompok pembelian kendaraan sebesar 2,13% (yoy) dengan andil sebesar 0,08%. Lebih lanjut, sub kelompok jasa angkutan penumpang dan pengoperasian peralatan transportasi pribadi juga tercatat mengalami kenaikan harga sebesar 3,70% (yoy) dengan andil 0,06% serta 0,56% (yoy) dengan andil 0,04% secara berurutan. Kenaikan harga pada kelompok transportasi terpantau terjadi akibat kenaikan harga angkutan udara sebesar 6,17% (yoy) dengan andil 0,06% seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat pada musim libur sekolah 2025. Selain itu, kenaikan juga tercatat terjadi pada komoditas pemeliharaan/service sebesar 5,52% (yoy) dengan andil 0,06% seiring dengan kenaikan pada *sparepart* reparasi kendaraan bermotor. Kenaikan komponen *sparepart* juga berpengaruh terhadap kenaikan harga komoditas mobil dan sepeda motor di Provinsi Jambi yang tercatat naik sebesar 1,60% dan 2,97% (yoy) dengan andil 0,04 dan 0,05 secara berurutan.

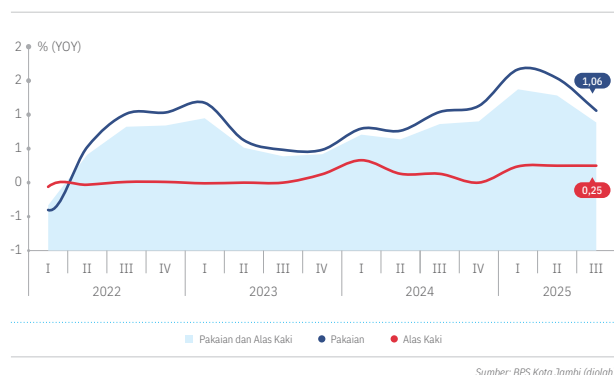
3.2.5 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah

Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga pada Triwulan III 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,44% (yoy) dengan sumbangan terhadap inflasi sebesar 0,06%. Tingkat harga pada kelompok ini terpantau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 1,07% (yoy) dengan andil sebesar 0,16%. Inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga terutama didorong oleh inflasi pada sub kelompok sewa dan kontrak rumah yang tercatat sebesar 0,60% (yoy) dengan andil sebesar 0,03%. Kenaikan pada sub kelompok tersebut disebabkan oleh peningkatan harga sewa dan kontrak rumah akibat peningkatan rutin tahunan oleh pemilik properti. Lebih lanjut, sub kelompok lainnya yaitu pemeliharaan, perbaikan, dan keamanan tempat tinggal/perumahan, juga tercatat mengalami inflasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 1,46% (yoy) dengan andil 0,02%, yang disebabkan oleh kenaikan harga biaya pemeliharaan seiring dengan kenaikan pada bahan baku bangunan seperti papan dan batu bata. Sementara itu, sub kelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga pada Triwulan III 2025 juga terpantau mengalami inflasi apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang didorong oleh kenaikan bahan bakar rumah tangga.

3.2.6 Kelompok Pakaian dan Alas Kaki

Kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar **0,88% (yoy)** dengan sumbangan **0,05%** terhadap inflasi umum di Kota Jambi. Realisasi inflasi tersebut terpantau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 1,28% (yoy) dengan sumbangan sebesar 0,07%. Inflasi pada kelompok ini terutama didorong oleh kenaikan harga pada sub kelompok pakaian sebesar 1,06% (yoy) dengan andil sebesar 0,05%. Sementara itu, harga pada sub kelompok alas kaki tercatat stabil apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan komoditasnya, inflasi kelompok ini didorong oleh kenaikan harga pada komoditas ongkos jahit sebesar 7,27% (yoy) dan andil sebesar 0,02% (yoy) yang diindikasikan oleh penyesuaian upah penjahit mengikuti kenaikan tingkat inflasi umum. Selain itu, kenaikan pada kelompok ini juga didorong oleh peningkatan harga pada komoditas celana panjang jeans wanita, BH (bra), kaos kaki pria, celana dalam wanita, dan baju muslim anak dengan kenaikan masing-masing sebesar 16,96% (yoy), 20,69% (yoy), 19,61% (yoy), 6,27% (yoy) dan 3,08% (yoy) yang diindikasikan terjadi seiring dengan kenaikan biaya produksi akibat peningkatan harga kain dan ongkos jahit (GRAFIK 3.10).

Grafik 3.10. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki Kota Jambi



3.2.7 Kelompok Pendidikan

Secara tahunan, kelompok pendidikan tercatat mengalami inflasi sebesar **2,18% (yoy)** dengan andil **0,12%**. Inflasi pada kelompok ini didorong oleh kenaikan harga pada sub kelompok pendidikan dasar dan anak usia dini serta sub kelompok pendidikan tinggi dengan kenaikan masing-masing sebesar 3,27% dan 2,57% (yoy). Inflasi pada sub kelompok tersebut utamanya disebabkan oleh masuknya tahun ajaran baru pada Triwulan III 2025. Kenaikan tersebut terjadi dikarenakan kenaikan gaji tenaga pengajar akibat kenaikan harga secara umum.

3.2.8 Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya

Pada Triwulan III 2025, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tercatat mengalami inflasi sebesar **1,03% (yoy)** dengan andil **0,02%**. Tingkat harga tersebut terpantau relatif stabil

apabila dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 1,27% (yoy) dengan andil yang sama sebesar 0,02%. Inflasi pada kelompok ini didorong oleh inflasi pada sub kelompok barang rekreasi lainnya dan olahraga serta sub kelompok koran, buku, dan perlengkapan sekolah. Adapun komoditas yang menyumbangkan inflasi pada kelompok ini diantaranya adalah makanan hewan peliharaan, buku tulis bergaris, dan tas sekolah dengan peningkatan masing-masing sebesar 4,90% (yoy), 3,79% (yoy), dan 4,22% (yoy) secara berurutan. Peningkatan harga dari komoditas pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tersebut diindikasikan oleh pengaruh dari nilai kurs pada 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.2.9 Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan juga tercatat berkontraksi sebesar **-0,77% (yoy)** dengan andil sebesar **-0,04%** terhadap inflasi secara umum di Kota Jambi. Deflasi tersebut didorong oleh penurunan harga pada sub kelompok peralatan informasi dan komunikasi dengan sebesar 4,39% (yoy) dengan andil sebesar -0,04% terhadap deflasi pada kelompok ini. Adapun komoditas yang tercatat mengalami penurunan harga adalah telepon seluler yang mengalami penurunan sebesar -5,36% (yoy). Penurunan harga pada komoditas tersebut diindikasikan oleh penurunan harga periodik pada komoditas selaku produk elektronik yang memiliki karakteristik *hype-oriented* di tengah belum dirilisnya seri baru dari sejumlah produsen komoditas.

3.2.10 Kelompok Kesehatan

Lebih lanjut, kelompok kesehatan juga tercatat mengalami deflasi sebesar **1,55% (yoy)** dengan andil **-0,05%**. Deflasi pada kelompok ini umumnya disebabkan oleh penurunan harga pada sub kelompok obat-obatan dan produk kesehatan yang tercatat deflasi sebesar 3,16% (yoy). Deflasi pada sub kelompok obat-obatan dan produk kesehatan didorong oleh penurunan harga pada komoditas vitamin dan masker dengan penurunan harga masing-masing sebesar -10,58% (yoy) dan -3,68% (yoy) secara berurutan. Komoditas vitamin memiliki andil terhadap inflasi Kota Jambi sebesar -0,03% dan masker dengan andil sebesar -0,01% pada Triwulan III 2025.

3.2.11 Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Pada Triwulan III 2025, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga tercatat mengalami deflasi sebesar **1,06% (yoy)** dengan andil **-0,05%**. Tingkat harga tersebut terpantau mengalami penurunan dibandingkan

triwulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 0,21% (yoy) dengan andil sebesar -0,01%. Deflasi pada kelompok ini didorong oleh deflasi pada sub kelompok barang dan layanan untuk pemeliharaan rumah tangga rutin sebesar 2,64% (yoy) dengan andil sebesar -0,08% (yoy). Lebih lanjut, secara umum, komoditas pendorong deflasi pada kelompok ini antara lain upah sabun detergen bubuk, sabun cair/cuci piring, detergen cair, dan pelicin/pewangi pakaian yang masing-masing mengalami penurunan sebesar -11,02% (yoy), -6,54% (yoy), -17,32% (yoy), dan -9,05% (yoy). Penurunan harga dari komoditas tersebut diindikasikan sejalan dengan penurunan pada harga bahan baku produksi barang pemeliharaan rumah tangga rutin berbahan baku pembersih.

Lebih lanjut, perkembangan inflasi di Kota Jambi sampai dengan rilis bulan Oktober 2025 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,03% (mtm) atau 3,71% (yoy). Secara bulanan, deflasi di Kota Jambi pada bulan Oktober utamanya disebabkan oleh penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar -1,56% (mtm) dengan andil sebesar -0,45% dan kelompok transportasi yang terdeflasi sebesar -0,09% (mtm) dengan andil sebesar -0,01% (mtm). Di sisi lain, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga tercatat mengalami inflasi dengan andil masing-masing sebesar 0,13% dan 0,11% (mtm) secara berurutan.

Deflasi pada Kota Jambi pada bulan Oktober utamanya didorong oleh penurunan harga pada komoditas bawang merah (andil -0,12%), daging ayam ras (andil -0,11%), dan beras (andil -0,08%). Penurunan harga komoditas bawang merah disebabkan oleh melimpahnya pasokan dari beberapa sentra produksi dari Jawa, Padang dan lokal Kerinci yang beredar di pasaran. Kondisi cuaca yang cenderung basah juga mendorong hasil produksi lebih tinggi dibandingkan dengan panen pada paruh pertama tahun 2025. Kemudian, penurunan harga pada komoditas Daging Ayam Ras utamanya disebabkan oleh normalisasi harga di tingkat petani seiring dengan menurunnya harga pakan jagung. Program SPHP jagung yang diberikan oleh Bulog terpantau juga mendorong penurunan harga komoditas Daging Ayam Ras dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Di sisi lain, deflasi yang lebih dalam di Kota Jambi tertahan oleh komoditas Cabai Merah tercatat mengalami peningkatan harga yang disebabkan oleh pasokan yang terbatas dari lokal maupun luar daerah. Produksi dari beberapa sentra lokal di Jambi masih belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, bahkan sebagian hasil panen terindikasi mengalir ke luar provinsi untuk mengejar harga yang lebih tinggi.

Saat ini inflasi tahunan Kota Jambi masih berada di rentang sasaran inflasi Nasional sebagai dampak penguatan berbagai upaya stabilisasi harga dan pasokan yang dilakukan oleh TPID Kota Jambi bersinergi dengan instansi/lembaga terkait.

Tabel 3.2. Perkembangan Inflasi Kota Jambi Berdasarkan Kelompok dan Sub Kelompok Barang dan Jasa (Tahun Dasar 2022)

Kelompok	I 2025		II 2025		III 2025	
	qtq	yoy	qtq	yoy	qtq	yoy
Makanan, Minuman dan Tembakau	2,49	0,84	-1,62	-0,65	3,58	7,64
Makanan	2,91	0,09	-2,10	-1,35	4,27	8,86
Minuman Yang Tidak Beralkohol	-0,21	7,62	-0,07	2,30	0,13	0,70
Rokok dan Tembakau	0,92	3,18	1,24	3,38	0,21	2,55
Pakaian dan Alas Kaki	0,84	1,37	0,05	1,28	-0,06	0,88
Pakaian	1,00	1,67	0,05	1,53	-0,06	1,06
Alas Kaki	0,24	0,24	0,01	0,25	0,00	0,25
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-7,34	-6,71	8,33	1,07	0,03	0,44
Sewa dan Kontrak Rumah	0,52	2,70	0,09	2,79	0,00	0,60
Pemeliharaan, Perbaikan, dan Keamanan Tempat Tinggal/perumahan	1,41	0,53	0,15	1,05	-0,37	1,46
Penyediaan Air dan Layanan Perumahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-18,74	-18,68	23,06	0,00	0,19	0,19
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,24	0,81	-0,35	-0,21	-0,71	-1,06
Furnitur, Perlengkapan dan Karpet	0,65	0,91	0,00	0,29	0,00	0,52
Tekstil Rumah Tangga	0,00	0,67	0,00	0,00	0,31	0,31
Peralatan Rumah Tangga	1,66	3,36	0,50	3,30	0,05	2,54
Barang Pecah Belah dan Peralatan Makan Minum	0,93	1,16	0,00	1,16	0,24	1,41
Peralatan dan Perlengkapan Perumahan dan Kebun	0,08	1,14	0,44	1,42	0,04	0,56
Barang dan Layanan Untuk Pemeliharaan Rumah Tangga Rutin	-0,16	0,26	-0,71	-1,27	-1,31	-2,64

Kelompok	I 2025		II 2025		III 2025	
	qtq	yoy	qtq	yoy	qtq	yoy
Kesehatan	0,19	-1,45	0,52	-1,39	-0,20	-1,55
Obat-obatan dan Produk Kesehatan	0,38	-3,00	1,10	-2,84	-0,42	-3,16
Jasa Rawat Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Rawat Inap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportasi	0,78	0,52	1,69	1,67	-0,18	1,37
Pembelian Kendaraan	0,69	1,65	0,00	1,39	1,37	2,13
Pengoperasian Peralatan Transportasi Pribadi	1,48	1,15	-0,53	0,29	0,15	0,56
Jasa Angkutan Penumpang	-2,69	-5,59	18,73	9,45	-5,32	3,70
Jasa Pengiriman Barang	0,00	-1,74	0,00	-1,74	0,00	-1,74
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,10	-1,15	-0,11	-1,23	-0,11	-0,77
Peralatan Informasi dan Komunikasi	-0,57	-6,10	-0,63	-6,52	-0,85	-4,39
Layanan Informasi dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asuransi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-0,27	0,70	0,56	1,27	0,25	1,03
Barang Rekreasi Lainnya dan Olahraga	0,00	-0,99	1,63	0,63	0,66	2,62
Layanan Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00
Layanan Kebudayaan	0,00	8,74	0,00	8,74	0,00	0,00
Koran, Buku, dan Perlengkapan Sekolah	-0,73	1,62	0,24	1,87	0,16	0,74
Pendidikan	0,11	0,74	0,00	0,74	2,06	2,18
Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini	0,00	2,16	0,00	2,16	3,27	3,27
Pendidikan Menengah	0,00	0,10	0,00	0,10	1,05	1,06
Pendidikan Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	2,57
Pendidikan Lainnya	0,69	0,69	0,00	0,69	0,00	0,69
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	1,08	2,41	1,64	3,66	0,07	3,18
Jasa Pelayanan Makanan dan Minuman	1,08	2,41	1,64	3,66	0,07	3,18
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	1,29	4,56	2,15	5,53	0,05	4,79
Perawatan Pribadi	0,27	1,21	0,63	1,71	-0,10	1,32
Perawatan Pribadi Lainnya	3,45	14,79	6,71	16,84	0,45	14,76
Perlindungan Sosial	8,92	8,92	0,00	8,92	0,00	8,92
Jasa Lainnya	9,54	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54
INFLASI UMUM	-0,02	-0,07	1,21	0,94	1,07	3,06

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Berdasarkan perkembangan tersebut, inflasi pada tahun 2025 diperkirakan tetap terkendali dan berada di sekitar titik tengah kisaran target $2,5\% \pm 1\%$ (yoy) seiring dengan berbagai upaya yang akan ditempuh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk

mengendalikan inflasi sesuai dengan koridor 4K yaitu: ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Tabel 3.3 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Bulanan (mtm) Kota Jambi Berdasarkan Komoditas

10 Komoditas Penyumbang Inflasi	III 2025 Sumbangan	10 Komoditas Penyumbang Deflasi	III 2025 Sumbangan
JULI		JULI	
Daging Ayam Ras	0,20	Angkutan Udara	-0,17
Bawang Merah	0,08	Jeruk	-0,03
Akademi/perguruan Tinggi	0,05	Udang Basah	-0,03
Kangkung	0,03	Emas Perhiasan	-0,03
Tomat	0,03	Ikan Nila	-0,02
Petai	0,03	Tempe	-0,01
Cabai Rawit	0,03	Ketimun	-0,01
Jengkol	0,02	Sabun Detergen Bubuk	-0,01
Bayam	0,02	Telepon Seluler	-0,01
Bensin	0,02	Tahu Mentah	-0,01
Sumbangan 10 Komoditas	0,51	Sumbangan 10 Komoditas	-0,33
AGUSTUS		AGUSTUS	
Cabai Merah	0,10	Angkutan Udara	-0,10
Bawang Merah	0,09	Daging Ayam Ras	-0,10
Kentang	0,04	Cabai Rawit	-0,05
Buncis	0,02	Tomat	-0,04
Kacang Panjang	0,02	Petai	-0,03
Ikan Dencis	0,02	Ikan Nila	-0,02
Sekolah Dasar	0,02	Emas Perhiasan	-0,02
Ketimun	0,02	Bensin	-0,01
Udang Basah	0,01	Kangkung	-0,01
Cabai Hijau	0,01	Bayam	-0,01
Sumbangan 10 Komoditas	0,35	Sumbangan 10 Komoditas	-0,39
SEPTEMBER		SEPTEMBER	
Cabai Merah	0,40	Bawang Merah	-0,11
Daging Ayam Ras	0,35	Kacang Panjang	-0,02
Angkutan Udara	0,18	Tomat	-0,02
Emas Perhiasan	0,05	Bawang Putih	-0,02
Mobil	0,04	Jengkol	-0,02
Sekolah Dasar	0,03	Buncis	-0,02
Udang Basah	0,02	Ketimun	-0,02
Ikan Gabus	0,02	Kentang	-0,01
Jeruk	0,02	Obat Gosok	-0,01
Ikan Dencis	0,01	Detergen Cair	-0,01
Sumbangan 10 Komoditas	1,12	Sumbangan 10 Komoditas	-0,26

Sumber: BPS Kota Jambi (diolah)

3.3 Inflasi Kabupaten Bungo Berdasarkan Kelompok Barang

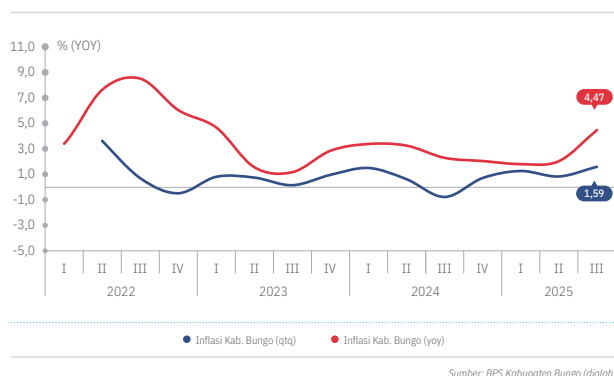
Kabupaten Bungo pada Triwulan III 2025 tercatat inflasi sebesar 4,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi pada Triwulan II 2025 yang tercatat inflasi sebesar 2,03% (yoy). Secara triwulanan inflasi Kabupaten Bungo juga tercatat mengalami peningkatan menjadi 1,59% (qtq) dari yang

sebelumnya 0,83% (qtq) (GRAFIK 3.11). Berdasarkan realisasi tersebut, Kabupaten Bungo berada pada peringkat 22 dari 150 Kab/Kota IHK di Indonesia, dan peringkat 18 dari total 41 Kab/Kota IHK di wilayah Sumatera.

Tabel 3.4. Perkembangan Inflasi Bungo (Tahun Dasar 2022)

Kelompok	(qtq %) II-25		(yoy %) II-25		(qtq %) III-25		(yoy %) III-25	
	Inflasi	Smbgn	Inflasi	Smbgn	Inflasi	Smbgn	Inflasi	Smbgn
Makanan, Minuman dan Tembakau	-0,59	-0,17	0,98	0,28	4,03	1,20	9,09	2,71
Pakaian dan Alas Kaki	-0,10	-0,01	-0,09	-0,01	0,04	0,00	-0,14	-0,01
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	4,53	0,75	2,58	0,43	0,00	0,00	2,31	0,37
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin RT	-0,15	-0,01	0,59	0,03	-0,13	-0,01	0,21	0,01
Kesehatan	0,05	0,00	0,93	0,02	-0,02	0,00	0,63	0,01
Transportasi	-0,44	-0,05	-0,07	-0,01	0,30	0,04	0,09	0,01
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,26	0,01	0,43	0,02	0,00	0,00	0,31	0,02
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,19	0,00	1,01	0,02	0,65	0,01	1,81	0,03
Pendidikan	0,00	0,00	2,73	0,10	3,14	0,11	3,14	0,11
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	0,32	0,03	0,39	0,04	0,00	0,00	0,32	0,03
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	3,72	0,32	14,53	1,24	3,04	0,26	16,25	1,41
INFLASI	0,83	0,83	2,03	2,03	1,59	1,59	4,47	4,47

Sumber: BPS Kabupaten Bungo (diolah)

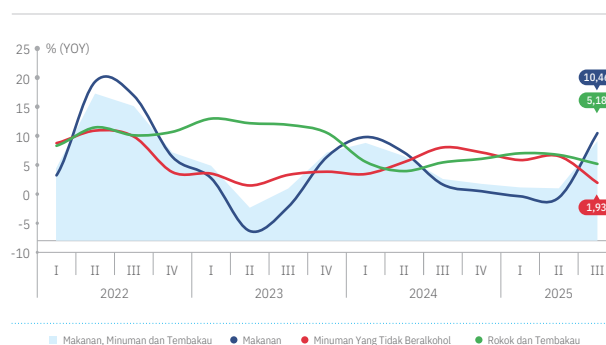
Grafik 3.11. Perkembangan Inflasi Tahunan Bungo (yoy)


Kenaikan harga pada Triwulan III 2025 utamanya didorong oleh kenaikan tingkat inflasi tahunan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang didorong oleh kenaikan komoditas *Volatile Food* (VF) seperti cabai merah, ikan serai, beras, daging ayam ras, ikan tongkol, minyak goreng, dan sigaret kretek tangan (SKT). Kemudian, inflasi di Kabupaten Bungo juga didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang didorong kenaikan harga emas perhiasan ditengah ketidakpastian kondisi geopolitik global. Lebih lanjut, komoditas perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga tercatat mengalami inflasi yang disebabkan oleh kenaikan tarif air minum PAM di Kabupaten Bungo.

3.3.1. Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau

Pada Triwulan III 2025, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 9,09% (yoy) dengan andil sebesar 2,71%, lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,98% (yoy) dengan andil sebesar 0,28%. Inflasi yang terjadi pada kelompok ini didorong oleh kenaikan IHK pada sub kelompok makanan yang tercatat mengalami inflasi sebesar 10,46% (yoy) dengan sumbangan

2,42%. Inflasi tersebut didorong kenaikan pada komoditas cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras yang disebabkan oleh pasokan yang terbatas di Kabupaten Bungo. Pada komoditas cabai merah, sebagian hasil panen lokal Bungo juga terindikasi mengalir ke luar provinsi untuk mengejar harga yang lebih tinggi. Lebih lanjut, komoditas bawang merah juga tercatat mengalami kenaikan yang didorong oleh normalisasi harga di Kabupaten Bungo pasca panen yang melimpah di tahun sebelumnya. Kemudian, komoditas daging ayam ras juga tercatat mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sejalan dengan peningkatan biaya produksi di tingkat peternak. Salah satu faktor utama adalah kenaikan harga DOC (*Day Old Chick*) dan kenaikan harga pakan ternak juga meningkat karena keterbatasan pasokan jagung pipilan kering. Berdasarkan data BPS, komoditas cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras tercatat mengalami kenaikan sebesar 97,01% (yoy), 54,06% (yoy), dan 18,49% (yoy) secara berurutan, dengan andil masing-masing komoditas terhadap inflasi Bungo sebesar 1,64%, 0,38%, dan 0,27% (GRAFIK 3.12).

Grafik 3.12. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau Kab. Bungo


Lebih lanjut, kenaikan harga cabai merah di Kabupaten Bungo tercatat juga pada hasil survei PIHPS pada bulan September 2025 sebesar Rp63.132/Kg atau meningkat sebesar 126,69% (yoy). Kenaikan juga tercatat pada komoditas bawang merah yang naik menjadi Rp35.205/Kg atau meningkat sebesar 41,02% (yoy). Lebih lanjut, PIHPS Bank Indonesia juga mencatat terjadinya kenaikan pada komoditas daging ayam ras yang naik menjadi Rp38.839/Kg atau meningkat sebesar 15,94% (yoy) pada bulan September 2025.

Selanjutnya, sub kelompok rokok dan tembakau juga tercatat mengalami inflasi sebesar 5,18% (yoy) dengan sumbangan sebesar 0,27% yang didorong oleh transmisi kebijakan penyesuaian tarif cukai rokok dan harga jual eceran pada awal tahun 2025 yang menyebabkan peningkatan harga aneka rokok di Kabupaten Bungo. Sejalan dengan itu, sub kelompok minuman yang tidak beralkohol juga terpantau mengalami inflasi sebesar 1,93% (yoy) dengan sumbangan sebesar 0,03% yang didorong oleh kenaikan harga komoditas kopi bubuk. Secara keseluruhan, berdasarkan komoditasnya, inflasi pada kelompok ini terutama disumbangkan oleh kenaikan harga pada komoditas cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, ikan serai, dan tomat dengan andil masing-masing sebesar 1,64% (yoy), 0,38% (yoy), 0,27% (yoy), 0,22% (yoy) dan 0,19% (yoy).

3.3.2. Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan rutin Rumah Tangga mengalami inflasi sebesar 0,21% (yoy) dengan sumbangan inflasi 0,01%. Inflasi pada kelompok ini terutama disumbangkan oleh sub kelompok tekstil rumah tangga dan sub kelompok peralatan rumah tangga dengan kenaikan IHK sebesar 1,45% (yoy) dan 0,78% (yoy). Adapun andil tercatat terhadap kedua sub kelompok tersebut sebesar 0,01% dan 0,01% terhadap inflasi di Kabupaten Bungo. Namun, kenaikan yang lebih tinggi pada kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga tertahan oleh adanya deflasi pada sub kelompok barang dan layanan untuk pemeliharaan rutin sebesar 0,39% (yoy) dengan andil -0,01%.

Adapun komoditas penyumbang inflasi pada kelompok ini utamanya adalah upah asisten rumah tangga, pembasmi nyamuk bakar, handuk, dan service AC dengan inflasi masing-masing sebesar 3,20%, 28,82%, 2,69%, dan 7,72%. Untuk komoditas upah asisten rumah tangga tercatat mengalami kenaikan yang disebabkan oleh kenaikan tingkah UMP Provinsi Jambi dibandingkan tahun lalu.

3.3.3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah

Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga terpantau mengalami inflasi sebesar 2,31% (yoy) dengan sumbangan sebesar 0,37% atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 2,58% (yoy) dengan sumbangan sebesar 0,43%. Adapun pada kelompok ini inflasi tercatat terjadi pada sub kelompok penyediaan air dan layanan perumahan lainnya sebesar 32,60% (yoy) dengan sumbangan inflasi sebesar 0,48% yang disebabkan oleh kenaikan harga tarif air PAM di Kabupaten Bungo sejak Triwulan II 2025.

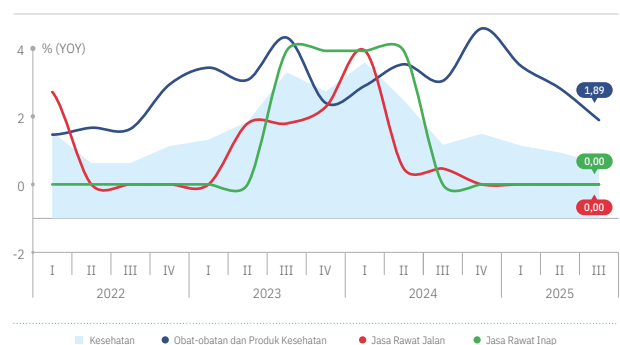
3.3.4. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Lebih lanjut, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, tercatat inflasi sebesar 16,25% (yoy) dengan sumbangan sebesar 1,41%. Realisasi tersebut terpantau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang inflasi sebesar 14,53% (yoy) dengan andil 1,24%. Inflasi pada kelompok pengeluaran ini didorong oleh inflasi yang terjadi pada sub kelompok perawatan pribadi lainnya sebesar 34,87% (yoy) dengan sumbangan 1,61%, serta pada sub kelompok perawatan pribadi sebesar 0,41% (yoy) dengan sumbangan 0,02%. Secara keseluruhan, kenaikan harga pada kelompok ini utamanya didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan sebesar 45,75% (yoy) dengan andil sebesar 1,73% sejalan dengan peningkatan harga emas global dan ketidakstabilan geopolitik dunia. Berdasarkan data *Bloomberg*, harga emas dunia pada bulan September 2025 tercatat sebesar \$3.458,20/*troy ons*, lebih tinggi dibandingkan dengan harga pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar \$2.476,76/*troy ons*.

3.3.5. Kelompok Kesehatan

Pada Triwulan III 2025, kelompok Kesehatan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,63% (yoy) dengan sumbangan terhadap total inflasi sebesar 0,12%. Realisasi tersebut terpantau menurun apabila dibandingkan dengan Triwulan II 2025 yang sebesar 0,93% (yoy) dengan andil sebesar 0,02%.

Grafik 3.13. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan Kab. Bungo



Sumber: BPS Kabupaten Bungo (diolah)

Inflasi kelompok ini utamanya disumbangkan oleh sub kelompok obat-obatan dan produk kesehatan yang tercatat meningkat sebesar 1,89% (yoy) dengan andil sebesar 0,01%. Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah obat gosok (3,17%, yoy) dengan andil sebesar 0,01%. Adapun penyebab peningkatan harga pada kelompok ini diindikasikan oleh penyesuaian harga komoditas seiring dengan penyesuaian/kenaikan bahan baku produksi obat (GRAFIK 3.13).

3.3.6. Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya

Secara tahunan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tercatat mengalami inflasi sebesar 1,81% (yoy) dengan andil 0,02%. Inflasi kelompok ini disumbangkan oleh sub kelompok barang rekreasi lainnya dan olah raga yang tercatat sebesar 3,38% (yoy) (andil sebesar 0,03%). Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah makanan hewan peliharaan (4,37% yoy) dengan andil sebesar 0,02%. Adapun peningkatan harga pada kelompok ini diindikasikan oleh penyesuaian harga komoditas seiring dengan peningkatan harga secara umum di Kabupaten Bungo.

3.3.7. Kelompok Pendidikan

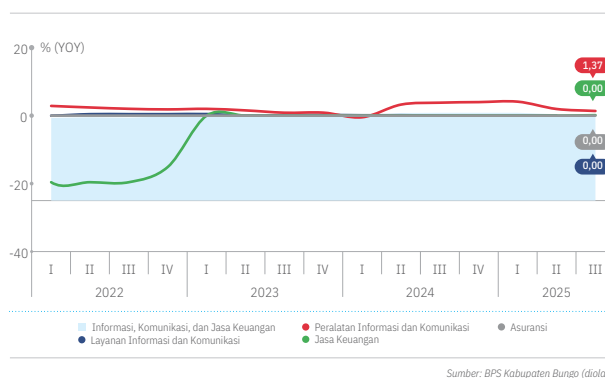
Secara tahunan, pada Triwulan III 2025 kelompok pendidikan tercatat mengalami inflasi sebesar 3,14% (yoy) dengan andil 0,11%. Inflasi kelompok ini disumbangkan oleh sub kelompok pendidikan dasar dan anak usia dini dan sub kelompok pendidikan tinggi yang tercatat masing-masing sebesar 8,33% (yoy) (andil sebesar 0,06%) serta 3,93% (yoy) (andil sebesar 0,05%). Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah akademi/ perguruan tinggi (3,93% yoy) dengan andil sebesar 0,05%, taman kanak-kanak (11,74% yoy) dengan andil sebesar 0,04%, dan sekolah dasar (6,50% yoy) dengan andil sebesar 0,03%. Adapun peningkatan harga pada kelompok ini disebabkan oleh telah masuknya tahun ajaran baru 2025.

3.3.8. Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Pada Triwulan III 2025, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,31% (yoy) dengan andil sebesar 0,02%. Sub kelompok yang memberikan andil pada inflasi di kelompok ini adalah sub kelompok peralatan informasi dan komunikasi yang tercatat mengalami kenaikan tingkat harga sebesar 1,37% (yoy) dengan andil 0,02%.

Adapun komoditas yang menyebabkan inflasi pada sub kelompok ini adalah telepon seluler dan laptop/notebook yang mengalami peningkatan harga sebesar 1,42% (yoy) dengan andil sebesar 0,02%, sejalan dengan adanya rilis seri baru komoditas dari sejumlah produsen yang memicu peningkatan harga pasar produk untuk beberapa merek (GRAFIK 3.14).

Grafik 3.14. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Kab. Bungo



3.3.9. Kelompok Penyediaan Makanan dan Minum/ Restoran

Selanjutnya, Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran pada Triwulan III 2025 mengalami inflasi sebesar 0,32% (yoy), dengan sumbangan 0,03% terhadap total inflasi di Kabupaten Bungo. Berdasarkan komoditasnya, kenaikan harga pada kelompok ini didorong oleh komoditas bakso siap santap dengan andil 0,02% (yoy) dan mie dengan andil 0,01% (yoy), seiring dengan kenaikan harga bahan baku produksi secara umum terutama untuk bahan baku gandum, tepung, dan kopi global (GRAFIK 3.15).

Grafik 3.15. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran Kab. Bungo



3.3.10. Kelompok Transportasi

Di sisi lain, kelompok transportasi tercatat mengalami inflasi sebesar 0,09% (yoy) dengan andil sebesar 0,01%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 0,07% (yoy) dengan andil -0,01%. Adapun inflasi pada kelompok ini disumbangkan oleh peningkatan harga pada sub kelompok pembelian kendaraan dengan tingkat inflasi sebesar 1,01% (yoy) dengan andil sebesar 0,04%. Inflasi yang terjadi pada sub kelompok pembelian kendaraan didorong oleh kecenderungan peningkatan fitur dan teknologi pada komponen kendaraan dan suku cadang mobil dan motor sehingga meningkatkan harga akhir komoditas pada sub kelompok ini.

Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi pada kelompok transportasi tertahan oleh adanya deflasi pada sub kelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi yang tercatat menurun sebesar -0,48% (yoy) dengan andil sebesar -0,03%. Deflasi pada sub kelompok ini terjadi pada komoditas bensin sejalan dengan harga minyak global yang menurun seiring meredanya konflik di daerah Timur Tengah.

3.3.11. Kelompok Pakaian dan Alas Kaki

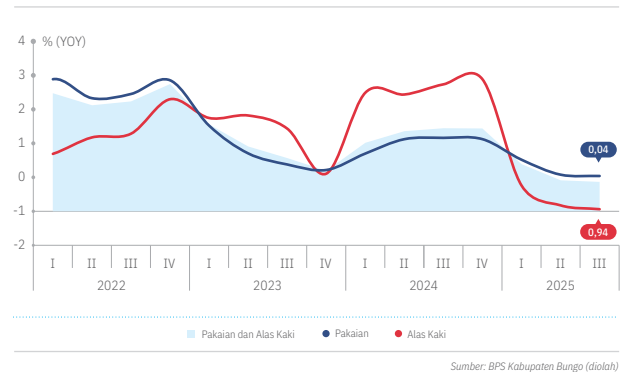
Kelompok Pakaian dan Alas Kaki mengalami deflasi sebesar 0,14% (yoy) dengan kontribusi sebesar -0,01%, angka tersebut tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat deflasi 0,09% (yoy) dengan andil -0,01%. Deflasi pada kelompok ini disumbangkan oleh sub alas kaki sebesar -0,94% (yoy) dengan andil sebesar -0,01%. Penurunan harga pada kelompok ini utamanya didorong oleh penurunan pada komoditas sandal kulit wanita, sepatu pria, sandal anak, dan sepatu anak dengan inflasi masing-masing sebesar -5,80% (yoy), -0,04% (yoy), -2,29% (yoy), dan -0,27% (yoy) yang disebabkan penurunan harga bahan baku sehingga menurunkan ongkos produksi barang akhir. Di sisi lain, sub kelompok pakaian di Kabupaten Bungo tercatat mengalami inflasi namun tidak signifikan terhadap inflasi Bungo dengan besaran kenaikan 0,04% (yoy) dan sumbangan sebesar 0,00%. (GRAFIK 3.16).

Selanjutnya, secara bulanan, pada bulan Oktober 2025, perkembangan IHK di Kabupaten Bungo tercatat mengalami inflasi sebesar 0,40% (mtm). Berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi pada bulan Oktober 2025 di antaranya adalah emas perhiasan (andil 0,50%, mtm), cabai merah (andil 0,24%, mtm), sigaret kretek tangan (andil 0,04%, mtm), ikan tongkol/ikan ambu-ambu (andil 0,03%, mtm), dan daging ayam ras (andil 0,02%, mtm). Sementara itu, secara tahunan, inflasi Kabupaten Bungo pada Oktober 2025 tercatat sebesar

4,84% (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan dengan inflasi Juli 2025 yang tercatat sebesar 2,98% (yoy). Kenaikan inflasi tersebut diindikasikan oleh peningkatan harga komoditas VF, normalisasi harga pada tahun sebelumnya yang memiliki pasokan melimpah serta harga dari komoditas emas perhiasan yang naik akibat kondisi geopolitik global yang belum stabil. Selain itu, terdapat kenaikan harga tarif air minum PAM di Kabupaten Bungo yang naik sejak Triwulan II 2025.

Ke depan, inflasi tahunan di Kabupaten Bungo pada Triwulan IV 2025 diperkirakan akan mengalami kenaikan dibandingkan Triwulan III 2025 dan tetap berada dalam kisaran target $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Hal tersebut didorong oleh tren kenaikan harga emas perhiasan global dan minyak dunia yang diperkirakan masih akan mengalami kenaikan seiring dengan masih tingginya ketegangan geopolitik dunia dan potensi kenaikan permintaan masyarakat menjelang HBKN Nataru 2025. Lebih lanjut, berbagai upaya stabilisasi harga dan pasokan akan terus dilakukan oleh TPID Kabupaten Bungo untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga melalui berbagai program strategis daerah sesuai dengan koridor 4K.

Grafik 3.16. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki Kab. Bungo



Tabel 3.5. Perkembangan Inflasi Bungo Berdasarkan Kelompok dan Sub Kelompok Barang dan Jasa (Tahun Dasar 2022)

Kelompok	I 2025		II 2025		III 2025	
	qtq	yoy	qtq	yoy	qtq	yoy
Makanan, Minuman dan Tembakau	3,37	1,13	-0,59	0,98	4,03	9,09
Makanan	4,09	-0,38	-1,25	-0,60	4,96	10,46
Minuman Yang Tidak Beralkohol	0,13	5,84	2,59	6,51	-0,66	1,93
Rokok dan Tembakau	1,17	7,00	1,46	6,72	1,28	5,18
Pakaian dan Alas Kaki	-0,03	0,39	-0,10	-0,09	0,04	-0,14
Pakaian	0,09	0,52	0,00	0,08	0,04	0,04
Alas Kaki	-0,57	-0,24	-0,49	-0,82	0,03	-0,94

Kelompok	I 2025		II 2025		III 2025	
	qtq	yoy	qtq	yoy	qtq	yoy
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-2,11	-1,71	4,53	2,58	0,00	2,31
Sewa dan Kontrak Rumah	0,00	0,93	0,00	0,72	0,00	0,00
Pemeliharaan, Perbaikan, dan Keamanan Tempat Tinggal/perumahan	-0,04	0,69	0,19	0,16	0,05	0,15
Penyediaan Air dan Layanan Perumahan Lainnya	32,60	32,60	0,00	32,60	0,00	32,60
Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-10,34	-10,38	11,54	-0,05	0,00	-0,01
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,12	0,75	-0,15	0,59	-0,13	0,21
Furnitur, Perlengkapan dan Karpet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekstil Rumah Tangga	0,00	0,46	0,00	0,46	1,45	1,45
Peralatan Rumah Tangga	0,50	1,81	-0,57	0,44	0,00	0,78
Barang Pecah Belah dan Peralatan Makan Minum	0,00	0,36	0,76	1,12	0,11	1,04
Peralatan dan Perlengkapan Perumahan dan Kebun	0,50	2,19	0,02	1,58	0,00	1,62
Barang dan Layanan Untuk Pemeliharaan Rumah Tangga Rutin	0,03	0,62	-0,24	0,71	-0,53	-0,39
Kesehatan	0,12	1,14	0,05	0,93	-0,02	0,63
Obat-obatan dan Produk Kesehatan	0,37	3,49	0,13	2,82	-0,04	1,89
Jasa Rawat Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Rawat Inap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportasi	1,09	1,32	-0,44	-0,07	0,30	0,09
Pembelian Kendaraan	0,95	2,59	-0,01	1,30	0,02	1,01
Pengoperasian Peralatan Transportasi Pribadi	0,47	0,05	-0,49	-0,52	0,07	-0,48
Jasa Angkutan Penumpang	4,98	3,76	-1,65	-2,37	2,47	-0,01
Jasa Pengiriman Barang	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,01	0,86	0,26	0,43	0,00	0,31
Peralatan Informasi dan Komunikasi	0,05	4,11	1,19	1,95	-0,04	1,37
Layanan Informasi dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asuransi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,82	1,67	0,19	1,01	0,65	1,81
Barang Rekreasi Lainnya dan Olahraga	1,20	2,30	0,41	1,81	1,48	3,38
Layanan Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koran, Buku, dan Perlengkapan Sekolah	0,76	1,68	0,00	0,56	0,00	0,83
Pendidikan	0,00	2,73	0,00	2,73	3,14	3,14
Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini	0,00	6,99	0,00	6,99	8,33	8,33
Pendidikan Menengah	0,00	2,56	0,00	2,56	0,16	0,16
Pendidikan Tinggi	0,00	0,09	0,00	0,09	3,93	3,93
Pendidikan Lainnya	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	0,00	2,54	0,32	0,39	0,00	0,32
Jasa Pelayanan Makanan dan Minuman	0,00	2,54	0,32	0,39	0,00	0,32
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	6,02	14,66	3,72	14,53	3,04	16,25
Perawatan Pribadi	0,91	1,19	-0,33	0,63	-0,01	0,41
Perawatan Pribadi Lainnya	11,71	32,36	7,75	31,39	5,86	34,87
Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMUM	1,26	1,80	0,83	2,03	1,59	4,47

Sumber: BPS Kabupaten Bungo (diolah)

Tabel 3.6 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Bulanan (mtm) Bungo Berdasarkan Komoditas

10 Komoditas Penyumbang Inflasi	III 2025 Sumbangan	10 Komoditas Penyumbang Deflasi	III 2025 Sumbangan
JULI		JULI	
Jengkol	0,19	Angkutan Udara	-0,02
Daging Ayam Ras	0,12	Emas Perhiasan	-0,02
Bawang Merah	0,11	Ikan Nila	-0,02
Cabai Merah	0,06	Jeruk	-0,02
Kangkung	0,05	Bawang Putih	-0,02
Tomat	0,04	Ikan Patin	-0,02
Taman Kanak Kanak	0,03	Sabun Mandi Cair	-0,01
Petai	0,03	Ikan Tongkol/ikan Ambu-ambu	-0,01
Cabai Rawit	0,03	Tahu Mentah	-0,01
Sekolah Dasar	0,03	Kentang	-0,01
Sumbangan 10 Komoditas	0,69	Sumbangan 10 Komoditas	-0,16
AGUSTUS		AGUSTUS	
Cabai Merah	0,19	Jengkol	-0,09
Bawang Merah	0,09	Daging Ayam Ras	-0,08
Emas Perhiasan	0,06	Tomat	-0,04
Angkutan Udara	0,05	Kangkung	-0,03
Ikan Tongkol/ikan Ambu-ambu	0,04	Bensin	-0,01
Kentang	0,04	Ayam Hidup	-0,01
Ikan Cakalang/ikan Sisik	0,03	Susu Bubuk	-0,01
Sigaret Kretek Mesin	0,03	Semangka	-0,01
Ikan Serai	0,02	Pasta Gigi	-0,01
Kacang Panjang	0,02	Deodorant	-0,01
Sumbangan 10 Komoditas	0,57	Sumbangan 10 Komoditas	-0,30
SEPTEMBER		SEPTEMBER	
Cabai Merah	0,62	Bawang Merah	-0,18
Emas Perhiasan	0,22	Jengkol	-0,11
Daging Ayam Ras	0,13	Petai	-0,05
Akademi/ perguruan Tinggi	0,05	Tomat	-0,04
Pasta Gigi	0,03	Bayam	-0,04
Beras	0,03	Santan Segar	-0,03
Ikan Cakalang/ikan Sisik	0,02	Kacang Panjang	-0,03
Ikan Serai	0,02	Kentang	-0,02
Ayam Hidup	0,02	Ikan Nila	-0,02
Salak	0,01	Tisu	-0,02
Sumbangan 10 Komoditas	1,15	Sumbangan 10 Komoditas	-0,54

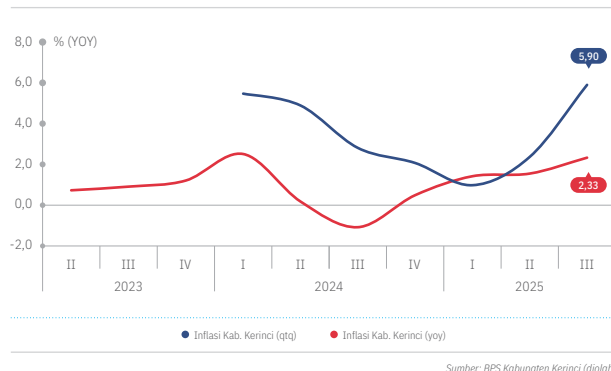
Sumber: BPS Kabupaten Bungo (diolah)

3.4 Inflasi Kabupaten Kerinci Berdasarkan Kelompok Barang

Kabupaten Kerinci pada Triwulan III 2025 tercatat inflasi sebesar 2,33% (qtq) atau inflasi sebesar 5,90% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi pada Triwulan II 2025 yang tercatat inflasi sebesar 1,55% (qtq) dan 2,37% (yoy) (GRAFIK 3.17). Berdasarkan realisasi tersebut, Kabupaten Kerinci berada pada peringkat 5 dari 150 Kab/Kota IHK di Indonesia, dan peringkat 5 dari total 41 Kab/Kota IHK di wilayah Sumatera.

Secara tahunan, peningkatan inflasi Kabupaten Kerinci pada Triwulan III 2025 terutama didorong oleh peningkatan IHK pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sehubungan dengan kenaikan harga komoditas cabai merah akibat keterbatasan pasokan yang disebabkan mengalirnya sebagian hasil panen di Kabupaten Kerinci menuju keluar daerah yang menawarkan harga lebih tinggi. Lebih lanjut, harga komoditas beras juga terpantau mengalami kenaikan akibat keputusan Kepala Bapenas Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras yang meningkatkan HET beras di seluruh Indonesia. Kemudian, komoditas daging ayam ras di Kerinci juga tercatat mengalami inflasi yang dipengaruhi oleh kenaikan biaya produksi peternak seiring dengan kenaikan bibit ayam DOC dan pakan jagung ternak. Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya tercatat mengalami kenaikan harga seiring dengan tren kenaikan harga emas perhiasan akibat belum stabilnya kondisi geopolitik global. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran juga turut menjadi penyumbang inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga secara umum di Kabupaten Kerinci. Serta kenaikan pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tercatat mengalami peningkatan yang diindikasikan oleh tingginya permintaan masyarakat selama musim libur sekolah pada Triwulan III 2025.

Grafik 3.17 Perkembangan Inflasi Tahunan Kerinci (yoy)



3.4.1 Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau

Pada Triwulan III 2025, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 10,82% (yoy) dengan andil sebesar 4,77%; realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 2,70% (yoy) dengan andil sebesar 1,16%. Inflasi yang terjadi pada kelompok ini didorong oleh kenaikan harga pada sub kelompok makanan sebesar 12,15% (yoy) dengan andil 4,23%, minuman yang tidak beralkohol sebesar 19,56% (yoy) dengan andil 0,31%, dan rokok dan tembakau sebesar 3,74% (yoy) dengan andil 0,29.

Inflasi pada sub kelompok makanan utamanya disebabkan oleh kenaikan pada komoditas pangan terutama untuk cabai merah (111,51% (yoy)) dengan andil 2,43%, daging ayam ras (24,48% (yoy)) dengan andil 0,77%, dan beras (12,35% (yoy)) dengan andil 0,71% terhadap inflasi Kabupaten Kerinci. Kenaikan harga pada komoditas cabai merah terjadi akibat keterbatasan pasokan yang disebabkan mengalirnya sebagian hasil panen di Kabupaten Kerinci menuju keluar daerah yang menawarkan

Tabel 3.7. Perkembangan Inflasi Kerinci (Tahun Dasar 2022)

Kelompok	(qtq %) II-25		(yoy %) II-25		(qtq %) III-25		(yoy %) III-25	
	Inflasi	Smbgn	Inflasi	Smbgn	Inflasi	Smbgn	Inflasi	Smbgn
Makanan, Minuman dan Tembakau	1,01	0,44	2,70	1,16	4,66	2,05	10,82	4,77
Pakaian dan Alas Kaki	0,47	0,05	1,49	0,15	0,20	0,02	0,94	0,09
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	8,56	0,63	0,81	0,06	0,09	0,01	0,45	0,03
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin RT	0,22	0,01	0,69	0,04	0,23	0,01	0,84	0,05
Kesehatan	0,74	0,01	3,02	0,06	-0,20	0,00	2,51	0,05
Transportasi	-0,87	-0,08	-0,90	-0,08	0,10	0,01	-0,62	-0,05
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,00	0,00	-0,25	-0,01	0,02	0,00	0,03	0,00
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	8,06	0,21	9,29	0,24	-0,12	0,00	8,91	0,23
Pendidikan	0,00	0,00	0,06	0,00	1,83	0,04	1,83	0,04
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	0,91	0,07	2,95	0,23	1,09	0,08	4,07	0,31
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	3,86	0,26	8,28	0,56	2,26	0,15	8,88	0,60
INFLASI	1,55	1,55	2,37	2,37	2,33	2,33	5,90	5,90

Sumber: BPS Kabupaten Kerinci (diolah)

harga lebih tinggi. Sementara itu, untuk komoditas daging ayam ras di Kerinci juga tercatat mengalami inflasi yang dipengaruhi oleh kenaikan biaya produksi peternak seiring dengan kenaikan bibit ayam DOC dan pakan jagung ternak. Untuk komoditas beras, kenaikan terjadi akibat keputusan Kepala Bapanas Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras yang meningkatkan HET beras di seluruh Indonesia.

Selain itu, inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga didorong oleh kenaikan harga pada sub kelompok minuman yang tidak beralkohol dan sub kelompok rokok dan tembakau yang tercatat mengalami inflasi masing-masing sebesar 19,56% (yoy) dengan sumbangan 0,31% dan 3,74% (yoy) dengan sumbangan 0,29%. Inflasi sub kelompok minuman yang tidak beralkohol utamanya didorong oleh kenaikan harga pada komoditas kopi bubuk sejalan dengan kenaikan harga global kopi arabica sebesar 39,15% (yoy) dibandingkan dengan harga yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu sub kelompok rokok dan tembakau tercatat mengalami kenaikan yang didorong oleh transmisi kebijakan penyesuaian tarif cukai rokok dan harga jual eceran pada awal tahun 2025 yang menyebabkan peningkatan harga pada aneka komoditas rokok.

Secara keseluruhan, berdasarkan komoditasnya, inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau di Kabupaten Kerinci utamanya disumbangkan oleh peningkatan harga pada komoditas cabai merah, daging ayam ras, beras, cabai hijau, dan kopi bubuk dengan andil masing-masing sebesar 2,43% (yoy), 0,77% (yoy), 0,71% (yoy), 0,55% (yoy) dan 0,43% (yoy) secara berurutan.

Peningkatan harga sejumlah komoditas pada kelompok ini didorong oleh penurunan pasokan yang terjadi akibat hasil panen yang tidak setinggi tahun sebelumnya, kenaikan harga di tingkat produsen, hingga fluktuasi akibat peraturan pemerintah. Namun demikian, inflasi yang lebih tinggi di Kabupaten Kerinci tertahan oleh adanya penurunan harga pada beberapa

komoditas seperti jengkol, kentang, terong, pisang, dan santan segar dengan andil masing-masing sebesar -0,24%, -0,20%, -0,05%, -0,03%, dan -0,03% dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2025 (GRAFIK 3.18)

3.4.2 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah

Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga terpantau mengalami inflasi sebesar 0,45% (yoy) dengan sumbangan sebesar 0,03%. Inflasi pada kelompok ini terutama didorong oleh adanya peningkatan harga pada sub kelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,65% (yoy) dengan andil sebesar 0,02%; serta peningkatan pada sub kelompok sewa dan kontrak rumah sebesar 0,42% (yoy) dengan andil sebesar 0,01%. Adapun peningkatan harga tersebut disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas bahan bakar rumah tangga pada sub kelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga di Kabupaten Kerinci yang terdiri dari kayu bakar, arang, dan minyak tanah. Selanjutnya, sub kelompok sewa dan kontrak rumah juga tercatat mengalami inflasi dengan peningkatan IHK sebesar 0,42% (yoy) dengan andil sebesar 0,01%. Peningkatan pada kelompok ini terindikasi oleh kenaikan komoditas kontrak rumah sebesar 0,53% (yoy).

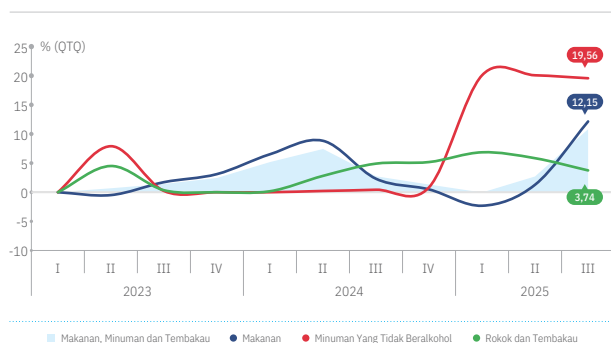
3.4.3 Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan rutin Rumah Tangga mengalami inflasi sebesar 0,84% (yoy) dengan sumbangan sebesar 0,05%. Inflasi pada kelompok ini terutama disumbangkan oleh beberapa sub kelompok diantaranya sub kelompok furnitur, perlengkapan, dan karpet; sub kelompok peralatan rumah tangga; dan sub kelompok barang pecah belah dan peralatan makan minum dengan kenaikan masing-masing sebesar 1,65% (yoy) andil 0,02%; 1,44% (yoy) andil 0,01%; dan 1,01% (yoy) andil 0,01% secara berurutan. Kenaikan tersebut tercatat terjadi disebabkan oleh inflasi pada komoditas kasur, lemari pakaian, dan kompor seiring dengan pengembangan teknologi baru dan kenaikan harga bahan baku dalam pembuatan perlengkapan rumah tangga tersebut.

3.4.4 Kelompok Pakaian dan Alas Kaki

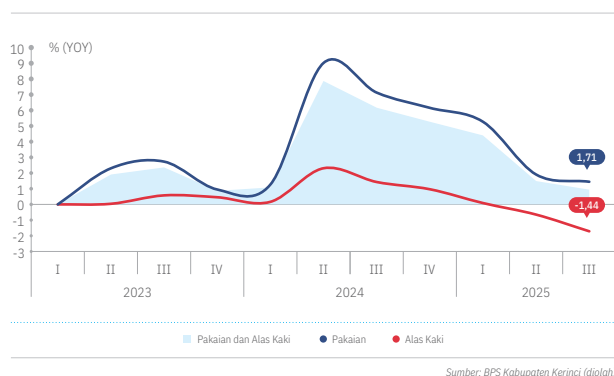
Kelompok Pakaian dan Alas Kaki mengalami inflasi 0,94% (yoy) dengan kontribusi sebesar 0,09% untuk Triwulan III 2025. Inflasi pada kelompok ini utamanya disumbangkan oleh sub kelompok pakaian (1,44% (yoy)) dengan andil sebesar 0,12%. Peningkatan harga pada kelompok pakaian dan alas kaki didorong oleh inflasi pada komoditas baju muslim wanita, baju muslim pria, seragam sekolah anak, ongkos jahit, dan baju kaos berkerah anak dengan masing-masing andil terhadap inflasi Kabupaten Kerinci sebesar 0,05% (yoy), 0,02% (yoy), 0,02% (yoy), 0,02% (yoy), serta 0,01% (yoy). Kenaikan harga pada

Grafik 3.18. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau Kab. Kerinci (yoy)



Sumber: BPS Kabupaten Kerinci (diolah)

Grafik 3.19. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki Kab. Kerinci



beberapa komoditas tersebut terjadi seiring dengan peningkatan harga produksi yang didorong oleh peningkatan harga kapas dan karet (GRAFIK 3.19).

3.4.5 Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Lebih lanjut, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, tercatat inflasi sebesar 8,88% (yoy) dengan sumbangan terhadap inflasi Kabupaten Kerinci sebesar 0,60%. Realisasi tersebut terpantau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 8,28% (yoy) dengan andil 0,56%. Inflasi pada kelompok pengeluaran ini didorong oleh kenaikan harga yang terjadi pada sub kelompok perawatan pribadi lainnya sebesar 24,85% (yoy) dengan sumbangan sebesar 0,67%. Kenaikan harga pada sub kelompok tersebut didorong oleh kenaikan pada harga komoditas emas perhiasan sebesar 36,46% (yoy) dengan andil sebesar 0,71% sejalan dengan peningkatan dari harga emas global.

3.4.6 Kelompok Kesehatan

Pada Triwulan III 2025, kelompok kesehatan tercatat mengalami inflasi sebesar 2,51% (yoy) dengan sumbangan terhadap total inflasi sebesar 0,05%. Realisasi tersebut terpantau lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan II 2025 yang tercatat sebesar 3,02% (yoy) dengan andil sebesar 0,06%. Inflasi pada kelompok ini terutama didorong oleh kenaikan

harga yang terjadi pada sub kelompok obat-obatan dan produk kesehatan sebesar 5,21% (yoy) dengan sumbangan sebesar 0,04%. Selain itu, sub kelompok jasa rawat jalan di Kerinci juga tercatat mengalami kenaikan sebesar 1,43% (yoy) dengan andil sebesar 0,01%. Adapun terdapat komoditas dalam kelompok kesehatan yang mengalami inflasi pada Triwulan III 2025, yaitu obat dengan resep (16,26%, yoy) dengan andil sebesar 0,04%, obat batuk (13,25%, yoy) dengan andil sebesar 0,01%, dan tarif bidan (5,36%, yoy) dengan andil sebesar 0,01% (GRAFIK 3.20).

3.4.7 Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya

Secara kuartalan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tercatat mengalami inflasi 8,91% (yoy) dengan kontribusi sebesar 0,23%. Inflasi pada kelompok ini utamanya disumbangkan oleh sub kelompok layanan rekreasi dan olahraga tepatnya pada komoditas rekreasi yang meningkat sebesar 22,47% (yoy) dengan andil sebesar 0,20%. Selain itu, komoditas buku tulis bergaris dan pulpen/*ballpoint* juga tercatat mengalami peningkatan harga masing-masing sebesar 9,74% (yoy) dan 23,67% (yoy) secara berurutan. Peningkatan harga kelompok ini mayoritas disebabkan oleh peningkatan permintaan masyarakat selama libur sekolah di Triwulan III dan semakin terkenalnya wisata di Kabupaten Kerinci.

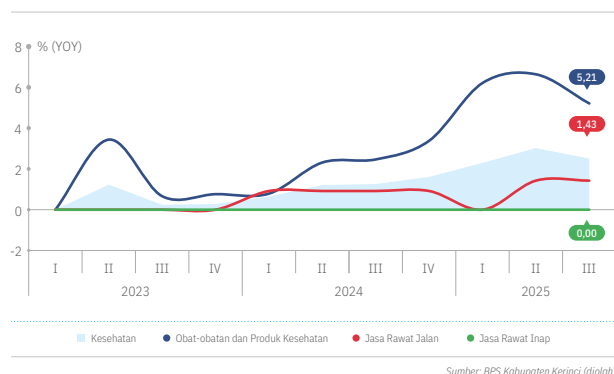
3.4.8 Kelompok Pendidikan

Pada Triwulan III 2025, kelompok pendidikan tercatat mengalami inflasi sebesar 1,83% (yoy) dengan sumbangan terhadap total inflasi sebesar 0,04%. Realisasi tersebut terpantau lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan II 2025 yang tercatat stabil. Inflasi pada kelompok ini utamanya disumbangkan oleh sub kelompok pendidikan dasar dan anak usia dini, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di Kabupaten Kerinci seiring dengan masuknya tahun ajaran baru 2025 serta kenaikan tarif kursus rutin tahunan.

3.4.9 Kelompok Penyediaan Makanan dan Minum/Restoran

Selanjutnya, kelompok penyediaan makanan dan minum/restoran tercatat mengalami inflasi sebesar 4,07% (yoy) dengan kontribusi terhadap inflasi Triwulan III 2025 sebesar 0,31%. Harga komoditas di Triwulan III 2025 pada dalam kelompok penyediaan makanan dan minum/restoran terpantau meningkat disebabkan oleh kenaikan pada komoditas ketupat/lontong sayur, bakso siap santap, nasi dengan lauk, rendang, dan kopi siap saji dengan peningkatan masing-masing sebesar 24,39% (yoy), 2,90% (yoy), 1,63% (yoy), 5,88% (yoy), dan 20,76% (yoy) dengan andil masing-masing komoditas sebesar 0,28%, 0,03%, 0,02%, 0,01%, dan 0,01% secara berurutan.

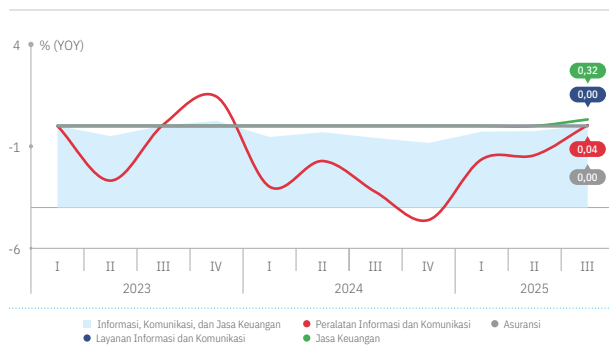
Grafik 3.20. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan Kab. Kerinci



3.4.10 Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Selanjutnya, inflasi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang tercatat cenderung stabil dengan kenaikan sebesar 0,03% (yoy) dan andil sebesar 0,00%. Sub kelompok yang memberikan andil pada inflasi di kelompok ini adalah sub kelompok jasa keuangan dan sub kelompok peralatan informasi dan komunikasi yang tercatat mengalami peningkatan tingkat harga sebesar 0,32% (yoy) dan 0,04% (yoy) secara berurutan. Adapun komoditas yang menyebabkan inflasi pada sub kelompok ini adalah biaya administrasi buku tabungan bank dan harga televisi berwarna (GRAFIK 3.21).

Grafik 3.21. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan



Kelompok	I 2025		II 2025		III 2025	
	qtq	yoy	qtq	yoy	qtq	yoy
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-7,69	-7,50	8,56	0,81	0,09	0,45
Sewa dan Kontrak Rumah	0,00	0,89	0,00	0,56	0,42	0,42
Pemeliharaan, Perbaikan, dan Keamanan Tempat Tinggal/perumahan	0,00	-0,41	0,03	-0,59	0,00	0,29
Penyediaan Air dan Layanan Perumahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-17,00	-16,80	21,03	1,84	0,00	0,65
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,32	0,31	0,22	0,69	0,23	0,84
Furnitur, Perlengkapan dan Karpet	0,46	0,28	0,45	1,37	0,74	1,65
Tekstil Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan Rumah Tangga	1,02	1,02	0,10	1,17	0,32	1,44
Barang Pecah Belah dan Peralatan Makan Minum	0,25	0,03	0,76	0,78	0,00	1,01
Peralatan dan Perlengkapan Perumahan dan Kebun	0,28	0,28	0,00	0,28	0,00	0,28
Barang dan Layanan Untuk Pemeliharaan Rumah Tangga Rutin	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
Kesehatan	1,33	2,29	0,74	3,02	-0,20	2,51
Obat-obatan dan Produk Kesehatan	3,55	6,21	0,48	6,64	-0,54	5,21
Jasa Rawat Jalan	0,00	0,00	1,43	1,43	0,00	1,43
Jasa Rawat Inap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportasi	0,91	0,45	-0,87	-0,90	0,10	-0,62
Pembelian Kendaraan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengoperasian Peralatan Transportasi Pribadi	0,96	-0,29	-0,90	-1,19	0,12	-0,82
Jasa Angkutan Penumpang	2,32	9,08	-2,27	0,00	0,00	0,00
Jasa Pengiriman Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,01	-0,28	0,00	-0,25	0,02	0,03
Peralatan Informasi dan Komunikasi	0,04	-1,64	0,00	-1,43	0,00	0,04
Layanan Informasi dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asuransi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,48	12,90	8,06	9,29	-0,12	8,91
Barang Rekreasi Lainnya dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Layanan Rekreasi dan Olahraga	0,00	50,00	22,47	22,47	0,00	22,47
Koran, Buku, dan Perlengkapan Sekolah	1,60	3,90	3,71	7,76	-0,43	6,46
Pendidikan	0,00	0,06	0,00	0,06	1,83	1,83
Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini	0,00	0,29	0,00	0,29	4,34	4,34
Pendidikan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	2,68
Pendidikan Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,84
Pendidikan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	1,90	4,42	0,91	2,95	1,09	4,07
Jasa Pelayanan Makanan dan Minuman	1,90	4,42	0,91	2,95	1,09	4,07
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	1,57	6,77	3,86	8,28	2,26	8,88
Perawatan Pribadi	-0,38	-0,02	0,65	0,71	0,00	0,36
Perawatan Pribadi Lainnya	5,11	21,03	9,46	23,05	5,85	24,85
Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMUM	1,42	0,98	1,55	2,37	2,33	5,90

Sumber: BPS Kabupaten Kerinci (diolah)

Tabel 3.9 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Bulanan (mtm) Kerinci Berdasarkan Komoditas

10 Komoditas Penyumbang Inflasi	III 2025 Sumbangan	10 Komoditas Penyumbang Deflasi	III 2025 Sumbangan
JULI		JULI	
Beras	0,44	Ikan Nila	-0,14
Bawang Merah	0,35	Terong	-0,09
Daging Ayam Ras	0,14	Ketimun	-0,05
Kentang	0,12	Obat Dengan Resep	-0,03
Ikan Serai	0,09	Minyak Goreng	-0,03
Tomat	0,09	Kelapa	-0,02
Buncis	0,07	Wortel	-0,02
Cabai Merah	0,06		
Ikan Tongkol/ Ikan Ambu-ambu	0,04		
Sekolah Menengah Atas	0,04		
Sumbangan 10 Komoditas	1,44	Sumbangan 10 Komoditas	-0,38
AGUSTUS		AGUSTUS	
Cabai Merah	0,28	Jengkol	-0,33
Beras	0,16	Ikan Serai	-0,14
Bawang Merah	0,14	Daging Ayam Ras	-0,07
Kentang	0,11	Tomat	-0,07
Ikan Tongkol/ Ikan Ambu-ambu	0,10	Terong	-0,04
Cabai Hijau	0,03	Kelapa	-0,04
Buncis	0,03	Ketimun	-0,03
Kol Putih/kubis	0,02	Bensin	-0,02
Cabai Rawit	0,02	Emas Perhiasan	-0,01
Ikan Nila	0,02	Tas Sekolah	-0,01
Sumbangan 10 Komoditas	0,91	Sumbangan 10 Komoditas	-0,76
SEPTEMBER		SEPTEMBER	
Cabai Merah	0,93	Bawang Merah	-0,32
Daging Ayam Ras	0,26	Ikan Serai	-0,30
Cabai Hijau	0,25	Kentang	-0,09
Emas Perhiasan	0,17	Buncis	-0,06
Ketupat / Lontong Sayur	0,08	Ikan Tongkol/ Ikan Ambu-ambu	-0,06
Wortel	0,04	Tomat	-0,05
Sigaret Putih Mesin	0,02	Beras	-0,05
		Kelapa	-0,04
		Bawang Putih	-0,03
		Ikan Nila	-0,03
Sumbangan 10 Komoditas	1,75	Sumbangan 10 Komoditas	-1,03

Sumber: BPS Kabupaten Kerinci (diolah)



04.
**Stabilitas
Keuangan Daerah,
Pengembangan
Akses Keuangan
dan UMKM**



“

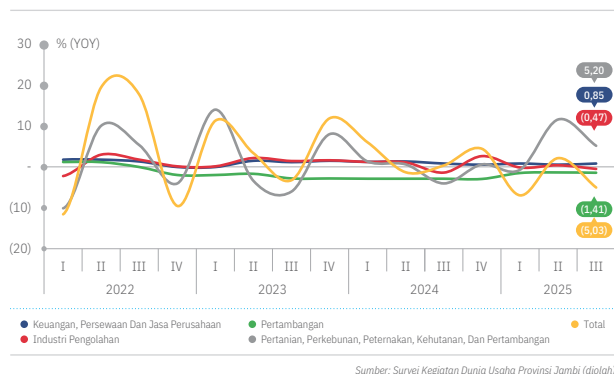
Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Jambi pada triwulan III 2025 tetap terjaga, tercermin dari tingkat ROA bank dan rasio LDR yang tercatat tetap terjaga pada triwulan berjalan. Kinerja positif juga tercermin pada sisi penghimpunan dana yang masih tercatat tumbuh yang utamanya didominasi oleh peningkatan tabungan. Hal ini sejalan dengan penyaluran kredit korporasi yang tercatat tumbuh 49,72% (yoy) pada triwulan laporan.

4.1. Ketahanan Sektor Korporasi

Pertumbuhan kredit korporasi di Provinsi Jambi pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 49,72% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 43,99% (yoy). Berdasarkan lapangan usaha, sektor perdagangan tumbuh 29,82% (yoy) pada triwulan III 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,41% (yoy). Pertumbuhan kredit juga didorong oleh sektor lain-lain yang tumbuh sebesar 62,98% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang menurun sebesar 26,62% (yoy). Sementara itu, sektor pertanian menurun sebesar 21,51% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 17,11% (yoy). Selanjutnya, kredit pada sektor pertambangan dan industri pada triwulan laporan menurun masing-masing sebesar 27,08% (yoy) dan 23,94% (yoy). (GRAFIK 4.1).

Selanjutnya, Indeks Keyakinan Konsumen pada triwulan laporan tetap kuat dan berada pada level optimis, dengan indeks sebesar 108,8. Hal tersebut didorong oleh tetap kuatnya optimisme masyarakat terhadap kondisi kinerja ekonomi saat ini dan enam bulan ke depan.

Grafik 4.1. Survei Kegiatan Dunia Usaha Provinsi Jambi



4.1.1 Sumber Kerentanan Sektor Korporasi

Kinerja korporasi di Provinsi Jambi sangat dipengaruhi perkembangan komoditas perkebunan dan komoditas energi primer. Hal tersebut disebabkan oleh sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang disumbangkan oleh LU utama, di antaranya LU Pertanian, LU Pertambangan, dan LU Industri pengolahan. Secara umum, pada triwulan III 2025 pelaku usaha menyatakan bahwa saat ini akses kredit masih relatif sama dengan periode sebelumnya. Hal ini sejalan dengan data SKDU yang menunjukkan bahwa akses kredit perbankan dirasakan masih cukup baik oleh responden. Sebanyak 96,25% responden menyatakan akses kredit yang masih membaik dan relatif sama dengan periode sebelumnya dan 3,75% lainnya menyatakan terjadi penurunan akses kredit/jangkauan pembiayaan untuk diperoleh.

4.1.2 Kinerja Korporasi dan Penilaian Risiko

Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha mengindikasikan bahwa kinerja kegiatan usaha sektor utama di Provinsi Jambi mengalami penurunan ditunjukkan dari nilai SBT yang turun sebesar 1,67%. Angka tersebut turun dibandingkan dengan nilai SBT pada triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,18%.

4.1.3 Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi

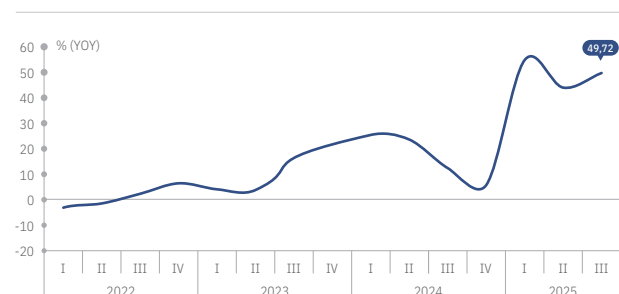
Kredit korporasi yang disalurkan di Provinsi Jambi pada triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp27,91 triliun atau tumbuh sebesar 49,72% (yoy), tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 43,99% (yoy) (GRAFIK 4.2).

Suku bunga tertimbang rata-rata untuk nasabah korporasi tercatat meningkat sebesar 9,27%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,43% (yoy). Meski demikian, suku bunga kredit yang ditetapkan masih jauh di atas suku bunga BI Rate yang ditetapkan sebesar 4,75%. Pertumbuhan yang masih menunjukkan tren positif pada penyaluran kredit korporasi diantaranya didorong oleh sektor perdagangan 29,82% (yoy) dan sektor lain-lain 62,98% (yoy). Meski demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh sektor pertambangan sebesar 27,08%, sektor industri sebesar 23,94%, dan sektor pertanian sebesar 21,51% (yoy). (GRAFIK 4.3)

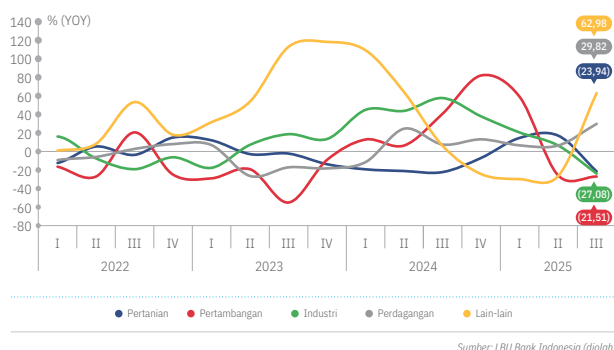
Berdasarkan pangsa, kredit korporasi triwulan III 2025 didominasi oleh sektor lain-lain (48,49%), sektor industri (19,04%), sektor perdagangan (16,85%), dan sektor pertanian (13,89%) (GRAFIK 4.4). Selanjutnya, berdasarkan jenis penggunaan, kredit korporasi pada triwulan III 2025 didominasi untuk kebutuhan modal kerja sebesar Rp10,49 triliun (pangsa 59,80%), kredit untuk investasi sebesar Rp7,05 triliun (pangsa 40,20%), dan kredit untuk konsumsi sebesar Rp9,19 miliar (pangsa 0,05%) (GRAFIK 4.5).

Kredit modal kerja tumbuh sebesar 6,41% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,59% (yoy). Selanjutnya, kredit investasi berkontraksi sebesar

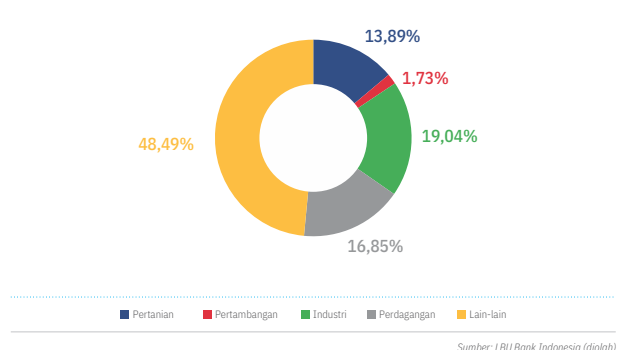
Grafik 4.2. Pertumbuhan Kredit Korporasi



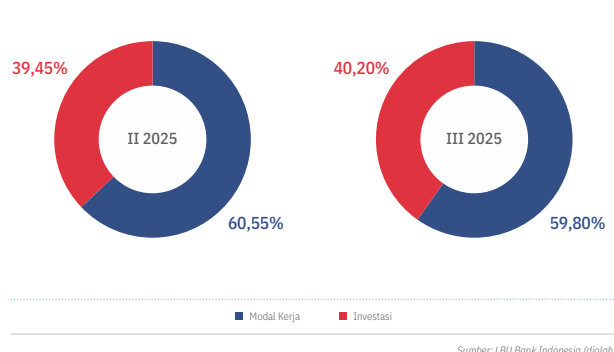
Grafik 4.3. Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Utama Provinsi Jambi



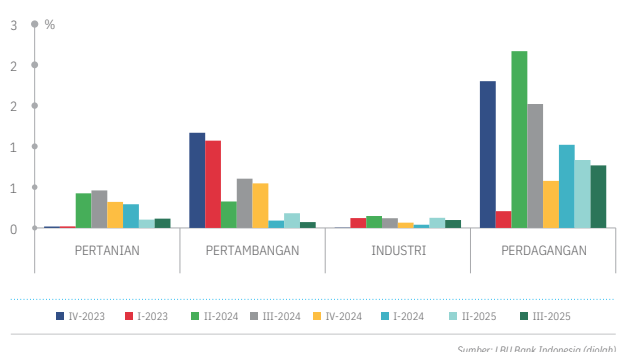
Grafik 4.4. Proporsi Kredit Korporasi menurut Sektor Utama Provinsi Jambi



Grafik 4.5. Proporsi Kredit Korporasi Per Jenis Penggunaan



Grafik 4.6. NPL Kredit Korporasi Sektor Utama Provinsi Jambi



12,14% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 13,7% (yoy). Sementara itu, kredit konsumsi tumbuh sebesar 2,07% (yoy), mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 29,7% (yoy). Pertumbuhan kredit korporasi yang masih menunjukkan tren pertumbuhan positif merupakan cermin kondisi usaha yang masih baik serta terjaganya peran intermediasi perbankan.

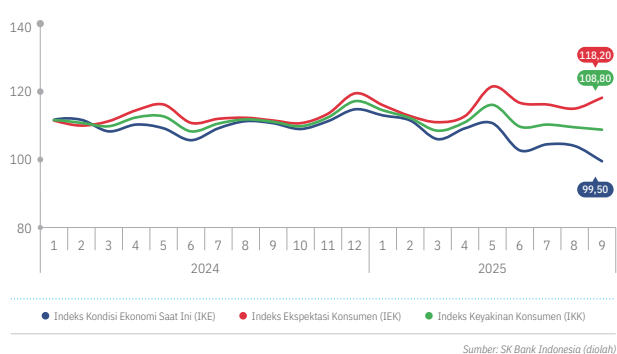
Selanjutnya, pada triwulan III 2025 terjadi peningkatan kualitas kredit sektor utama Jambi yang tercermin dari NPL sektor pertambangan sebesar 0,07% (*gross*), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,18% (*gross*). Selain itu, kualitas kredit sektor perdagangan juga meningkat seiring dengan nilai NPL triwulan III 2025 sebesar 0,77% (*gross*) lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,83% (*gross*). Adapun *threshold* NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%.

4.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga

Simpanan perseorangan pada perbankan di triwulan III 2025 sebesar Rp34,25 triliun, atau tumbuh sebesar 7,26% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,76% (yoy). Berdasarkan jenisnya, terdapat peningkatan simpanan perseorangan dalam bentuk giro sebesar

18,77% (yoy) dan tabungan sebesar 8,95% (yoy). Namun pertumbuhan lebih tinggi tertahan oleh adanya penurunan simpanan perseorangan dalam bentuk deposito yang tercatat berkontraksi sebesar 0,14% (yoy). Berdasarkan komposisinya, sebagian besar DPK perseorangan disimpan dalam bentuk tabungan (78,03%), sementara sisanya disimpan dalam bentuk deposito (19,57%), dan giro (2,40%). Kontraksi tersebut dapat mengindikasikan bahwa konsumsi rumah tangga masih terjaga pada triwulan III 2025 yang tercermin dari peningkatan pertumbuhan kredit yang disalurkan ke rumah tangga. Pertumbuhan kredit Rumah Tangga (RT) Jambi pada triwulan III 2025 sebesar 6,57% (yoy).

Grafik 4.7. IKE, IEK, dan IKK Survei Konsumen Provinsi Jambi



Hal tersebut terkonfirmasi dari hasil Survei Konsumen KPw BI Provinsi Jambi menunjukkan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September 2025 tercatat sebesar 108,8, lebih kecil dibandingkan Juni 2025 yang tumbuh sebesar 109,7. Sementara itu, Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) September 2025 juga berada pada area optimis dengan indeks sebesar 99,5 (GRAFIK 4.7).

4.2.1 Dana Pihak Ketiga Perseorangan di Perbankan

Pertumbuhan DPK perseorangan Jambi pada triwulan III 2025 tercatat meningkat sebesar 7,26% (yoy) (GRAFIK 4.8), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,76% (yoy). Berdasarkan pangsaanya, dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan pada triwulan laporan didominasi DPK perseorangan dengan pangsa sebesar 67,24%, sedangkan sisanya sebesar 32,76% merupakan DPK nonperseorangan (GRAFIK 4.9).

Sesuai dengan karakteristiknya, preferensi RT dalam menyimpan kelebihan dananya mayoritas disimpan dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka (deposito) masing-masing sebesar 78,03% dan 19,57%, sementara pangsa giro hanya sebesar 2,40% (GRAFIK 4.11).

Pada triwulan III 2025, deposito terkonsentrasi sebesar 0,14% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkonsentrasi sebesar 3,30% (yoy). Selanjutnya, giro tumbuh

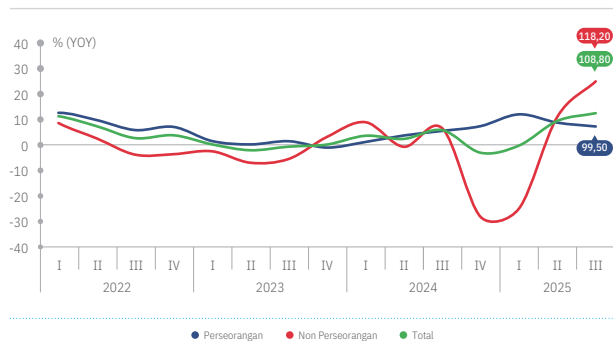
sebesar 18,77% (yoy), naik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkonsentrasi sebesar 8,96% (yoy). Pertumbuhan juga terjadi pada tabungan sebesar 8,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,69% (yoy) (GRAFIK 4.10).

4.2.2 Kredit Rumah Tangga di Perbankan

Kredit rumah tangga (RT) mencapai sebesar Rp26,79 triliun atau tumbuh sebesar 6,57% (yoy). Pertumbuhan kredit tersebut ditopang oleh laju pertumbuhan kredit rumah tangga untuk kategori kepemilikan rumah (KPR) dan peralatan rumah tangga lainnya masing-masing tumbuh sebesar 9,75% (yoy) dan 9,22% (yoy).

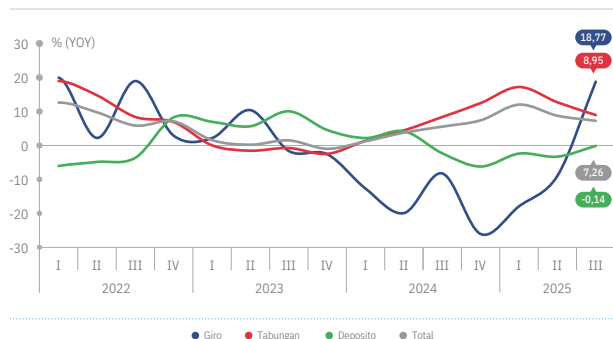
KPR/KPA tipe 21 terkonsentrasi sebesar 3,38% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkonsentrasi sebesar 7,02% (yoy). Selanjutnya, kredit kepemilikan ruko/rukan terkonsentrasi sebesar 5,47% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025 yang terkonsentrasi sebesar 5,65% (yoy). Sementara itu, KPR/KPA tipe 22-70 m² dan KPR/KPA tipe > 70 m² masing-masing tumbuh sebesar 10,65% (yoy) dan 7,19% (yoy) (GRAFIK 4.13). Sementara itu, kualitas kredit rumah tangga pada kategori KPR/KPA/rukan meningkat seiring dengan nilai NPL triwulan III 2025 sebesar 2,31% (gross) lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,44% (gross) (GRAFIK 4.12).

Grafik 4.8. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga



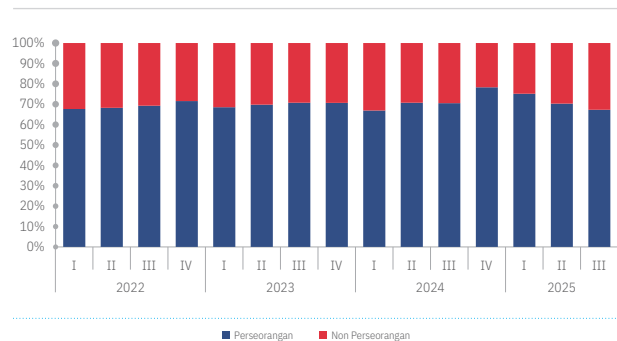
Sumber: LBU Bank Indonesia (diolah)

Grafik 4.10. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga



Sumber: LBU Bank Indonesia (diolah)

Grafik 4.9. Komposisi Dana Pihak Ketiga



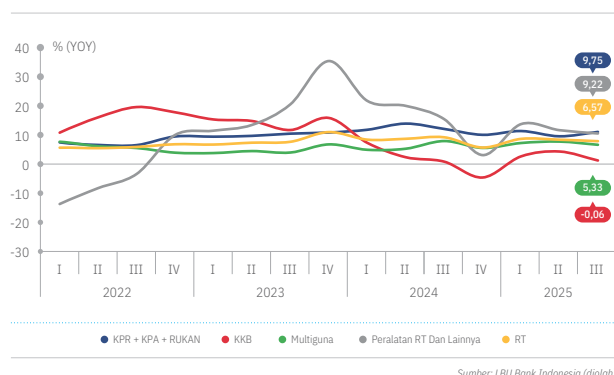
Sumber: LBU Bank Indonesia (diolah)

Grafik 4.11. Pangsa Dana Pihak Ketiga



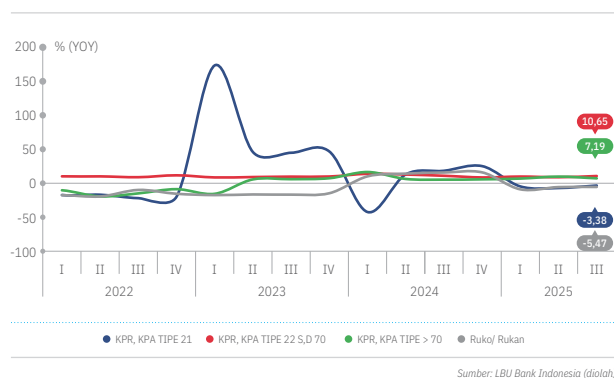
Sumber: LBU Bank Indonesia (diolah)

Grafik 4.12. Perkembangan Pembiayaan Sektor Rumah Tangga per Jenis Penggunaan

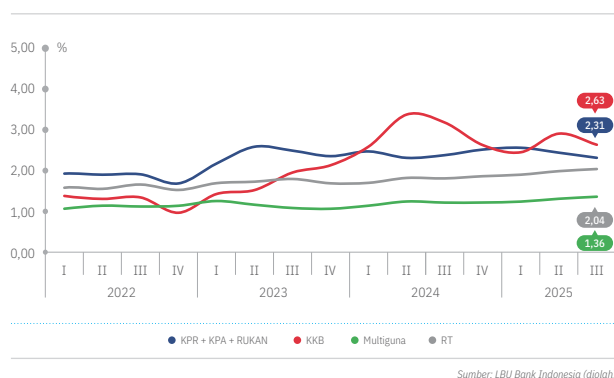


Secara umum, risiko di sektor rumah tangga relatif terkendali tercermin dari rasio NPL yang masih terjaga di bawah batas 5% (*gross*). NPL rumah tangga pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 2,04%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,99%. Sementara itu, NPL KPR tercatat menurun yaitu sebesar 2,31%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,44%. Kemudian, NPL KKB dan multiguna masing-masing sebesar 2,63% dan 1,36%. Secara umum terjadi penurunan risiko yang masih berada di bawah *threshold*, sehingga kinerja kredit yang disalurkan kepada rumah tangga sangat potensial untuk dibiayai dalam rangka meningkatkan peran intermediasi perbankan. (GRAFIK 4.14)

Grafik 4.13. Pertumbuhan KPR per Tipe



Grafik 4.14. Perkembangan NPL Sektor Rumah Tangga per Jenis Pengeluaran



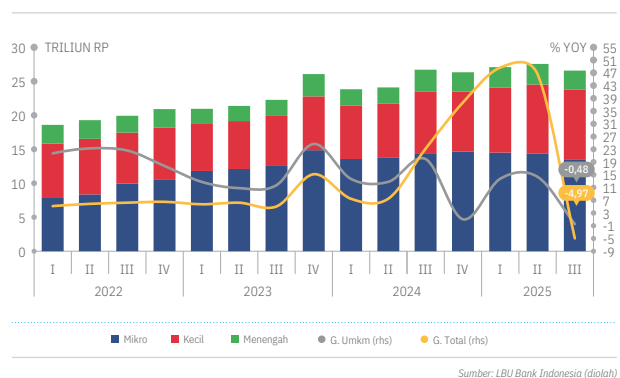
4.3 Perkembangan Kredit UMKM

Kredit UMKM Jambi pada triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp26,57 triliun, berkontraksi sebesar 0,48% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,34% (yoy) (GRAFIK 4.15). Perbankan masih mengedepankan pendampingan untuk membantu UMKM dalam meningkatkan literasi keuangan sehingga para pelaku usaha diharapkan dapat memahami manajemen keuangan serta mengelola keuangan yang lebih baik. Kontak juga menyampaikan bahwa ke depan perbankan memperkirakan pertumbuhan kredit akan dipengaruhi oleh pertumbuhan digitalisasi pembayaran sebab akses penyaluran kredit akan semakin mudah dan juga implementasi pembiayaan hijau.

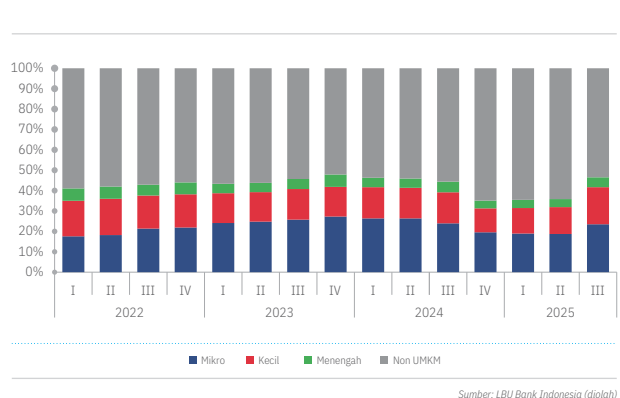
Pada triwulan III 2025 porsi kredit UMKM di Provinsi Jambi menjadi 46,54%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 35,86%.

Sementara itu, menurut jenis penggunaannya, kredit UMKM mayoritas digunakan untuk investasi sebesar Rp14,20 triliun (pangsa 53,46% terhadap total kredit UMKM) dan sisanya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional berupa modal kerja sebesar Rp12,36 triliun (pangsa 46,54% terhadap total kredit UMKM). Distribusi penggunaan kredit tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Provinsi Jambi

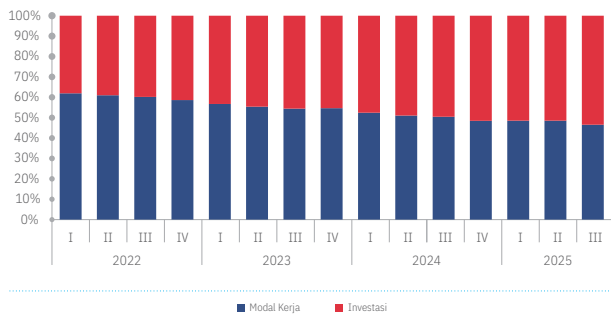
Grafik 4.15. Perkembangan Kredit UMKM Bank Umum Provinsi Jambi



Grafik 4.16. Pangsa Kredit Bank Umum Menurut Jenis Kredit UMKM

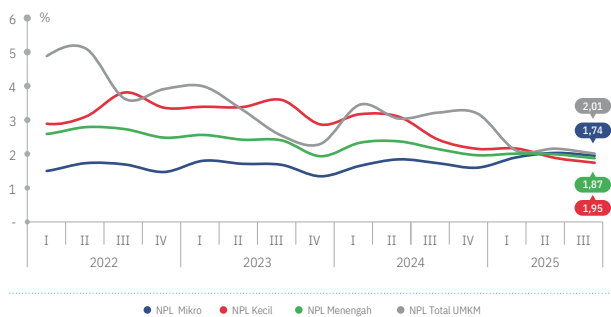


Grafik 4.17. Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: LBU Bank Indonesia (diolah)

Grafik 4.19. NPL UMKM Provinsi Jambi



Sumber: LBU Bank Indonesia (diolah)

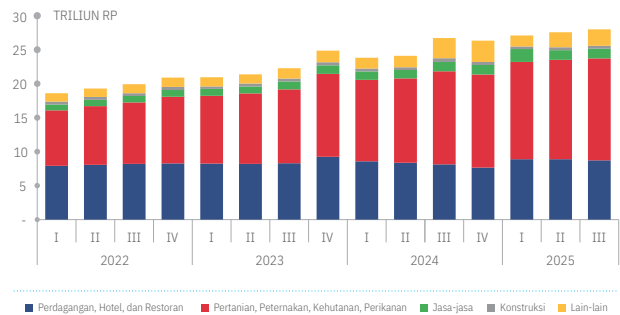
mengandalkan kredit untuk rencana pengembangan usaha atau ekspansi bisnis yang tercermin pada pangsa kredit investasi (GRAFIK 4.17).

Secara sektoral, sebagian besar kredit UMKM di triwulan III 2025 disalurkan untuk sektor pertanian (pangsa 53,57%) dan sektor perdagangan (pangsa 31,20%). Kondisi tersebut sejalan dengan struktur UMKM di Provinsi Jambi yang mayoritas berada di sektor pertanian serta sektor perdagangan dan eceran (GRAFIK 4.18).

Kredit UMKM sektor pertanian pada triwulan III 2025 sebesar Rp14,99 triliun, tumbuh sebesar 20,83% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 21,98% (yoy). Kredit UMKM sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar Rp8,73 triliun atau tumbuh sebesar 4,36% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,64% (yoy).

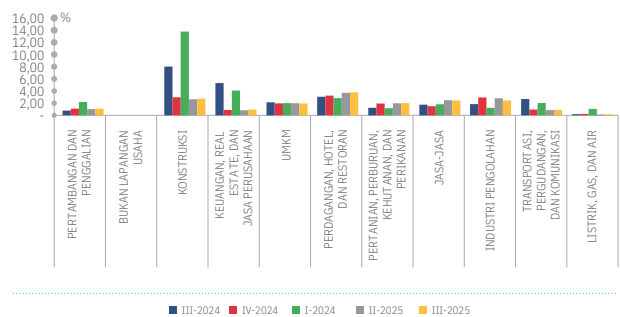
Rasio NPL UMKM terpantau menurun atau sebesar 1,87% (*gross*) pada triwulan laporan, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,99% (*gross*) (GRAFIK 4.19). Langkah-langkah lanjutan untuk menjaga risiko kredit senantiasa berada pada *threshold* tetap dilakukan. Secara umum, apabila dilihat secara sektoral, kenaikan risiko NPL pada triwulan laporan didorong oleh kenaikan rasio NPL hampir di beberapa lapangan usaha (GRAFIK 4.20).

Grafik 4.18. Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi



Sumber: LBU Bank Indonesia (diolah)

Grafik 4.20. NPL UMKM Menurut Sektor Ekonomi



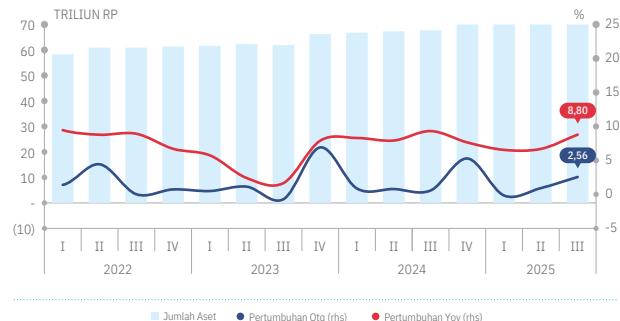
Sumber: LBU Bank Indonesia (diolah)

4.4 Perkembangan Bank Umum

4.4.1 Perkembangan Aset Bank

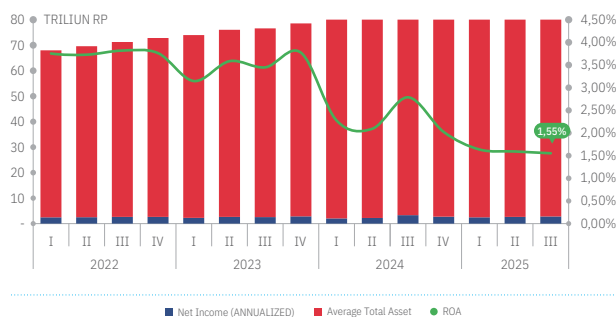
Aset perbankan pada triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp73,66 triliun atau tumbuh sebesar 8,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,69% (yoy) (GRAFIK 4.21). Dari sisi pendapatan, kemampuan perbankan di Jambi untuk mencetak laba dari aset, yang ditunjukkan oleh nilai *Return on Assets* (ROA), pada triwulan III 2025 sebesar 1,55% (*annualized*), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,59% (*annualized*). Sementara itu, *average total asset* perbankan tercatat meningkat dari Rp166,16 triliun menjadi Rp182,25 triliun pada triwulan laporan (GRAFIK 4.22).

Grafik 4.21. Perkembangan Aset Bank Umum



Sumber: LBU Bank Indonesia (diolah)

Grafik 4. 22. Return on Asset



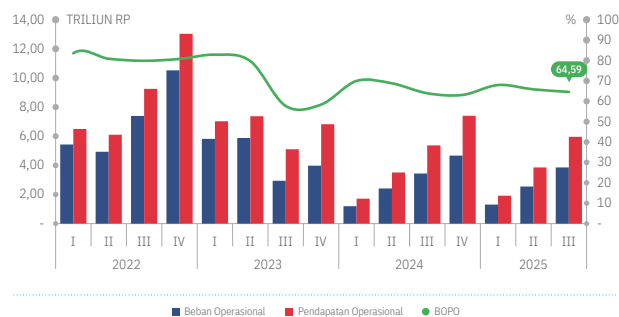
Sumber: LBU Bank Indonesia (diolah)

Sementara itu, kinerja perbankan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan rasio BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. BOPO pada triwulan III 2025 sebesar 64,59% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan II 2025 sebesar 65,84% (yoy). Hal ini didorong oleh peningkatan pendapatan operasional yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan beban operasional. Semakin rendah nilai rasio BOPO, maka semakin baik kinerja perusahaan (GRAFIK 4.23).

4.4.2 Perkembangan Dana Masyarakat

Pada triwulan laporan, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan mencapai Rp50,96 triliun atau tumbuh sebesar 12,46% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,47% (yoy). Pertumbuhan DPK disebabkan oleh pertumbuhan giro, deposito, dan tabungan yang tumbuh masing-masing sebesar 21,71% (yoy), 13,05% (yoy), dan 9,55% (yoy).

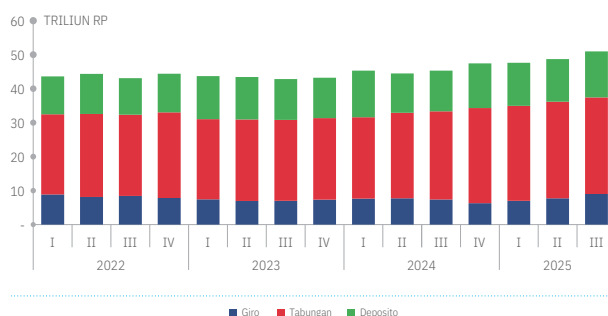
Grafik 4. 23. BOPO



Sumber: LBU Bank Indonesia (diolah)

Berdasarkan pangsanya, dana pihak ketiga pada triwulan laporan masih didominasi tabungan sebesar 58,37%, deposito sebesar 25,74%, serta giro sebesar 15,89%. Komposisi DPK ini cenderung tidak mengalami perubahan sepanjang 5 (lima) tahun terakhir. (GRAFIK 4.24).

Grafik 4. 24. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum



Sumber: LBU Bank Indonesia (diolah)

Tabel 4.1. Penghimpunan Dana Bank Umum Provinsi Jambi (Rp Juta)

Uraian	2024		2025		
	III	IV	I	II	III
BANK KONVENSIONAL	41.244.907,11	42.819.860,10	42.217.035,36	44.079.262,25	45.430.983,09
1.Giro	6.875.400,44	5.873.169,57	6.552.822,60	7.295.236,52	8.449.042,69
2.Tabungan	23.478.501,76	25.340.878,91	25.382.250,10	25.817.912,63	25.665.092,94
3.Simpanan Berjangka	10.891.004,91	11.605.811,62	10.281.962,67	10.966.113,10	11.316.847,46
BANK SYARIAH	4.072.636,73	4.636.917,06	5.378.471,66	4.630.777,61	5.533.072,39
1.Giro	517.952,06	421.196,87	445.520,53	445.613,76	549.077,81
2.Tabungan	2.471.330,52	2.636.072,19	2.546.477,00	2.614.484,37	2.763.711,07
3.Simpanan Berjangka	1.083.354,15	1.579.648,00	2.386.474,13	1.570.679,48	2.220.283,51
JUMLAH	45.317.543,85	47.456.777,17	47.595.507,03	48.710.039,86	50.964.055,47
1.Giro	7.393.352,50	6.294.366,45	6.998.343,13	7.740.850,28	8.998.120,50
2.Tabungan	25.949.832,28	27.976.951,10	27.928.727,10	28.432.396,99	28.428.804,01
3.Simpanan Berjangka	11.974.359,07	13.185.459,62	12.668.436,80	12.536.792,58	13.537.130,97

Sumber: LBU Bank Indonesia

Berdasarkan kelompok bank, penghimpunan DPK mayoritas berasal dari bank konvensional yang mencapai Rp 45,43 triliun (pangsa 89,14%) yang kemudian diikuti oleh bank syariah Rp5,53 triliun (pangsa 10,86%) (TABEL 4.1).

Berdasarkan golongan pemilik, DPK utamanya dipengaruhi oleh penghimpunan dana dari Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank serta Pemerintah Daerah. Namun, golongan pemilik perseorangan memiliki andil terbesar dalam penghimpunan dana. DPK perseorangan masih memberikan sumbangan terbesar yaitu 67,22%. DPK perseorangan terpantau tumbuh sebesar 7,26% (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,76% (yoy). (TABEL 4.2).

Berdasarkan lokasi kab/kota, pertumbuhan DPK dengan sumbangan terbesar berada di Kota Jambi. Daerah dengan

pertumbuhan paling tinggi adalah Kab. Muaro Jambi dengan pertumbuhan sebesar 44,15% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 8,52% (yoy) (TABEL 4.3).

4.4.3 Perkembangan Kredit/Penyaluran Dana

Menurut jenis penggunaan, kredit terbesar adalah kredit investasi dengan pangsa sebesar 37,17%, diikuti oleh kredit konsumsi (34,38%) dan kredit modal kerja (28,46%). Pada triwulan III 2025 kredit investasi tercatat sebesar Rp28,97 triliun atau tumbuh sebesar 92,30% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 93,83% (yoy). Kredit konsumsi pada triwulan III 2025 mencapai Rp26,80 triliun, tumbuh sebesar 17,91% (yoy). Selanjutnya, kredit modal kerja pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp22,18 triliun atau tumbuh sebesar 40,27% (yoy).

Tabel 4.2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Golongan Pemilik (Rp Juta)

Golongan Pemilik	II 2025				III 2025			
	Nominal	Share	Yoy	Andil	Nominal	Share	Yoy	Andil
Penduduk / Residents	48.678.379	99,94%	9,44%	9,43%	50.945.392	99,96%	12,48%	12,47%
Pemerintah Pusat	322.074	0,66%	16,41%	0,10%	616.950	1,21%	49,95%	0,45%
Pemerintah Daerah (Pemda)	2.703.303	5,55%	-5,79%	-0,37%	3.596.080	7,06%	29,95%	1,83%
Badan Dan Lembaga Pemerintah	21.315	0,04%	-92,76%	-0,61%	21.493	0,04%	-91,85%	-0,53%
BUMN Atau Pemerintah Campuran	205.104	0,42%	15,81%	0,06%	2.721.307	5,34%	312,53%	4,55%
BUMD	273.535	0,56%	44,61%	0,19%	193.128	0,38%	10,73%	0,04%
Lembaga Keuangan Non Bank	1.540.631	3,16%	69,77%	1,42%	1.143.419	2,24%	34,40%	0,65%
Bukan Lembaga Keuangan	9.408.962	19,32%	13,07%	2,44%	8.396.293	16,47%	2,04%	0,37%
Sektor Swasta Lainnya	2.912	0,01%	82039,58%	0,01%	51	0,00%	88,04%	0,00%
Perseorangan	34.200.543	70,21%	8,76%	6,19%	34.256.671	67,22%	7,26%	5,11%
Bukan Penduduk / Non Residents	31.661	0,06%	99,00%	0,05%	18.663	0,04%	-19,94%	-0,01%
Penduduk dan Bukan Penduduk	48.710.040	100%	9,47%	9,48%	50.964.055	100%	12,46%	12,46%

Sumber: LBU Bank Indonesia

Tabel 4.3. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Lokasi Bank (Rp Juta)

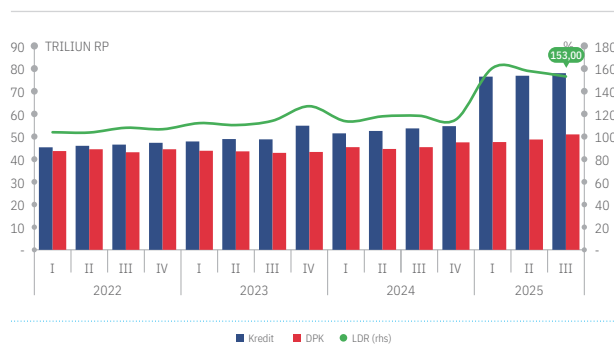
Kota/ Kabupaten	II 2025			III 2025		
	Nominal	Share	Yoy(%)	Nominal	Share	Yoy(%)
Kota Jambi	34.756.460,01	73,10	10,17	35.793.247,54	72,55	11,52
Kab. Kerinci	935.284,07	1,97	(57,23)	585.865,47	1,19	(72,84)
Kab. Bungo	2.966.626,78	6,24	13,66	3.150.024,75	6,38	17,67
Tanjung Jabung Barat	2.453.975,72	5,16	5,93	2.702.045,27	5,48	8,21
Kab. Merangin	1.910.028,97	4,02	21,51	2.084.843,80	4,23	20,55
Kab. Batanghari	1.559.083,64	3,28	7,28	1.554.513,97	3,15	10,12
Kab. Sarolangun	1.042.074,74	2,19	11,51	1.169.312,09	2,37	22,65
Kab. Tebo	1.149.989,56	2,42	10,37	1.185.464,34	2,40	19,01
Tanjung Jabung Timur	366.098,77	0,77	(5,94)	493.182,01	1,00	33,67
Kab. Muaro Jambi	406.267,71	0,85	(8,52)	619.983,84	1,26	44,15
JUMLAH	47.545.890	100,00	6,85	49.338.483	100,00	8,87

Sumber: LBU Bank Indonesia

Selanjutnya, *Loan to Deposits Ratio* (LDR) pada triwulan laporan sebesar 153,00 atau tumbuh sebesar 34,67% (yoy). Penurunan LDR ini sejalan dengan peningkatan DPK tercatat Rp50,96 triliun atau tumbuh sebesar 12,46% (yoy). LDR digunakan untuk mengukur kemampuan memenuhi kewajiban keuangannya. Semakin tinggi tingkat rasio LDR, hal ini menunjukkan maka semakin rendah tingkat likuiditas (GRAFIK 4.25).

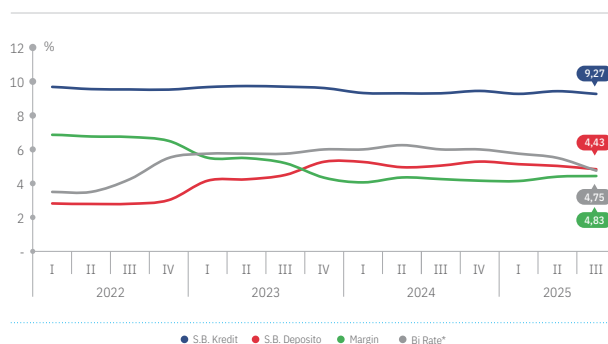
LDR bank umum yang melebihi 100% tersebut mengindikasikan relatif tingginya sumber pendanaan kredit/pembiayaan yang berasal dari perbankan di luar Provinsi Jambi. Hal tersebut utamanya diakibatkan oleh beberapa pembiayaan proyek besar merupakan kewenangan kantor pusat bank.

Grafik 4. 25. Perkembangan Loan to Deposit (LDR) Bank Umum Provinsi Jambi



Sumber: LBU Bank Indonesia (diolah)

Grafik 4. 26. Suku Bunga Rata-Rata Tertimbang Kredit dan Deposito Bank Umum di Provinsi Jambi



Sumber: LBU Bank Indonesia (diolah)

Tabel 4.4. Perkembangan Kredit Bank Umum Provinsi Jambi (Rp Juta)

Uraian	2024		2025		
	III	IV	I	II	III
KELOMPOK BANK	53.623.044	54.593.550	76.415.701	76.859.988	77.235.481
Bank Swasta*)	47.499.188	48.321.484	69.873.853	70.152.708	70.152.708
Bank Syariah	6.123.856	6.272.066	6.541.848	6.707.280	7.082.772
JENIS PENGGUNAAN	53.623.044	54.593.550	76.415.701	76.859.988	77.975.081
Modal Kerja	15.819.493	15.808.497	22.460.337	22.463.213	22.189.961
Investasi	15.070.367	15.694.999	27.937.509	28.075.082	28.979.981
Konsumsi	22.733.184	23.090.053	26.017.855	26.321.693	26.805.139
SEKTOR EKONOMI	53.623.044	54.593.550	76.415.701	76.859.988	77.975.081
Pertanian Peternakan Kehutanan dan Perikanan	15.097.698	15.356.444	17.759.847	18.386.167	18.779.554
Pertambangan dan Penggalian	154.248	141.846	880.476	466.444	589.638
Industri	2.519.203	2.633.147	6.074.166	5.905.014	5.616.654
LGA	24.479	17.818	10.704.039	10.551.878	10.810.867
Konstruksi	932.317	1.000.272	1.286.225	1.364.290	1.498.930
Perdagangan Hotel dan Restoran	9.683.086	9.890.786	10.968.636	11.029.799	10.954.970
Pengangkutan dan Komunikasi	440.665	454.467	456.245	516.401	572.214
Keuangan, Real estate dan Jasa Perusahaan	645.558	669.291	744.991	812.517	858.305
Jasa-jasa	1.392.589	1.339.409	1.505.838	1.466.410	1.453.972
Bukan Lapangan Usaha	22.733.202	23.090.070	26.035.239	26.361.068	26.839.976

Sumber: LBU Bank Indonesia

Berdasarkan *liaison* yang dilakukan KPw BI Provinsi Jambi, suku bunga kredit tersebut dirasa masih wajar, namun untuk kredit UMKM masih terlalu tinggi. Hal tersebut juga menjadi terasa lebih memberatkan bagi UMKM masa pemulihan ekonomi pasca

pandemi. Pelaku usaha berharap tingkat suku bunga kredit dapat menurun dalam rangka pendukung perkembangan sektor usaha yang lebih cepat.

Tabel 4.5. Perkembangan *Non-Performing Loan* (NPL) Gross Bank Umum di Provinsi Jambi

Sektor Ekonomi	II 2025			III 2025		
	Nominal	Share	Yoy(%)	Nominal	Share	Yoy(%)
Pertanian Peternakan Kehutanan dan Perikanan	18.386.167,11	170.827,07	0,93	18.779.553,58	173.051,47	0,92
Pertambangan dan Penggalian	466.443,64	1.784,74	0,38	589.638,47	1.506,85	0,26
Industri	5.905.013,93	16.958,63	0,29	5.616.654,11	15.209,49	0,27
LGA	10.551.878,39	257,07	0,00	10.810.867,36	3.738,47	0,03
Konstruksi	1.364.290,50	79.804,84	5,85	1.498.929,89	80.643,70	5,38
Perdagangan Hotel dan Restoran	11.029.798,70	264.306,84	2,40	10.954.969,69	266.205,14	2,43
Pengangkutan dan Komunikasi	516.401,08	7.929,00	1,54	572.214,25	9.136,89	1,60
Keuangan, Real estate dan Jasa Perusahaan	812.517,36	25.684,45	3,16	858.305,43	22.128,95	2,58
Jasa-jasa	1.466.409,67	29.527,67	2,01	1.453.971,52	29.285,11	2,01
Bukan Lapangan Usaha	26.361.067,97	525.976,06	2,00	26.839.976,31	548.691,01	2,04
JUMLAH	76.859.988	1.123.056	1,46	77.975.081	1.149.597	1,47

Sumber: LBU Bank Indonesia



05.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



“

Permintaan uang kartal meningkat pada triwulan III 2025 tercermin dari peningkatan *net outflow* yang dampak dari kebijakan pemerintah terkait dengan pemblokiran rekening tidak aktif (*dormant*).

Permintaan uang kartal meningkat pada triwulan III 2025 tercermin dari peningkatan *net outflow* yang disebabkan masuknya masa tahun ajaran baru sekolah dan Perguruan Tinggi serta dampak dari kebijakan pemerintah terkait dengan pemblokiran rekening yang tidak aktif (*dormant*) sehingga memicu penarikan dana tunai oleh masyarakat.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Bank Indonesia memiliki mandat untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang memiliki tiga dimensi yaitu stabilitas, pertumbuhan, dan inklusi. Sistem pembayaran yang cepat, mudah, aman dan handal diperlukan untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggung-jawabkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter yang efektif dan efisien.

Perkembangan pembayaran tunai di Provinsi Jambi pada triwulan III 2025 mengalami *net outflow* sebesar Rp1,78 triliun dan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya *net outflow* mengalami kenaikan sebesar 181,17%. Peningkatan *cash outflow* dan penurunan *cash inflow* dimaksud sejalan dengan masuknya masa tahun ajaran baru sekolah dan Perguruan Tinggi serta dampak dari kebijakan pemerintah terkait dengan pemblokiran rekening (*dormant*) sehingga memicu penarikan dana tunai oleh masyarakat. Di sisi sistem pembayaran nontunai, nilai kliring dan volume kliring di Provinsi Jambi pada triwulan III 2025 berkontraksi masing-masing sebesar 7,86% (yoy) dan 8,27% (yoy). Secara triwulanan, pada triwulan III 2025 nilai dan volume transaksi kliring mengalami peningkatan masing-masing sebesar 7,23% (qto) dan 9,31% (qto). Nilai RTGS mengalami penurunan sebesar 36,80% (yoy) dibandingkan periode yang sama Tahun sebelumnya, secara triwulanan nilai RTGS mengalami peningkatan sebesar 4,05% (qto). Sementara volume RTGS mengalami peningkatan masing-masing sebesar 9,33% (yoy) dan 16,369% (qto) (TABEL 5.1).

Dalam rangka perluasan penggunaan nontunai, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi juga mengadakan edukasi Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) secara berkala kepada masyarakat luas, baik dari kalangan pelajar/mahasiswa, ibu rumah tangga dan angkatan bekerja. Seiring dengan kemajuan teknologi, Bank Indonesia telah meluncurkan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 sebagai salah satu upaya dalam mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital. Integrasi ekonomi dan keuangan digital di daerah dilakukan melalui program elektronifikasi yang mencakup Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD),

Elektronifikasi Bantuan Sosial Nontunai, Elektronifikasi Transportasi, Elektronifikasi Jalan Tol dan Elektronifikasi Destinasi Wisata.

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi bersama Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya telah membentuk sebanyak 12 (dua belas) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi sebagai berikut: Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Merangin, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batang Hari, Kota Jambi, dan Kabupaten Bungo. Berdasarkan hasil Indeks ETPD Semester I Tahun 2025, seluruh TP2DD di wilayah kerja Provinsi Jambi berhasil mempertahankan transaksi pemerintah daerah dalam kategori Tahap Digital dengan tren indeks yang meningkat.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi melakukan *monitoring* dan evaluasi nontunai pada penyaluran bantuan sosial nontunai, serta edukasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Pada ETPD, implementasi non tunai dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Bank pemegang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui penambahan kanal pembayaran non tunai dan edukasi kepada masyarakat dan ASN untuk melakukan transaksi pemerintah menggunakan kanal non tunai, serta bekerja sama dengan perbankan untuk memfasilitasi pelaksanaan elektronifikasi transaksi keuangan Pemda.

Selain itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi juga mendorong digitalisasi sektor transportasi dan elektronifikasi destinasi wisata dengan penyediaan layanan pembayaran non tunai untuk pembelian tiket masuk kawasan wisata dan digitalisasi UMKM di kawasan wisata. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi turut mendukung terselenggaranya pembayaran digital pada jalan tol di Provinsi Jambi, yaitu di Jalan Tol Betung – Tempino Seksi 3 Bayung Lencir – Tempino (secara resmi mulai beroperasi 16 Oktober 2024) dan Jalan Tol Tempino-Jambi Seksi 4 Tempino-Ness (secara resmi mulai beroperasi 14 September 2025), melalui fasilitasi koordinasi antara pengelola jalan tol dan perbankan di Provinsi Jambi, serta koordinasi pelayanan penyediaan Kartu Uang Elektronik (UE) dengan perbankan sehingga infrastruktur pendukung pembayaran digital dapat berjalan secara maksimal untuk mendukung pemanfaatan jalan tol oleh masyarakat. Seluruh kegiatan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan tingkat inklusi keuangan dan menciptakan *less cash society* di Provinsi Jambi. Implementasi elektronifikasi merupakan upaya mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi nontunai yang mudah, aman, praktis, nyaman, dan efisien.

Tabel 5.1. Perkembangan Sistem Pembayaran melalui KPwBI Provinsi Jambi

Indikator	2024		2025		
	III	IV	I	II	III
NON TUNAI					
KLIRING					
Nilai Kliring (juta Rp)	744.703	746.666	675.008	639.929	686.190
Δ Nominal (yoy)	(54.028)	(62.004)	(86.543)	(89.591)	(58.513)
Δ % (yoy)	-6,76%	-7,67%	-11,36%	-12,28%	-7,86%
Δ Nominal (qtq)	15.182	1.963	(71.658)	(35.079)	46.261
Δ % (qtq)	2,08%	0,26%	-9,60%	-5,20%	7,23%
Volume Kliring (lembar warkat)	13.730	13.545	11.985	11.522	12.595
Δ Nominal (yoy)	(2.216)	(1.878)	(2.055)	(1.637)	(1.135)
Δ % (yoy)	-13,90%	-12,18%	-14,64%	-12,44%	-8,27%
Δ Nominal (qtq)	571	(185)	(1.560)	(463)	1.073
Δ % (qtq)	4,34%	-1,35%	-11,52%	-3,86%	9,31%
CEK DAN BIRO GILYET KOSONG					
Nominal (juta Rp)	12.722	11.745	13.097	11.301	15.215
Δ Nominal (yoy)	(6.683)	(21.928)	(2.608)	(2.768)	2.493
Δ % (yoy)	-34,44%	-65,12%	-16,61%	-19,67%	19,60%
Δ Nominal (qtq)	(1.346)	(978)	1.353	(1.796)	3.914
Δ % (qtq)	-9,57%	-7,69%	11,52%	-13,71%	34,63%
Lembar	227	225	262	234	246
Δ Nominal (yoy)	(118)	(209)	(47)	(45)	19
Δ % (yoy)	-34,20%	-48,16%	-15,21%	-16,13%	8,37%
Δ Nominal (qtq)	(52)	(2)	37	(28)	12
Δ % (qtq)	-18,64%	-0,88%	16,44%	-10,69%	5,13%
RTGS					
Nilai RTGS (miliar Rp)	35.268.004	29.271.516	35.663.924	21.420.726	22.287.621
Δ Nominal (yoy)	8.195.067	393.840	5.543.229	(613.791)	(12.980.383)
Δ % (yoy)	30,27%	1,36%	18,40%	-2,79%	-36,80%
Δ Nominal (qtq)	13.233.487	(5.996.487)	6.392.408	(14.243.198)	866.895
Δ % (qtq)	60,06%	-17,00%	21,84%	-39,94%	4,05%
Volume RTGS (lembar warkat)	11.670	13.915	11.514	10.965	12.759
Δ Nominal (yoy)	(107)	1.726	1.391	641	1.089
Δ % (yoy)	-0,91%	14,16%	13,74%	6,21%	9,33%
Δ Nominal (qtq)	1.346	2.245	(2.401)	(549)	1.794
Δ % (qtq)	13,04%	19,24%	-17,25%	-4,77%	16,36%
TUNAI					
NET INFLOWS/OUTFLOWS (JUTA RP)					
Aliran Uang Masuk/Inflows (juta Rp)	1.308.513	719.890	1.690.353	2.100.623	834.754
Δ Nominal (yoy)	(162.359)	(423.570)	(714.454)	51.626	(473.759)
Δ % (yoy)	-11,04%	-37,04%	-29,71%	2,52%	-36,21%
Δ Nominal (qtq)	(740.484)	(588.623)	970.463	410.270	(1.265.869)
Δ % (qtq)	-36,14%	-44,98%	134,81%	24,27%	-60,26%
Aliran Uang Keluar/Outflows (juta Rp)	1.941.113	2.989.310	2.076.513	1.687.809	2.613.457
Δ Nominal (yoy)	606.734	(232.669)	1.026.347	(1.047.144)	672.344
Δ % (yoy)	45,47%	-7,22%	97,73%	-38,29%	34,64%
Δ Nominal (qtq)	(793.840)	1.048.197	(912.797)	(388.704)	925.648
Δ % (qtq)	-29%	54%	-31%	-19%	55%

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

Sejalan dengan implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi juga memfasilitasi pendaftaran *merchant* untuk memperoleh *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) kepada Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Per September 2025 terdapat 413.130 *merchant* tersebar di berbagai Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi yang telah memiliki QRIS. Jumlah ini naik sebesar 6,59% dibandingkan dengan triwulan II 2025. Sementara untuk jumlah user QRIS sebanyak 603.823 user atau naik sebesar 1,69% dibandingkan dengan triwulan II 2025. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan dapat memperluas digitalisasi sistem pembayaran sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

5.1 Perkembangan Transaksi Tunai dan Nontunai

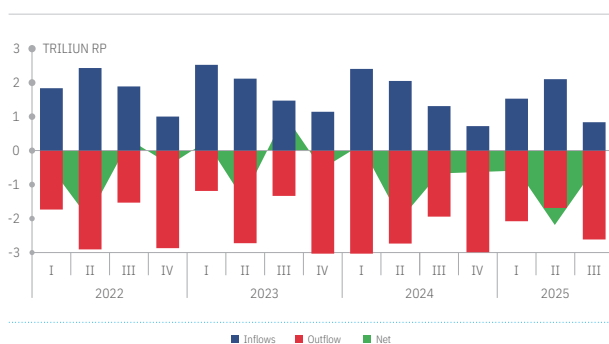
Perkembangan sistem pembayaran di Provinsi Jambi tercermin dari jumlah transaksi tunai dan non tunai. Transaksi tunai terdiri atas aliran uang masuk dari perbankan ke Bank Indonesia (*inflow*) dan aliran uang keluar dari Bank Indonesia ke perbankan (*outflow*).

Sedangkan transaksi nontunai Provinsi Jambi terdiri atas transaksi yang menggunakan infrastruktur Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan *BI-Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Transaksi pembayaran nontunai dapat dilakukan menggunakan instrumen pembayaran berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE).

5.1.1 Perkembangan Transaksi Tunai

Transaksi tunai di Provinsi Jambi pada triwulan III 2025 menunjukkan *net outflow* sebesar Rp1,78 triliun. Total aliran uang kartal yang masuk KPwBI Provinsi Jambi pada triwulan III 2025 sebesar Rp834 miliar, sementara total aliran uang kartal yang diedarkan sebesar Rp2,61 triliun (GRAFIK 5.1). Hal ini sejalan dengan masuknya masa tahun ajaran baru sekolah dan Perguruan Tinggi serta dampak dari kebijakan pemerintah terkait dengan pemblokiran rekening (*dormant*) sehingga memicu penarikan dana tunai oleh masyarakat.

Grafik 5.1. *Inflows, Outflows dan Netflows di Provinsi Jambi*



Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

Aliran kas masuk dan keluar di Provinsi Jambi merupakan aliran kas dari transaksi tarikan dan setoran bank melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi maupun yang ditransaksikan melalui Kas Titipan Bank Indonesia di Muara Bungo dan Kuala Tungkal dengan jumlah *outflow* selama triwulan III 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan *outflow* pada triwulan II 2025 yang mencapai Rp2,61 triliun. Sedangkan dari sisi *inflow*, pada triwulan III 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan *inflow* triwulan sebelumnya yang mencapai Rp834 miliar.

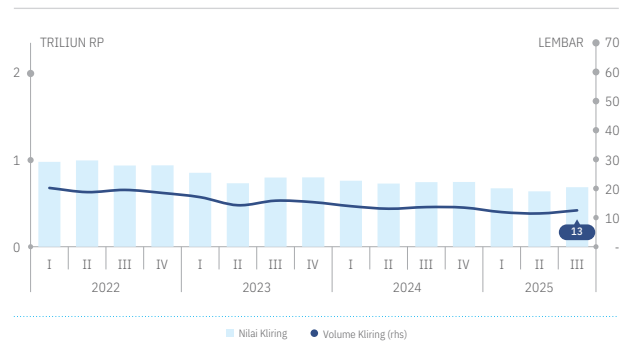
5.1.2 Perkembangan Transaksi Nontunai

Nilai dan volume kliring di Provinsi Jambi pada triwulan III 2025 terkontraksi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar 7,86% (yoy) dan 8,27% (yoy). Secara triwulanan, nilai dan volume kliring pada triwulan III 2025 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 7,23% (qtq) dan 9,31% (qtq). Volume dan nilai kliring dimaksud telah memperhitungkan pertukaran warkat debit yang dikelola oleh Koordinator Pertukaran Warkat Debet (KPWD) di Kabupaten Muara Bungo yang dikelola oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Muara Bungo. (GRAFIK 5.2).

Tren transaksi kliring dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya pilihan instrumen pembayaran digital sehingga penggunaan instrumen pembayaran Cek dan Giro oleh individu maupun korporasi semakin menurun.

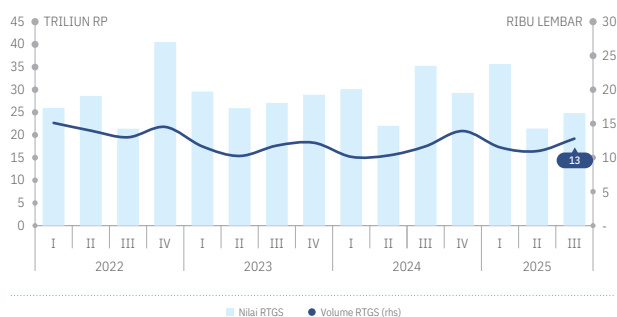
Nilai RTGS di Provinsi Jambi pada triwulan III 2025 mengalami penurunan dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 29,59% (yoy). Secara triwulanan, nilai RTGS di Provinsi Jambi pada triwulan III 2025 mengalami peningkatan sebesar 15,93% (qtq). Sementara volume RTGS mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan secara triwulanan masing-masing sebesar 9,64% (yoy) dan 16,69% (qtq). Perkembangan transaksi RTGS di Provinsi Jambi ditunjukkan pada (GRAFIK 5.3).

Grafik 5.2. *Perkembangan Volume dan Nilai Kliring di Provinsi Jambi*

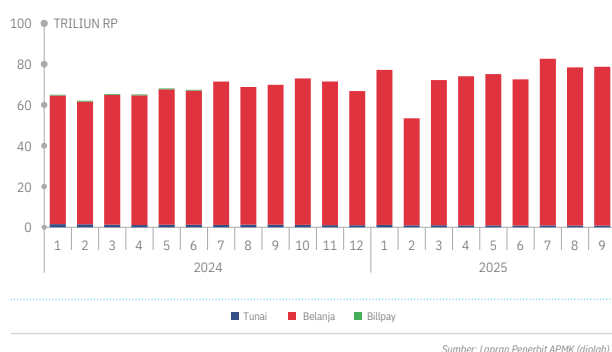


Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

Grafik 5.3 Perkembangan Volume dan Nilai RTGS di Provinsi Jambi



Grafik 5.5 Perkembangan Transaksi Kartu Kredit

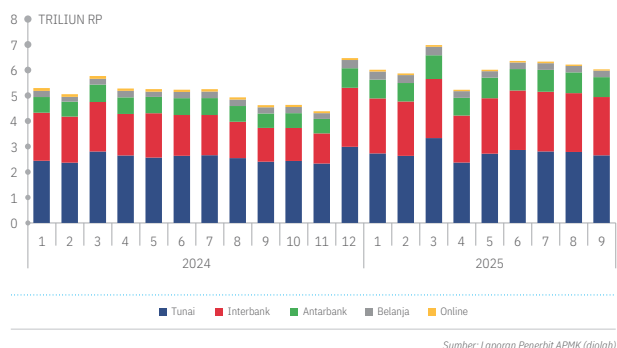


Penurunan nilai RTGS ini diindikasikan terjadi karena adanya pergeseran preferensi masyarakat untuk menggunakan BI FAST sebagai infrastruktur sistem pembayaran ritel yang lebih efisien, aman, dan *realtime*.

Di Provinsi Jambi, penggunaan kartu ATM dan/atau kartu debit cenderung lebih banyak digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan pemindahbukuan (GRAFIK 5.4). Sementara penggunaan kartu kredit mayoritas digunakan untuk belanja (GRAFIK 5.4).

Sementara pada instrumen UE, tren peningkatan baik dari sisi jumlah maupun nominal masih terus terjadi (GRAFIK 5.6). Hal ini didorong oleh meluasnya ekosistem penggunaan uang elektronik *chip based* di provinsi jambi pasca diresmikannya Jalan Tol BALENO sebagai Jalan Tol pertama di Provinsi Jambi tanggal 17 Oktober 2024 serta meluasnya ekosistem penggunaan UE *chip based* pada sektor parkir. Meningkatnya penggunaan instrumen UE mengindikasikan bahwa minat masyarakat untuk menggunakan sistem pembayaran non tunai semakin tinggi.

Grafik 5.4 Perkembangan Transaksi Kartu ATM dan/atau Kartu Debit



Grafik 5.6. Perkembangan Transaksi Uang Elektronik



5.2 Penyediaan Uang Layak Edar

Dalam rangka memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar atau mendorong *clean money policy*, Bank Indonesia aktif melakukan layanan kas baik di dalam kantor (layanan penukaran) maupun di luar kantor (layanan kas keliling).

Layanan kas bagi masyarakat di luar kantor berupa layanan kas keliling di dalam kota dan di luar kota dilakukan dengan target lokasi di pasar tradisional/modern dan pusat-pusat keramaian lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang Rupiah layak edar. Seluruh kegiatan dimaksud diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan kualitas uang Rupiah yang beredar di Provinsi Jambi.

Layanan kas bagi masyarakat untuk melayani penukaran uang rusak, uang cacat, serta uang yang sudah dicabut dari peredaran melalui loket Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi diberlakukan setiap hari Kamis. Selain itu, kegiatan penukaran juga dilakukan dengan melibatkan perbankan di wilayah kerja dengan menghimbau seluruh bank untuk membuka loket penukaran. Selama triwulan III 2025 telah dilakukan layanan kas keliling sebanyak 6 (enam) kali dan layanan penukaran uang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali.

Tabel 5.2. Kas Keliling dan Penukaran Uang Tidak Layak Edar di Provinsi Jambi Tw III Tahun 2025

Bulan	Pelaksanaan	
	Kas Keliling	Penukaran
Juli	3	10
Agustus	0	8
September	3	9

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

Selain melalui pelaksanaan kas keliling dan penukaran uang rusak, uang cacat, serta uang yang sudah dicabut dari peredaran, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi membuka layanan penukaran uang melalui Kas Titipan di Muara Bungo dan Kuala Tungkal. Kas Titipan adalah kegiatan penyediaan uang Rupiah milik Bank Indonesia yang dititipkan ke salah satu kantor cabang bank (selaku bank pengelola) untuk mencukupi kebutuhan kas perbankan di wilayah tersebut. Adanya Kas Titipan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan uang seluruh lapisan masyarakat dengan kualitas uang yang lebih baik. Melalui Kas Titipan, Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang diserap oleh perbankan dapat disetorkan kepada Bank Pengelola Kas Titipan, dan selanjutnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi melakukan penarikan UTLE tersebut dan *dropping* Uang Layak Edar (ULE) kepada Bank Pengelola Kas Titipan. ULE di Bank Pengelola Kas Titipan akan diedarkan ke seluruh masyarakat melalui perbankan.

5.3 Perkembangan Temuan Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya

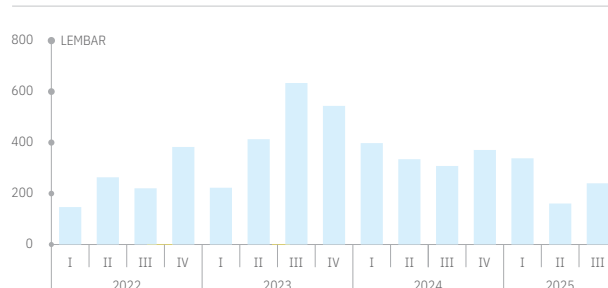
Sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki simbol-simbol kedaulatan yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh Warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara adalah mata uang Rupiah yang diatur dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pemalsuan uang Rupiah merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat serta dunia terhadap Rupiah, yang pada akhirnya dapat mengganggu kestabilan perekonomian. Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan pemantauan serta mengupayakan langkah-langkah pencegahan dan penanganan uang palsu.

Dalam rangka mempermudah pelaporan uang yang diragukan keasliannya oleh perbankan untuk dapat diklarifikasi lebih lanjut oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Bank Indonesia mengimplementasikan aplikasi Bank Indonesia *Counterfeit Analysis Center* (BI CAC). Melalui aplikasi dimaksud, bank dapat melakukan pelaporan secara online atas temuan uang yang diragukan keasliannya untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penyerahan fisik uang yang diragukan keasliannya ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Jumlah uang Rupiah yang diragukan keasliannya pada

triwulan III 2025 sebanyak 206 lembar, meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Sumber penerimaan uang Rupiah yang diragukan keasliannya dimaksud sebagian besar berasal dari nasabah temuan *teller* (164 lembar) dan sumber lain-lain (42 lembar). Hal ini mengindikasikan bahwa edukasi CBP yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi berhasil dalam meningkatkan pemahaman masyarakat untuk mengidentifikasi keaslian uang Rupiah (GRAFIK 5.7)

Dalam rangka penanggulangan peredaran uang Rupiah yang diragukan keasliannya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi secara berkesinambungan bekerja sama dengan instansi yang berwenang dalam mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan uang Rupiah. Sebagaimana ketentuan yang berlaku, uang Rupiah yang diragukan keasliannya akan diserahkan kepada Kepolisian Daerah Jambi untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Selain itu, sebagai upaya mencegah peredaran uang palsu, secara berkala dilakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah ke berbagai lapisan masyarakat secara intensif agar masyarakat dapat lebih cermat dalam mengenali uang Rupiah, termasuk juga sosialisasi cara memperlakukan uang Rupiah yang baik melalui 5 Jangan (Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Distapler, Jangan Diremas, dan Jangan Dibasahi), serta edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah.

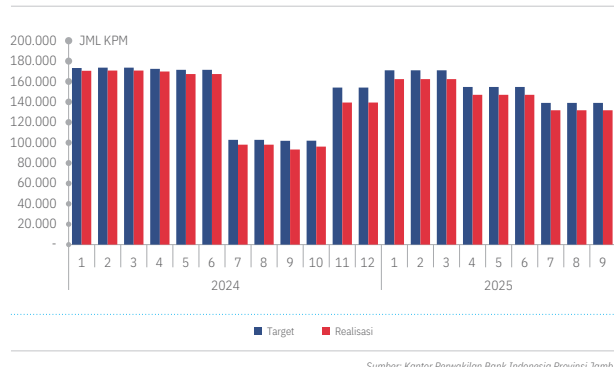
Grafik 5.7. Perkembangan Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya di Provinsi Jambi

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

5.4 Inklusi Keuangan dan Elektronifikasi

Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) adalah gerakan penggunaan alat pembayaran nontunai yang dicanangkan Bank Indonesia sejak tanggal 14 Agustus 2014. GNNT bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sekaligus meningkatkan penggunaan nontunai di kalangan masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga pemerintah sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih aktif dalam menggunakan nontunai di Indonesia. Dalam rangka mempercepat gerakan tersebut, Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran di Indonesia membentuk Program Elektronifikasi dan Inklusi Keuangan.

Grafik 5.8. Realisasi penyaluran Program Sembako di Provinsi Jambi



Program elektronifikasi merupakan upaya untuk mengubah cara bertransaksi di masyarakat yang semula menggunakan tunai menjadi nontunai. Program elektronifikasi diharapkan dapat memperluas akses keuangan, memperkuat kesehatan fiskal dan meningkatkan efisiensi ekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Inklusi Keuangan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan yang dihadapi masyarakat dalam menggunakan jasa-jasa keuangan. Inklusi Keuangan dinilai sebagai salah satu faktor penting dalam rangka menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan partisipasi masyarakat terhadap jasa keuangan formal yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Inklusi Keuangan juga masuk dalam agenda prioritas Pemerintah Pusat. Pada bulan Juni 2012, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Badan Kebijakan Fiskal mengeluarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Dalam strategi tersebut telah dicanangkan visi Inklusi Keuangan Indonesia, yaitu mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya stabilitas sistem keuangan.

Program inklusi keuangan yang turut didorong oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi adalah penyaluran Program Bantuan Sosial Non Tunai bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jambi, Dinas Sosial Kota Jambi, Dinas Sosial Kab. Muaro Jambi, Dinas Sosial Kab. Tanjung Jabung Timur, perbankan dan Kantor Pos di wilayah Provinsi Jambi. Salah satunya adalah Program Sembako, yaitu pengembangan dari program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dengan penambahan nominal bantuan dan jenis bahan pangan yang dapat dibelanjakan (sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan vitamin dan mineral). Selain Program

Sembako, terdapat juga Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu dengan peruntukan untuk pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar untuk lansia dan disabilitas. Penyaluran BSNT dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI dan BTN, serta BSI dengan memanfaatkan layanan perbankan seperti Agen Bank dan mesin ATM. Namun, bersamaan dengan penyaluran bantuan sosial secara non tunai, penyaluran bantuan sosial juga masih dilakukan secara tunai melalui PT Pos Indonesia.

Dalam rangka memastikan kelancaran penggunaan KKS, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi selaku otoritas sistem pembayaran bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan sosialisasi kepada KPM sehingga potensi kendala yang timbul atas penggunaan KKS dan mesin EDC di agen bank dapat dimitigasi sejak awal. Seluruh instansi yang terlibat dalam penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai berupaya melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan penyaluran dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat administrasi, dan tepat kualitas (6T).

Pada penyaluran Program Sembako, KPM diberikan pilihan dan kendali untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan mempertimbangkan pedoman gizi seimbang yaitu karbohidrat untuk memberikan tenaga bagi tubuh untuk melakukan kegiatan, protein hewani dan protein nabati untuk membangun dan memelihara sel dan jaringan tubuh, serta vitamin dan mineral untuk antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh. Diharapkan dalam jangka panjang pemenuhan gizi seimbang dapat mencegah terjadinya *stunting*. Bantuan tidak boleh digunakan untuk pembelian minyak, tepung terigu, gula pasir, MPASI pabrikan, mie instan, makanan kaleng, dan bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam bahan pangan yang diatur untuk Program Sembako.

Rerata penyaluran Program Sembako pada triwulan III 2025 sampai dengan September 2025 telah diberikan kepada 131.824 KPM (94,83% dari total target 139.006 KPM) sebagaimana ditunjukkan pada (GRAFIK 5.8). Jumlah KPM tersebut meningkat sebesar 29,37% (yoy) dengan realisasi penyaluran Program Sembako sebesar 100% pada triwulan III 2024.

Berdasarkan hasil kegiatan *monitoring* bansos nontunai tahun 2025 yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi bekerja sama dengan Dinas Sosial di lingkungan pemerintah daerah di Provinsi Jambi, temuan penting di lapangan dalam penyaluran Program Sembako diantaranya: (i) masih terdapat permasalahan yang dialami oleh KPM saat melakukan pengambilan BSNT secara mandiri, seperti dana belum masuk, mesin EDC tidak berfungsi, dan kartu KKS tertelan

mesin ATM; (ii) masih terdapat biaya yang dikenakan oleh Agen Bank atas penarikan bantuan sosial; serta (iii) masih terdapat sinyal komunikasi di wilayah responden yang hanya berkualitas bagus untuk beberapa operator. Dari hasil *monitoring* bansos juga ditemukan bahwa minat KPM masih kecil terhadap alat pembayaran elektronik dalam bertransaksi serta masih kecilnya keinginan KPM untuk membuka rekening mandiri selain rekening bansos.

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi bersama Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya telah membentuk sebanyak 12 (dua belas) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi. (TABEL 5.3).

TP2DD dibentuk sebagai forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan tujuan untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemda, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi. Di tingkat daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi berperan sebagai wakil ketua TP2DD. Dalam kapasitas tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi melaksanakan koordinasi dan fasilitasi bersama Pemerintah Daerah dalam bentuk *High Level Meeting* dan Rapat Koordinasi. Selain itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia juga melakukan *monitoring* atas pelaporan data ETPD yang

dilaporkan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan pendampingan pengisian serta *capacity building* untuk mengawal dan mendorong peningkatan indeks ETPD serta memperkuat tingkat akurasi data yang dilaporkan. Dalam rangka peningkatan pemahaman Pemerintah Daerah dan juga masyarakat mengenai ETPD, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi juga melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai ETPD melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya. Bersamaan dengan upaya tersebut, TP2DD di wilayah kerja Provinsi Jambi terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong transformasi digital. Hal ini tercermin dari perkembangan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) pada semester I tahun 2025 yang menunjukkan *trend* meningkat dan dapat mempertahankan kategori Pemda Digital.

Salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan IETPD di Jambi adalah perluasan kanal penerimaan digital khususnya dalam pembayaran PBB melalui *platform e-commerce* dan peningkatan penerimaan/belanja melalui kanal non tunai. Hingga saat ini terdapat 12 pemda yang telah memiliki Perkada yang mengatur implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan bank RKUD, dalam hal ini Bank Jambi. Bahkan, tiga pemda diantaranya telah memasuki tahap implementasi KKI yaitu Pemerintah Kota Jambi, Kab. Sarolangun, dan Kab. Muaro Jambi.

Berkaitan dengan elektronifikasi transaksi keuangan Pemda, berdasarkan SE Menteri Dalam Negeri No.910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi dan SE Menteri Dalam Negeri

Tabel 5.3. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Golongan Pemilik (Rp Juta)

Daerah	No. Surat Keputusan (SK) TP2DD	Tentang
Provinsi Jambi	No.171/KEP.GUB/BAKEUDA-1/2021 tanggal 11 Februari 2021	Pembentukan TP2DD Provinsi Jambi
Kabupaten Kerinci	No.900/Kep.20/2021 tanggal 15 Februari 2021	Pembentukan TP2DD Kabupaten Kerinci
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	No.222 TAHUN 2021 tanggal 19 Maret 2021	Penetapan TP2DD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kabupaten Muaro Jambi	No.238/Kep.Bup/BPKAD/2021 tanggal 9 April 2021	Pembentukan TP2DD Kabupaten Muaro Jambi
Kabupaten Sarolangun	No.183/BPKAD/2021 tanggal 10 Mei 2021	Pembentukan TP2DD Kabupaten Sarolangun
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	No.354/Kep.Bup/Eko/2021 tanggal 17 Mei 2021	Pembentukan TP2DD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Kabupaten Merangin	No.60/BPPRD/2021 tanggal 20 Mei 2021	Pembentukan TP2DD Kabupaten Merangin
Kota Sungai Penuh	No.900/Kep.135/2021 tanggal 4 Juni 2021	Pembentukan TP2DD Kota Sungai Penuh
Kabupaten Tebo	No.384/TAHUN 2021 tanggal 8 Juni 2021	Pembentukan TP2DD Kabupaten Tebo
Kabupaten Batang Hari	No.155 TAHUN 2021 tanggal 10 Mei 2021	Pembentukan TP2DD Kabupaten Batang Hari
Kota Jambi	No.229 TAHUN 2021 tanggal 30 Juni 2021	Pembentukan TP2DD Kota Jambi
Kabupaten Bungo	No.167/PEREKONOMIAN TAHUN 2021 tanggal 1 Juli 2021	Pembentukan TP2DD Kabupaten Bungo

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

No.910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Realisasi Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Perbendaharaan Negara dan bank daerah tanggal 2 Mei 2018 berkaitan dengan penyaluran gaji melalui rekening PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri secara terpusat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi berperan serta dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kelancaran penyaluran gaji melalui rekening dimaksud. Saat ini realisasi penyaluran gaji PNS telah mencapai 100% melalui rekening perbankan.

Selain itu, dalam upaya mendorong digitalisasi dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah Kota Jambi juga telah mengimplementasikan penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai metode pembayaran parkir di sejumlah Kawasan. Langkah ini merupakan bagian dari program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kota Jambi. Di awal peluncurannya, telah didistribusikan QRIS Parkir kepada 70 juru parkir dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan rencana perluasan implementasi di berbagai kawasan perkotaan.

Acuan yang dapat digunakan untuk implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda di Provinsi Jambi saat ini antara lain surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jambi No.S-1226/Bakeuda-1/XI/2018 tanggal 26 November 2018 yang mewajibkan rekanan Pemerintah Daerah untuk membuka rekening dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mewajibkan pembayaran gaji, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), dan honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) secara nontunai melalui rekening, serta Peraturan Gubernur Jambi No. 22 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mengatur penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai instrumen pembayaran dalam belanja APBD oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

Elektronifikasi juga terus didorong di sektor transportasi. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kota Jambi berkoordinasi dengan PT. Angkasa Pura dan PT. Pelindo Jambi dalam mengimplementasikan pembayaran perparkiran menggunakan uang elektronik. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi juga mendorong elektronifikasi untuk transportasi bus. Dalam hal ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi telah berkoordinasi dengan DAMRI untuk memastikan ketersediaan kanal non tunai untuk pembayaran tiket. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Jambi dan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi untuk mengawal dan memastikan ketersediaan implementasi pembayaran non tunai pada rencana implementasi Bus Trans Bahagia di Kota Jambi serta rencana perluasan armada Bus Trans Siginjai.

Setelah pertama kali beroperasi pada tanggal 16 Oktober 2024, jalan tol di Provinsi Jambi terus diperluas, dengan diresmikannya ruas jalan tol Tempino-Jambi Seksi 4 Tempino-Ness pada tanggal 14 September 2025. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi terus melakukan koordinasi dengan perbankan (Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BCA) serta pengelola jalan tol untuk mengawal kelancaran pembayaran tarif tol serta ketersediaan layanan penjualan dan pengisian saldo kartu UE. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi juga melaksanakan berbagai upaya edukasi lainnya untuk memperkenalkan kartu UE secara lebih luas, termasuk melalui media televisi, radio, koran, dan media sosial serta kegiatan edukasi secara langsung.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi juga telah mengakselerasi elektronifikasi di tempat wisata melalui pembayaran tiket masuk kawasan wisata dan digitalisasi UMKM di kawasan wisata. Kawasan Percandian Muarajambi telah menerima pembayaran menggunakan UE dan QRIS, termasuk menggunakan fitur QRIS TAP, yang mana fitur QRIS TAP di Kawasan Percandian Muarajambi diluncurkan secara seremoni bersamaan dengan pembukaan kegiatan Gentala Arasi 2025. UMKM yang berjualan di Kawasan Percandian Muarajambi tersebut, yaitu Pasar Dusun Karet (PADUKA), *Foodcourt* dan Pojok Kopi Dusun sudah bisa menerima pembayaran melalui QRIS, kartu debit/kredit atau transfer bank. Begitu pula sepeda listrik dan bentor sebagai salah satu sarana transportasi di kawasan itu sudah bisa menerima pembayaran menggunakan QRIS.

Selain kawasan Candi Muaro Jambi yang merupakan salah satu icon Provinsi Jambi, beberapa kawasan wisata lain juga sudah bisa menerima pembayaran non tunai, seperti Danau Sipin, Jambi Paradise, UMKM di jembatan Gentala Arasy, dan juga kawasan wisata di luar Kota Jambi, yaitu di Kawasan wisata Rawa Bento di Kabupaten Kerinci dan *Geopark* Merangin. Seluruh kegiatan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan tingkat inklusi keuangan dan menciptakan *less cash society* di Provinsi Jambi. Implementasi elektronifikasi merupakan upaya mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi nontunai yang mudah, aman, praktis, nyaman, dan efisien.

5.5 Perkembangan QRIS

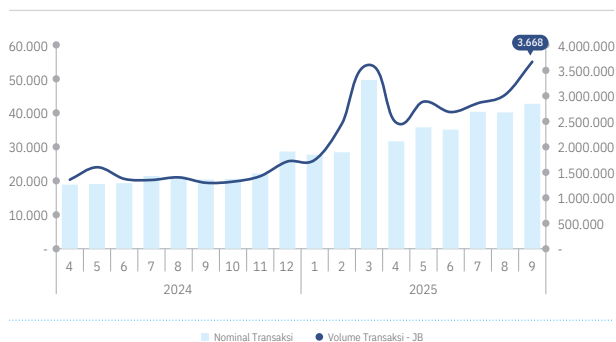
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi secara berkala melaksanakan kegiatan edukasi GNNT kepada pelajar dan mahasiswa, serta kelompok masyarakat lainnya secara lebih luas. Pelajar dan mahasiswa merupakan target utama edukasi GNNT mengingat secara umum karakter kelompok penduduk muda (milenial) adalah melek teknologi, berani mencoba hal baru, dan cenderung memilih sesuatu yang praktis. Sektor kuliner, seperti *café* dan *foodcourt* saat ini menjadi sektor prioritas di Provinsi Jambi dalam meningkatkan perluasan implementasi transaksi nontunai, mempertimbangkan tingginya aktivitas kelompok milenial maupun keluarga di tempat kuliner.

Pesatnya perkembangan industri dan meningkatnya adopsi masyarakat terhadap *smartphone* di Indonesia mendorong perusahaan teknologi dan keuangan untuk memanfaatkan teknologi sebagai media pembayaran retail. Hal ini membuat layanan *mobile payment* di dalam *smartphone* menjadi media pembayaran baru bagi masyarakat sekaligus untuk meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia. Salah satu penggunaan teknologi dalam *mobile payment* yang berkembang pesat saat ini adalah penggunaan QR Code.

QR Code merupakan serangkaian kode yang memuat data/informasi antara lain identitas pedagang/pengguna, nominal pembayaran, dan/atau mata uang yang dapat dibaca dengan alat tertentu dalam rangka transaksi pembayaran. Pembayaran dengan QR Code memiliki beberapa keunggulan, antara lain kemampuan QR Code menampung informasi pembayaran yang banyak meskipun dalam ukuran yang kecil dan memiliki kemampuan koreksi kesalahan, pembayaran menjadi lebih efisien karena tetap dapat menggunakan infrastruktur dan media pembayaran yang sudah ada, memperluas akses keuangan dan pembayaran, serta memberikan alternatif media pembayaran kepada masyarakat.

Sejalan dengan implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dan penetapan QRIS sebagai salah satu alternatif kanal pembayaran nontunai sebagaimana diatur dalam PADG No.21/18/PADG/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi memfasilitasi pendaftaran *merchant* untuk memperoleh QRIS melalui PJP di Provinsi Jambi. Penggunaan QRIS diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi *merchant* dan konsumen antara lain: (i) menerima pembayaran secara higienis karena pembayaran dilakukan menggunakan gawai konsumen sehingga tidak memerlukan uang kembalian dan bebas dari potensi risiko pencurian dan/atau uang palsu, (ii) transaksi cepat dan tercatat, serta (iii) murah dan bebas biaya bagi Usaha Mikro. Khusus untuk *merchant*, transaksi yang tercatat dapat digunakan sebagai basis membangun *credit profiling*.

Grafik 5.9 Perkembangan Merchant yang Memiliki QRIS di Provinsi Jambi



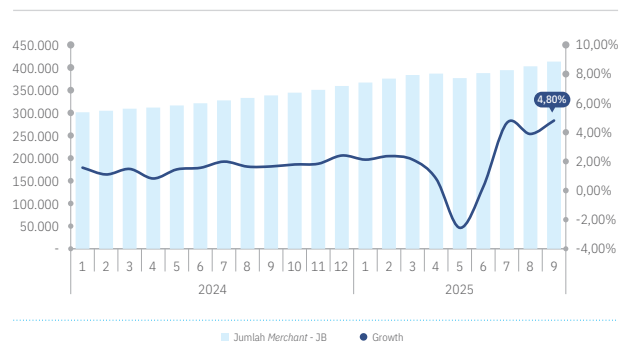
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

Dalam rangka memperluas adopsi QRIS di Provinsi Jambi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menyelenggarakan beberapa program yang bertujuan untuk mendorong peningkatan penggunaan QRIS, baik untuk pengguna masyarakat umum maupun *merchant*. Program yang telah dilaksanakan antara lain QRIS *for Speed*, yaitu *roadshow* edukasi QRIS di berbagai titik di Provinsi Jambi; QRI(S)inergi, yaitu sinergi dengan *stakeholders* dalam menyelenggarakan edukasi dan *onboarding* QRIS; KEPOIN (Kolaborasi Efektif Pelindungan Konsumen & Inklusi Keuangan), yaitu *roadshow* edukasi dan QRIS *Experience* dengan berkolaborasi dengan FKIJK; QURMA (QRIS Untungkan Ramadhan-mu dengan Mudah dan Aman), yaitu edukasi dan *onboarding* QRIS di bazaar bulan suci Ramadhan; QRIS Jelajah Budaya Indonesia 2025 Provinsi Jambi; dan Gentala Arasi (Gebyar Ekonomi Digital & Literasi Jambi) Tahun 2025, yang merupakan *Regional High Level Event* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi.

Sejak QRIS diluncurkan, berbagai kemajuan cukup pesat telah dicapai. Saat ini terdapat 143 (seratus empat puluh tiga) Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) bank maupun *nonbank* yang sudah mendapat izin QRIS dari Bank Indonesia. Perluasan *merchant* QRIS telah berlangsung di seluruh Indonesia dengan jumlah 41,2 juta *merchant* hingga September 2025 dan diperkirakan terus bertambah. Per September 2025 terdapat 413.130 *merchant* di Provinsi Jambi (GRAFIK 5.9), tumbuh 6,59% atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah Pengguna QRIS juga terus tumbuh positif pada triwulan III 2025 mencapai 603.823 pengguna (GRAFIK 5.10) atau lebih tinggi dari triwulan II 2025 yang mencapai 593.890 pengguna. Volume transaksi QRIS di Provinsi Jambi juga terus mengalami peningkatan, hingga September 2025 tercatat sebanyak 9.543.967 transaksi dengan nilai Rp1.231 triliun (GRAFIK 5.11).

Melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi QRIS oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, PJP dan berbagai *stakeholder* lainnya diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mengetahui dan memahami QRIS sebagai kanal pembayaran nontunai, mekanisme dalam bertransaksi,

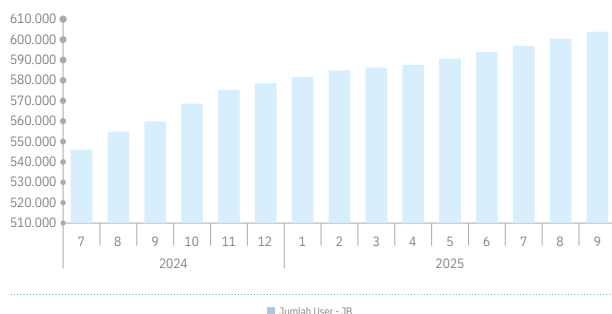
Grafik 5.10 Perkembangan QRIS-Merchant di Provinsi Jambi



Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan transaksi tunai, serta potensi risiko dan mitigasi yang dapat dilakukan oleh nasabah sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan implementasi QRIS di Provinsi Jambi. Selanjutnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi akan terus melakukan implementasi QRIS di berbagai komunitas melalui koordinasi dengan PJP Berizin QRIS di berbagai Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi.

Grafik 5.11 Perkembangan QRIS-User di Provinsi Jambi



Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

5.6 Perlindungan Konsumen

Guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK No.4 Tahun 2023, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi Penyelenggara yang produk dan/atau jasanya digunakan oleh Konsumen, termasuk dalam pengaturan Pelindungan Konsumen yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia. Ruang Lingkup pengaduan konsumen yang masuk kedalam kewenangan Bank Indonesia meliputi: (i) Sistem Pembayaran, antara lain QRIS, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (kartu kredit dan kartu debit/ATM), Uang Elektronik (berbasis chip maupun server), serta Dompot Elektronik (*e-wallet*); (ii) Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB); dan (iii) Penyelenggara di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Adapun, tahapan Pengaduan Konsumen, antara lain: (i) Lapor ke penyelenggara jasa sistem pembayaran; (ii) Penyelenggara menanggapi laporan; (iii) Jika terdapat hal yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut, sampaikan ke BI melalui kanal Pengaduan Langsung maupun Tidak Langsung, (iv) BI memberi edukasi, konsultasi dan fasilitasi. Konsumen juga dapat menyampaikan pengaduan kepada Bank Indonesia melalui *Contact Center* Bank Indonesia (BI-BICARA) pada nomor 131 (pulsa lokal) atau 500131 (untuk akses dari luar negeri); Surat elektronik (*e-mail*) ke bicara@bi.go.id; dan Visit Center Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia.

BOKS 2

GEBYAR EKONOMI DIGITAL DAN LITERASI JAMBI (GENTALA ARASI) 2025

Dalam rangka mengakselerasi transformasi Ekonomi Keuangan Digital di Provinsi Jambi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menyelenggarakan Gebyar Ekonomi Digital dan Literasi Jambi (Gentala Arasi) 2025 pada tanggal 19 – 23 September 2025 di *Mall Jambi Town Square*. Terinspirasi dari ikon kebanggaan Masyarakat Provinsi Jambi yaitu Jembatan Gentala Arasy yang menghubungkan daerah Tepian Tanggo Rajo ke Jambi Kota Seberang, diharapkan Gentala Arasi 2025 dapat menghubungkan dan memperluas Jangkauan Konektivitas Digital dalam Mendorong Inklusivitas dan Transformasi Digital di Provinsi Jambi. Kegiatan ini merupakan Regional *High Level Event* (RHLE) Bank Indonesia (BI) yang menjadi rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Pekan QRIS Nasional (PQN), Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI), serta Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia (GBWI). Kegiatan ini dihadiri oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia, Gubernur Provinsi Jambi, FORKOMPIMDA, TP2DD Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi, Pimpinan Perbankan, Akademisi, serta Pimpinan Instansi terkait lainnya.

Rangkaian kegiatan dibuka secara seremonial (19/09/2025) oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia, Bapak Ricky P. Gozali bersama Gubernur Provinsi Jambi, Bapak Al Haris. Pada kegiatan *Opening Ceremony* tersebut, Bapak Deputy Gubernur Bank Indonesia memberikan apresiasi secara langsung kepada Pemerintah Provinsi Jambi sebagai daerah dengan Literasi Ekonomi Keuangan Digital Tertinggi. Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga menerima apresiasi sebagai daerah dengan Transformasi Ekonomi Keuangan Digital Terbaik di Jambi dan daerah dengan Elektronifikasi

Transaksi Pemerintah Daerah Tertinggi di Jambi. Sebagai implementasi inovasi ekonomi digital, khususnya di bidang Pariwisata, pada kegiatan ini juga dilaksanakan *launching* fitur QRISTAP di KCBN Muarajambi.

Kegiatan *Opening Ceremony* menandakan dimulainya rangkaian kegiatan main event Gentala Arasi 2025 selama lima hari. Pada hari pertama, 19 September 2025, kompetisi Mural Ekonomi dan Keuangan Digital menjadi ajang bagi seniman Jambi untuk mengekspresikan kreativitasnya dalam menggabungkan seni rupa dengan konsep edukasi ekonomi keuangan digital. Kegiatan dilanjutkan dengan *talkshow* bertajuk "Generasi Muda Berdigital dan Bijak Finansial", yang menghadirkan Khodijah Harahap, *owner* Qolbi, yaitu salah satu UMKM binaan KPwBI Provinsi Jambi yang berorientasi pada *platform e-commerce*. Pada kesempatan tersebut, Khodijah Harahap berbagi pengalaman dalam memanfaatkan inovasi digital untuk mengembangkan usaha serta bagaimana mengatur keuangan pribadi dengan bijak.

Selanjutnya, rangkaian acara di hari kedua, tanggal 20 September 2025 dilanjutkan dengan berbagai kegiatan yang tidak kalah seru, yaitu kompetisi *Clash of Champions* Ekonomi Keuangan Digital yang diikuti oleh siswa SMA/ sederajat; lomba melukis celengan tabung yang diikuti oleh siswa SD/ sederajat; kompetisi *Banker's Idol*, yaitu kompetisi menyanyi yang diikuti oleh peserta dari perbankan di Provinsi Jambi; serta *talkshow* bertajuk "Kesadaran Finansial, Masa Depan Berkualitas", yang menghadirkan psikolog Analisa Widyaningrum sebagai narasumber. Pada *talkshow* tersebut, Analisa



Gambar 1. Opening Ceremony Gentala Arasi 2025



Gambar 2. Talkshow Halal Fashion

Widyaningrum membahas pentingnya kesadaran finansial, khususnya dari sisi psikologis, dalam memanfaatkan inovasi digital dalam bertransaksi, yang pada satu sisi memudahkan transaksi, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan perilaku konsumtif.

Pada hari ke-3, tanggal 21 September 2025, kegiatan dimulai dengan kegiatan lari QRI(S)TEP RUN 7K, yang diikuti oleh lebih dari 600 peserta. Kegiatan dilanjutkan dengan kompetisi *storytelling* dengan tema "Bijak Bertransaksi Non Tunai" yang diikuti oleh siswa SMP/ sederajat; Lomba *modern dance* bertajuk "QRIS TAP to the Rhythm" yang diikuti oleh siswa SMA/ sederajat; serta *talkshow* bertajuk "Halal Fashion: Beauty in Modesty" dengan narasumber Sri Wahyudianingsih yang merupakan *Shopper Experience Leader* Wardah Jambi, dan *influencer modest fashion* Hamidah Rachmayanti dan Irfan Farhad.

Pada hari ke-4, tanggal 22 September 2025, kegiatan dilanjutkan dengan Lomba *Quick Count Challenge*, yaitu kompetisi menghitung uang secara cepat dan tepat oleh *teller* perbankan. Pada hari yang sama juga diselenggarakan *talkshow* dengan tema "Cerdas Investasi, Anti Investasi Ilegal", yang menghadirkan Kepala Wilayah Jambi Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia, Ibu Rena Novita, dan Deputy Kepala Perwakilan OJK Jambi Ibu Septarini Geminastitie sebagai narasumber. Kegiatan tersebut menjadi wadah diskusi yang hangat mengenai cara investasi yang legal dan aman serta bagaimana cara menghindari investasi ilegal.

Rangkaian kegiatan GENTALA ARASI 2025 resmi ditutup dengan kegiatan *closing ceremony* pada tanggal 23 September 2025 oleh Plt. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Ibu Eva Ariesty, dan Gubernur Jambi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi,

Bapak H. Sudirman. Dilaksanakan juga pemberian penghargaan dan apresiasi kepada seluruh pemenang kompetisi yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Gentala Arasi 2025, *booth* terbaik pada kegiatan Gentala Arasi 2025, serta pemenang kegiatan QRIS Jelajah Budaya Indonesia Provinsi Jambi.

Selain rangkaian *main event*, Gentala Arasi 2025 juga menghadirkan beberapa *side event*, seperti kegiatan Donor Darah yang diselenggarakan pada tanggal 20-21 September 2025, dan layanan kas keliling pada tanggal 19, 22, dan 23 September 2025. Selama rangkaian kegiatan berlangsung, terdapat juga Gentala Arasi Expo, yaitu *showcasing* Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) dan berbagai UMKM yang menawarkan produk wastra dan makanan & minuman. Sebagai bagian dari Gentala Arasi Expo, 17 perbankan, OJK dan Bursa Efek Indonesia turut berpartisipasi dengan menghadirkan *booth* yang memamerkan layanan dan produk ekonomi & keuangan digital masing-masing. Dua puluh UMKM di bidang makanan & minuman juga turut meramaikan kegiatan Gentala Arasi 2025 dengan berbagai sajian kulinernya, serta 10 UMKM di bidang wastra yang menghadirkan berbagai produk wastra khas Jambi.

Seluruh transaksi di Gentala Arasi Expo wajib menggunakan QRIS sebagai upaya memperluas implementasi QRIS di Provinsi Jambi. Selama Rangkaian kegiatan GENTALA ARASI 2025 tercatat akuisisi pengguna baru mencapai lebih dari 3.500 dengan transaksi UMKM senilai Rp1,01 Miliar. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan GENTALA ARASI, Bank Indonesia Provinsi Jambi bersinergi dengan berbagai pihak akan terus mendorong digitalisasi ekonomi di Provinsi Jambi guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.



Gambar 3. Bazar UMKM Wastra Jambi



Gambar 4. Closing Ceremony Gentala Arasi 2025

06.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan



“

Berlanjutnya pertumbuhan kinerja ekonomi Provinsi Jambi memberikan dampak pada perbaikan serapan tenaga kerja di tengah peningkatan jumlah angkatan kerja di Provinsi Jambi. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja ekonomi daerah turut mendorong perbaikan kesejahteraan petani yang tercermin dari kenaikan Nilai Tukar Petani.

Data posisi Agustus 2025 menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja³ di Provinsi Jambi tercatat sebanyak 1,85 juta orang atau meningkat 2,64% dibandingkan Februari 2025. Peningkatan jumlah tenaga kerja tersebut sejalan dengan penurunan pada jumlah angka pengangguran di Provinsi Jambi yang tercatat turut menurun sebesar -2,60% (qtd) atau menurun menjadi 82,30 ribu orang dari yang sebelumnya 84,50 ribu orang pada Februari 2025. Jumlah tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan angka pengangguran bulan Agustus 2025 yang tercatat sebanyak 86,08 ribu orang. Berdasarkan penurunan jumlah pengangguran tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 4,26% pada Agustus 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 4,48%.

Dari sisi kesejahteraan, indikator kemiskinan pada Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi tercatat menurun sebanyak 1,26 ribu orang atau sebesar -0,46% (qtd) dibandingkan dengan September 2024. Lebih lanjut, tingkat garis kemiskinan yang merupakan dasar penentuan pengelompokan penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,12% menjadi sebesar 75,50%.

6.1 Ketenagakerjaan Daerah

6.1.1 Perkembangan Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan pada Agustus 2025 menunjukkan peningkatan potensi pasokan (*supply*) tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan sebesar 0,77% (yoy) dari 1.919 ribu orang pada Agustus 2024, naik menjadi 1.934 ribu orang pada Agustus 2025. Peningkatan pasokan tenaga kerja terpantau disertai dengan peningkatan serapan tenaga kerja di mana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2025 tercatat sebesar 68,37% atau lebih rendah dari Agustus 2024 yang tercatat sebesar 68,87%. (TABEL 6.1).

Sejalan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk yang bekerja turut mengalami peningkatan sebesar 18,60 ribu orang atau meningkat 1,01% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah pengangguran juga terpantau menurun menjadi 82,30 ribu orang pada Agustus 2025, dari sebelumnya sebanyak 86,08 ribu orang pada Agustus 2025. Penurunan jumlah pengangguran tersebut berimplikasi pada penurunan pada TPT Agustus 2025 yang tercatat sebesar 4,26%, atau lebih rendah dibandingkan Februari 2024 sebesar 4,48%. Lebih lanjut, TPT terpantau mengalami perbaikan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi Triwulan III 2025 dan peningkatan aktivitas ekonomi serta ekspansi yang dilakukan pelaku usaha yang menopang penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi.

Berdasarkan jenjang pendidikannya, mayoritas tenaga kerja merupakan penduduk yang berpendidikan terakhir dari Sekolah Dasar ke Bawah dengan persentase sebesar 33,60 %. Sementara itu, kontribusi tenaga kerja terendah terjadi pada penduduk yang berpendidikan terakhir Diploma I/II/III yaitu sebesar 1,88% dari total penduduk yang bekerja.

Selanjutnya, pekerja dengan latar belakang pendidikan SD dan SMP terpantau menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada bulan Agustus 2025, jumlah pekerja dengan latar belakang pendidikan SD tercatat sebanyak 622 ribu orang atau menurun -3,24% (yoy). Lebih lanjut, jumlah pekerja dengan latar belakang pendidikan SMP pada bulan laporan sebanyak 326 ribu orang atau menurun -4,19% (yoy). Di sisi lain, pekerja dengan latar belakang pendidikan SMA, SMK, DIPLOMA I/II/III dan Universitas terpantau masing-masing sebesar 2,10%, 15,71%, 0,06%, dan 9,58% (yoy) secara berurutan dibandingkan dengan periode Agustus 2024. (TABEL 6.3).

Tabel 6.1. Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja

Jenis Kegiatan Utama	2023		2024		2025	
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags
Angkatan Kerja (Ribu Jiwa)	1.852	1.888	1.856	1.919	1.884	1.934
Bekerja	1.769	1.802	1.774	1.833	1.800	1.852
Pekerja Penuh	957	1.069	980	1.210	1.093	1.180
Pekerja Tidak Penuh	811	733	793	623	707	672
Setengah Menganggur	155	167	192	154	162	172
Paruh Waktu	656	566	601	468	545	501
Pengangguran	83,38	85,80	82,60	86,08	84,50	82,30
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,88	68,75	67,09	68,87	67,11	68,37
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50	4,53	4,45	4,48	4,48	4,26

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

3. Penduduk yang bekerja adalah penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam usaha/kegiatan ekonomi.

Tabel 6.2. Pekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama (ribu orang)

Status Pekerjaan Utama	2023		2024		2025	
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags
Pekerja Formal						
Berusaha Dibantu Buruh Tetap	97	90	109	101	128	122
Buruh / Karyawan	609	636	586	662	690	669
Total Pekerja Formal	705	726	695	764	818	791
Pekerja Informal						
Berusaha Sendiri	360	455	362	436	328	384
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	281	229	252	242	250	252
Pekerja Bebas	143	153	172	150	182	195
Pekerja Keluarga / Tak Dibayar	279	239	292	242	222	230
Total Pekerja Informal	1.063	1.076	1.078	1.070	982	1.061
Total	1.769	1.802	1.774	1.833	1.800	1.852

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Adapun kondisi tenaga kerja di Provinsi Jambi berdasarkan status pekerjaan belum mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jenis pekerjaan yang dominan pada bulan Agustus 2025 adalah kelompok orang yang bekerja pada kegiatan informal dengan pangsa sebesar 57,27%. Lebih lanjut, jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal pada bulan Agustus 2025 tercatat sebesar 1,06 juta atau menurun sebesar 0,85% (yoy) dibandingkan periode Agustus 2024. Di sisi lain, perkembangan jumlah pekerja formal di Provinsi Jambi meningkat sebesar 3,63% (yoy), dari 764 ribu orang pada Agustus 2024 menjadi 791 ribu orang pada Agustus 2025. (TABEL 6.2).

Berdasarkan Lapangan Usaha (LU)-nya, peningkatan jumlah tenaga kerja terutama dialami oleh LU pendidikan (14,77%, yoy), LU pengangkutan dan pergudangan (11,19%, yoy), LU industri pengolahan (8,20%, yoy), LU pertambangan dan penggalian (5,03% yoy), LU aktivitas kesehatan & kegiatan sosial, dan aktivitas jasa lainnya (2,98% yoy), LU perdagangan besar dan eceran (1,19% yoy), LU informasi dan komunikasi (0,13% yoy), dan LU Pengadaan LGA, *Treatment* Air, Konstruksi, & *Real Estate* (0,17% yoy). Berdasarkan pangasanya, sejalan dengan LU unggulan di Provinsi Jambi, mayoritas tenaga kerja diserap oleh LU pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan pangsa sebesar 43,36%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja sebagian sektor masih dalam tren peningkatan sejalan dengan peningkatan kinerja ekonomi Provinsi Jambi.

Secara sektoral, struktur lapangan kerja di Provinsi Jambi masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyerap 802,89 ribu orang tenaga kerja atau 43,36% dari total penduduk yang bekerja. Hal ini sejalan dengan struktur perekonomian Provinsi Jambi, dimana sektor pertanian,

kehutanan, dan perikanan memiliki pangsa terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Triwulan III 2025. Namun, jumlah tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tersebut pada bulan Agustus 2025 tercatat menurun sebesar -0,29% (yoy) yang diindikasikan oleh adanya penurunan harga pada komoditas unggulan Provinsi Jambi seperti kelapa sawit, karet, dan pinang dibandingkan dengan tahun sebelumnya (TABEL 6.4).

Meskipun demikian, terdapat beberapa sektor yang mengalami penurunan serapan tenaga kerja, salah satunya adalah LU administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang tercatat menyerap 81,85 ribu tenaga kerja di Provinsi Jambi atau berkontraksi sebesar -16,21% dibandingkan Agustus 2024 yang menyerap 97,68 ribu tenaga kerja. Hal tersebut terindikasikan oleh kebijakan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran yang menyebabkan penurunan pada jumlah tenaga kerja non-organik.

Tabel 6.3. Pekerja Berdasarkan Status Pendidikan (ribu orang)

Status Pendidikan	2024		2025	
	Feb	Ags	Feb	Ags
SD Ke Bawah	651	643	572	622
SMP	303	340	301	326
SMA	465	458	460	467
SMK	119	160	175	185
Diploma I/II/III	43	35	39	35
Universitas	192	197	253	216
	1.774	1.833	1.800	1.852

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Tabel 6.4. Pekerja berdasarkan Lapangan Usaha

Lapangan Pekerjaan	2023		2024		2025	
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	700,16	814,40	722,23	805,19	767,48	802,89
Pertambangan dan Penggalian	95,49	60,35	82,77	69,17	59,01	72,65
Industri Pengolahan	104,32	85,25	146,44	89,25	147,17	96,57
Pengadaan LGA, Treatment Air, Konstruksi, & Real Estate	98,36	94,81	64,67	95,15	44,98	95,31
Perdagangan Besar dan Eceran	289,88	272,34	302,69	305,10	314,05	308,74
Pengangkutan dan Pergudangan	68,38	63,41	55,92	54,67	50,09	60,79
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	79,66	97,65	100,51	103,44	79,56	103,47
Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Keuangan dan Asuransi, dan Aktivitas Profesional dan Perusahaan	58,22	44,80	51,13	45,22	48,05	45,28
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	76,85	97,08	93,44	97,68	92,94	81,85
Pendidikan	96,54	91,43	88,31	92,46	116,62	106,12
Aktivitas Kesehatan & Kegiatan Sosial, dan Aktivitas Jasa Lainnya	100,80	80,74	64,98	75,94	79,91	78,20
TOTAL	1.768,65	1.802,26	1.773,54	1.833,27	1.799,86	1.851,87

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

6.1.2 Prospek Ketenagakerjaan

Berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, tingkat penggunaan tenaga kerja pada triwulan laporan mengalami penurunan yang tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 1,30%. Angka tersebut terpantau lebih tinggi dibandingkan realisasi SBT triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar -0,56%. Berdasarkan lapangan usahanya, pertumbuhan terjadi pada LU Industri Pengolahan, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, LU Jasa Keuangan, dan LU Jasa Pendidikan. Sementara itu, penurunan penggunaan tenaga kerja utamanya terjadi pada LU Konstruksi (SBT -2,35%).

Pada Triwulan IV 2025, pelaku usaha memprakirakan akan adanya peningkatan penggunaan tenaga kerja. Hal tersebut tercermin dari prakiraan nilai SBT yang tercatat diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,11%. Peningkatan penggunaan tenaga kerja tersebut diperkirakan terjadi pada LU Jasa Pendidikan (SBT 1,19%), LU Jasa Keuangan (SBT 0,68%), dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang diindikasikan oleh pembukaan

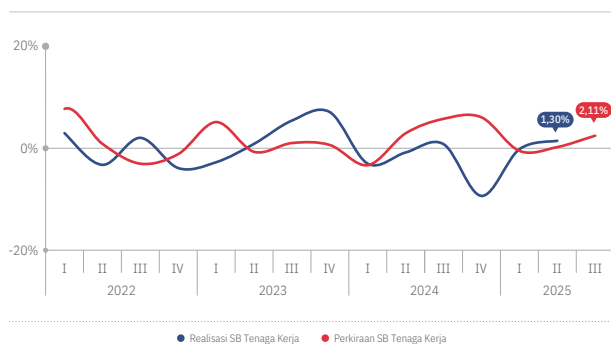
akan kebutuhan guru baru menjelang tahun ajaran baru 2025. (GRAFIK 6.1).

6.2 Kesejahteraan

6.2.1 Kemiskinan

Penduduk miskin⁴ Provinsi Jambi pada Maret 2025 tercatat sebanyak 270,94 ribu orang atau tumbuh 5,52 ribu orang atau 2,03% dibandingkan Maret 2024. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada Maret 2025, penurunan jumlah penduduk miskin terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 120,30 Ribu, atau lebih tinggi sebesar 1,59% dibandingkan pada Maret 2024. Selain itu, jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan turut tercatat meningkat sebesar 2,40% dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi sejumlah 150,64 Ribu (TABEL 6.5). Peningkatan angka penduduk miskin tersebut salah satunya didorong oleh adanya penurunan daya beli masyarakat dan semakin tingginya tingkat inflasi di wilayah Provinsi Jambi.

Lebih lanjut, tingkat garis kemiskinan yang merupakan dasar penentuan pengelompokan penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp664.127 per kapita per bulan, atau naik sebesar 2,16% dibandingkan dengan Maret 2024 (TABEL 6.6). Peranan komoditi makanan terhadap pembentukan garis kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan, dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp501.425 per kapita per bulan (75,41%) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp162.702 per kapita per bulan (24,59%). Pada Maret 2025, jenis komoditas makanan yang signifikan memengaruhi nilai garis kemiskinan di perkotaan

Grafik 6.1 Penyerapan Tenaga Kerja

Sumber: SKDU, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

⁴ Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

maupun perdesaan relatif sama yaitu beras (17,36% di perkotaan dan 21,67% di perdesaan), rokok kretek filter (14,72% di perkotaan dan 16,37% di perdesaan), daging ayam ras (5,15% di perkotaan dan 3,72% di perdesaan), telur ayam ras (4,10% di perkotaan dan 3,27% di perdesaan), dan cabe merah (4,10% di perkotaan dan 4,70% di perdesaan). Sementara itu, komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan (6,74% di perkotaan dan 8,07% di perdesaan), bensin (3,92% di perkotaan dan 4,07% di perdesaan), listrik (2,74% di perkotaan dan 2,17% di perdesaan), pendidikan (1,64% di perkotaan dan 1,13% di perdesaan), dan perlengkapan mandi (1,12% di perkotaan dan 1,02% di perdesaan).

Besarnya sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan di perkotaan mencapai 75,41%, sedangkan di pedesaan sebesar 75,64%. Hal ini mengindikasikan bahwa pentingnya peran pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian harga komoditas pangan terutama beras, daging ayam ras, cabai merah, dan telur ayam ras yang memiliki kontribusi terbesar pada garis kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Di samping angka kemiskinan, terdapat beberapa indikator lain yang digunakan dalam analisis kemiskinan yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan pada prinsipnya menunjukkan seberapa jauh selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Angka P1 yang semakin mendekati 0 (nol) mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sementara, P2 memberikan gambaran mengenai seberapa jauh jarak pengeluaran orang paling miskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di wilayah tersebut. Angka P2 yang semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil.

Pada Maret 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan yaitu 0,976 lebih rendah dibandingkan 1,062 pada Maret 2024. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin di Provinsi Jambi semakin mendekati Garis Kemiskinan dibandingkan periode sebelumnya. Selanjutnya, Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) terpantau turut menurun dari 0,415 pada Maret 2024, menjadi 0,199 pada Maret 2025. Hal tersebut

Tabel 6.5. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jambi

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)					
	Mar 2022	Sep 2022	Mar 2023	Mar 2024	Sep 2024	Mar 2025
Kota	127,34	127,80	125,30	118,39	120,63	120,30
Pedesaan	152,03	156,03	155,39	147,03	152,08	150,64
Kota + Desa	279,37	283,82	280,68	265,42	272,20	270,94

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Tabel 6.6. Garis Kemiskinan Provinsi Jambi

Wilayah	Garis Kemiskinan							
	September 2024				Maret 2025			
	Makanan	Non Makanan	Total	%GK Makanan	Makanan	Non Makanan	Total	%GK Makanan
Kota	569.981	184.254	754.235	75,57	572.986	186.813	759.799	75,41
Pedesaan	464.125	148.620	612.745	75,75	467.572	150.549	618.121	75,64
Kota + Desa	497.637	160.463	658.100	75,62	501.425	162.702	664.127	75,50

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Tabel 6.7. Indeks Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan Provinsi Jambi

Wilayah	Indeks Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan							
	Maret 2023		Maret 2024		September 2025		Maret 2025	
	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2
Kota	1,616	0,368	1,486	0,374	2,265	0,846	1,465	0,320
Pedesaan	0,985	0,246	0,850	0,186	0,832	0,198	0,730	0,138
Kota + Desa	1,195	0,287	1,062	0,248	1,311	0,415	0,976	0,199

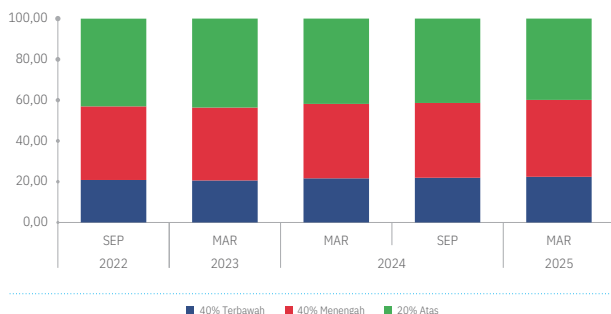
Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Tabel 6.8. Gini Ratio Provinsi Jambi

Wilayah	Gini Ratio					
	Mar 2022	Sep 2022	Mar 2025	Mar 2024	Sep 2024	Mar 2025
Kota	0,351	0,376	0,365	0,36	0,353	0,328
Pedesaan	0,292	0,302	0,320	0,288	0,279	0,301
Kota + Desa	0,320	0,335	0,343	0,321	0,315	0,275

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Grafik 6.2. Distribusi Pengeluaran Penduduk



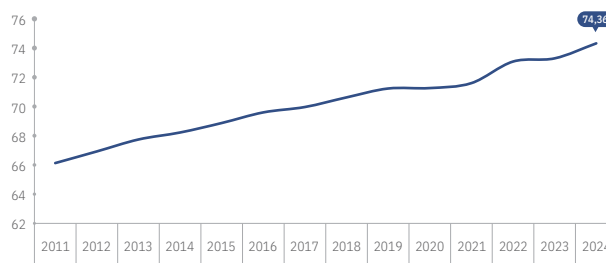
Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin menurun di wilayah Provinsi Jambi (TABEL 6.7). Indeks keparahan kemiskinan di daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan perkotaan. Pada Maret 2024, nilai P1 untuk perkotaan sebesar 1,465, sementara di pedesaan lebih rendah yaitu 0,730. Sementara, nilai P2 untuk perkotaan sebesar 0,320 dan di pedesaan sebesar 0,138.

Selain angka kemiskinan serta indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, isu kemiskinan juga dapat dilihat dari tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur dengan *Gini Ratio*⁵. Pada Maret 2025, gini ratio Provinsi Jambi menurun sebesar 0,046 poin dari 0,321 pada Maret 2024 menjadi 0,275. Hal tersebut mengindikasikan kondisi ketimpangan di Provinsi Jambi mengalami penurunan dalam satu tahun terakhir. Lebih lanjut, angka *gini ratio* ini terpantau lebih rendah dibandingkan *gini ratio* Nasional pada Maret 2025 yang tercatat sebesar 0,375. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pengeluaran di Provinsi Jambi relatif lebih baik dibandingkan nasional (TABEL 6.8).

Berdasarkan wilayahnya, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,328, menurun dibandingkan *Gini Ratio* Maret 2024 yang tercatat sebesar 0,360. Selain itu, *Gini Ratio* di daerah pedesaan pada Maret 2025 turut tercatat menurun menjadi 0,301 dibandingkan *Gini Ratio* Maret 2024 yang tercatat sebesar 0,288.

Grafik 6.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Berdasarkan distribusinya⁶, pada Maret 2025 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah sebesar 22,42%, atau meningkat dibandingkan Maret 2024 yang tercatat sebesar 21,65% dan Maret 2023 20,60% (GRAFIK 6.2). Hal ini menunjukkan ketimpangan Provinsi Jambi semakin melandai.

Provinsi Jambi tercatat tumbuh sebesar 1,40% (yoy) menjadi 74,36 dibandingkan 2023 sebesar 73,33. Perbaikan IPM didorong oleh peningkatan pada 3 (tiga) aspek yaitu aspek umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga aspek tersebut dijabarkan ke dalam 3 (tiga) komponen indeks pembentuk IPM yaitu Indeks Harapan Hidup Saat Lahir (UHH), Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS), Indeks Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), serta Indeks Pengeluaran Per Kapita yang seluruhnya menunjukkan peningkatan. Secara umum, pembangunan manusia Provinsi Jambi terus mengalami kemajuan selama periode 2013–2024. Selama periode tersebut, IPM Provinsi Jambi rata-rata tumbuh sebesar 0,88% per tahun dan diperkirakan terus tumbuh sesuai dengan trennya. Peningkatan IPM Provinsi Jambi pada tahun 2024 mampu menjaga status pembangunan manusia Provinsi Jambi di level “tinggi” (TABEL 6.9) dan (GRAFIK 6.3).

5. *Gini ratio* merupakan rasio ketimpangan pengeluaran penduduk yang nilainya antara 0 sampai 1. *Gini ratio* yang semakin tinggi mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

6. Berdasarkan Bank Dunia, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah angkanya <12%; ketimpangan sedang jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah angkanya 12%–17%; ketimpangan rendah jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah angkanya >17%.

6.2.2 Kesejahteraan Petani

Tingkat kesejahteraan petani di Provinsi Jambi pada Triwulan III 2025 terpantau lebih tinggi dibandingkan Triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Nilai Tukar Petani (NTP)⁷ tercatat masih berada di atas 100, mencerminkan bahwa petani mengalami surplus di mana pendapatan yang diterima lebih tinggi dibandingkan beban pengeluaran. Data Triwulan III 2025 menunjukkan rerata NTP Provinsi Jambi sebesar 170,58, meningkat sebesar 12,83 poin dibanding rerata Triwulan III 2024 yang tercatat sebesar 157,75 (GRAFIK 6.4).

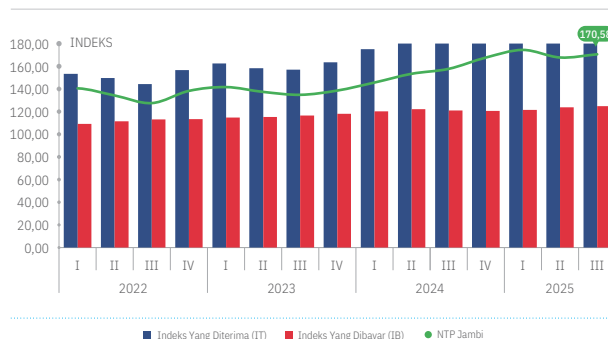
Perbaikan NTP disebabkan oleh peningkatan indeks yang diterima petani naik lebih tinggi dibandingkan peningkatan indeks yang dibayar petani. Rerata Indeks Harga yang Diterima Petani (It) pada Triwulan III 2025 sebesar 213,01 atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 190,93. Lebih lanjut, Indeks yang Dibayar Petani (Ib) pada Triwulan III 2025 tercatat sebesar 124,86 meningkat dibandingkan Triwulan III 2024 yang tercatat sebesar 121,04.

Berdasarkan kelompoknya, peningkatan NTP terjadi subsektor tanaman perkebunan rakyat, tanaman pangan, dan peternak dengan peningkatan masing-masing sebesar 9,44% (yoy), 4,41% (yoy), dan 0,10% (yoy). Peningkatan NTP tanaman perkebunan rakyat didorong oleh peningkatan harga global komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan karet. Kemudian, NTP tanaman pangan didorong oleh harga komoditas yang lebih baik dibanding tahun lalu. Serta komoditas NTP peternak yang membaik seiring dengan kenaikan harga daging ayam ras di Provinsi Jambi.

Di sisi lain, rerata NTP subsektor perikanan pada Triwulan III 2025 terpantau terkontraksi sebesar -2,89% dengan rerata sebesar 98,43 dibandingkan Triwulan III 2024 sebesar 101,36. Selanjutnya, NTP pada subsektor hortikultura juga terpantau terkontraksi sebesar -2,19% (yoy) pada Triwulan II 2025. Keuntungan nelayan pada sektor tersebut menurun secara signifikan yang dipengaruhi oleh penurunan harga dan permintaan beberapa komoditas pangan utama seperti Ikan Nila. Sementara itu keuntungan dari petani hortikultura tercatat mengalami penurunan yang disebabkan oleh kondisi alam yang tidak stabil dan menurunkan hasil panen petani di Provinsi Jambi.

Secara keseluruhan, capaian NTP Provinsi Jambi pada Triwulan III 2025 terpantau meningkat dibandingkan NTP Triwulan III 2024 yang didorong oleh peningkatan indeks yang diterima petani sebesar 11,56 poin di tengah kenaikan indeks yang dibayar petani yang hanya sebesar 8,13 poin.

Grafik 6.4. Nilai Tukar Petani



Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Tabel 6.9. Indeks Pembangunan Manusia menurut komponen

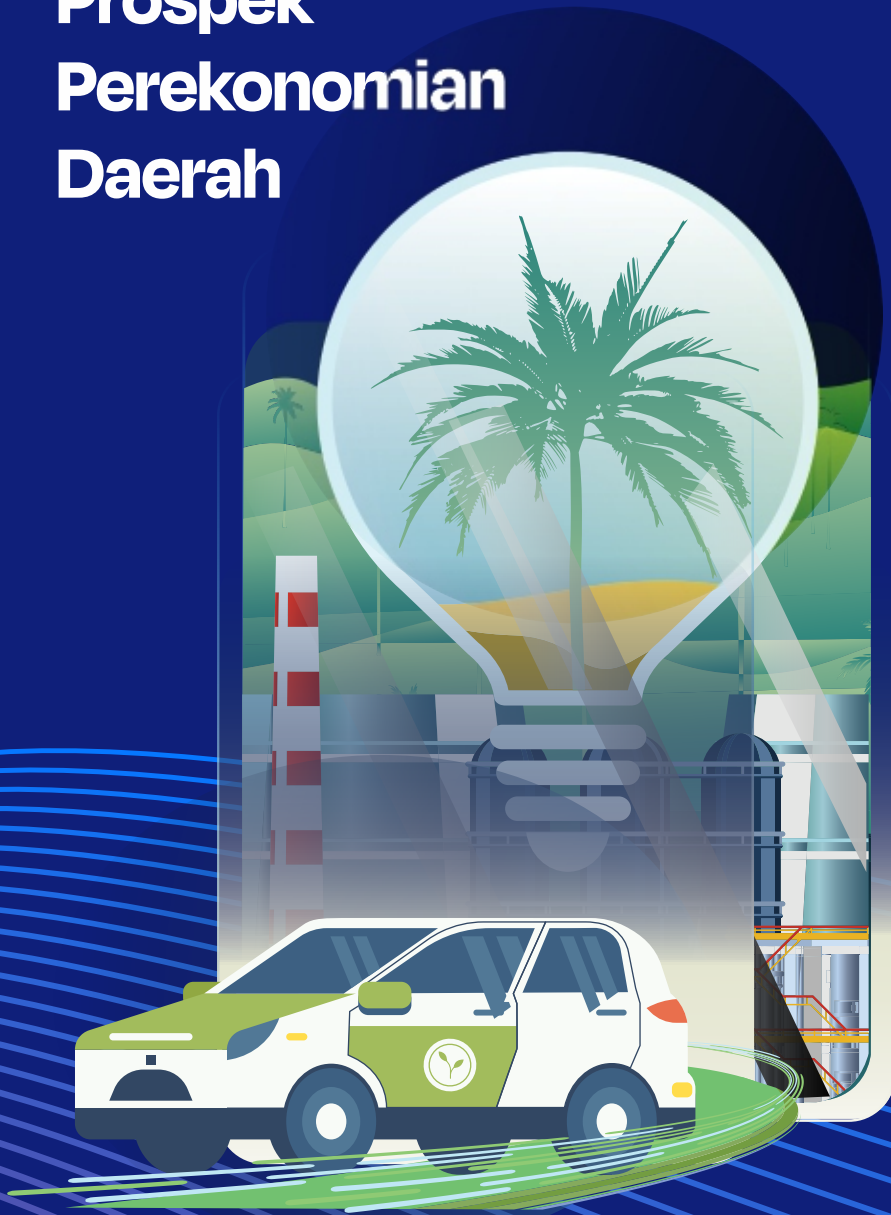
Komponen	Tahun					
	2018	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	71,06	73,33	73,38	73,61	73,84	74,06
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,93	12,98	13,04	13,05	13,13	13,14
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,45	8,55	8,60	8,68	8,81	8,90
Pengeluaran Per Kapita (Juta Rupiah)	10.592	10.392	10.588	10.871	11.160	11.621
IPM	71,26	72,29	72,62	73,11	73,33	74,36

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

7. Sejak Januari 2020, data NTP telah menggunakan Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun Dasar 2018 dalam perhitungan data NTP

07.

Prospek Perekonomian Daerah



“

Perekonomian Provinsi Jambi diperkirakan tetap kuat pada tahun 2025, yaitu pada rentang 4,05–4,85% (yoy), didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat seiring dengan perbaikan kinerja lapangan usaha utama, seperti pertanian dan pertambangan yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan.

Inflasi gabungan Provinsi Jambi pada tahun 2025 diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran target inflasi nasional sebesar $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya memastikan ketersediaan stok pangan serta menekan volatilitas harga melalui berbagai langkah strategis.

Ketidakpastian pasar keuangan global kembali meningkat seiring dinamika kebijakan moneter Amerika Serikat, perlambatan ekonomi di AS, Jepang, Tiongkok, dan India, serta perubahan struktur permintaan global. Sementara Eropa tumbuh di atas prakiraan karena konsumsi dan investasi yang didorong pelonggaran kebijakan moneter, prospek ekonomi dunia 2025 tetap berada di kisaran 3,1%. Penilaian pasar terhadap sikap bank sentral AS yang lebih berhati-hati, ketidakpastian tarif, serta lemahnya pasar tenaga kerja mendorong ekspektasi bahwa *The Fed* akan menahan penurunan *Fed Funds Rate*. Kondisi tersebut memicu arus modal global menuju emas dan aset keuangan AS sebagai *safe haven*, meningkatkan harga emas dan menguatkan indeks mata uang dolar AS (DXY), sementara arus modal ke *emerging markets* terbatas pada pasar saham. Perkembangan tersebut memerlukan kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak rambatan global, menjaga ketahanan eksternal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri dengan tetap menjaga stabilitas.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2025 tumbuh 5,04% (yoy), ditopang oleh kinerja ekspor yang tetap baik serta konsumsi Pemerintah yang meningkat seiring percepatan belanja Pemerintah. Pada triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat didukung stimulus fiskal melalui implementasi proyek prioritas dan Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah 2025 serta bauran kebijakan Bank Indonesia yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh lebih tinggi didorong kenaikan ekspektasi penghasilan, khususnya pada kelompok menengah ke bawah, sejalan tambahan bantuan sosial Pemerintah serta kenaikan mobilitas dan aktivitas masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Investasi, khususnya nonbangunan, diperkirakan lebih tinggi tecermin dari indeks *Prompt Manufacturing Index* (PMI) yang tetap pada *level* ekspansif. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan berada dalam kisaran 4,7-5,5%, dan akan meningkat pada 2026.

Dari sisi pengendalian inflasi, Bank Indonesia meyakini pada tahun 2025 dan 2026 tetap terjaga rendah dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$. Inflasi inti diperkirakan tetap rendah seiring ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang masih besar, *imported inflation* yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Sementara itu, inflasi VF diperkirakan tetap terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional.

Sejalan dengan dinamika perkembangan global dan nasional, perekonomian Provinsi Jambi diperkirakan tetap kuat pada tahun 2025. **Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2025 diproyeksikan tumbuh pada kisaran 4,05% s.d 4,85% (yoy).**

7.1 Prospek Perekonomian Jambi Tahun 2025

7.1.1 Komponen Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga Jambi diperkirakan tetap menjadi penopang utama perekonomian Jambi hingga akhir 2025, seiring membaiknya daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi yang semakin luas di berbagai kabupaten/kota. Meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, tambahan bantuan sosial, serta kenaikan ekspektasi pendapatan kelompok menengah ke bawah mendorong pengeluaran untuk kebutuhan pangan, pakaian, rekreasi, hingga layanan digital. Penggunaan QRIS yang semakin meluas ke daerah non-perkotaan menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap ekosistem pembayaran digital, mempercepat perputaran transaksi dan konsumsi. Meski demikian, tekanan dari komoditas hortikultura yang sensitif terhadap cuaca dan pasokan antar daerah serta kenaikan harga emas perhiasan tetap menjadi risiko bagi daya beli sebagian rumah tangga.

Konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat setelah periode efisiensi anggaran pada paruh awal 2025. Percepatan realisasi anggaran menjelang tutup tahun 2025 akan menjadi pendorong penting, terutama pada program layanan publik, infrastruktur daerah, serta pembiayaan sektor strategis. Belanja pemerintah daerah, termasuk transfer pusat yang mulai terealisasi, menjadi katalis bagi perbaikan kualitas pelayanan dan pembangunan infrastruktur dasar di berbagai wilayah. Meskipun sebagian belanja bersifat musiman, konsistensi realisasi anggaran akan menentukan besarnya *multiplier effect* terhadap konsumsi lokal dan aktivitas sektor riil.

Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menunjukkan arah pemulihan setelah mengalami kontraksi, ditopang oleh penyelesaian proyek-proyek konstruksi dan perbaikan prospek investasi sektor produktif. Hilirisasi perkebunan, pengembangan kawasan pertanian, serta berlanjutnya proyek energi dan transportasi menjadi pendorong perbaikan investasi. Peningkatan PMTB non-bangunan, terutama pada alat produksi dan teknologi pertanian, memperlihatkan arah investasi yang semakin efisien, meski masih menghadapi tantangan struktural seperti pembebasan lahan, perizinan, dan kesiapan SDM lokal. Dengan demikian, peran investasi diperkirakan semakin besar pada 2026 seiring pulihnya sentimen usaha.

Sementara itu, impor barang modal dan bahan baku diperkirakan menurun, sejalan dengan penyelesaian sejumlah proyek konstruksi dan melemahnya permintaan global. Kebutuhan impor hortikultura dan barang konsumsi juga diperkirakan menurun sebagai dampak stabilisasi pasokan domestik dan preferensi konsumsi lokal. Penurunan impor tersebut berpotensi memperbaiki keseimbangan eksternal Jambi, meskipun tetap perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi industri lokal agar tidak memicu gangguan pasokan. Secara keseluruhan, struktur pengeluaran menunjukkan prospek pertumbuhan ekonomi Jambi yang cukup kuat, didorong perbaikan daya beli, ekspansi investasi, dan berkembangnya ekosistem ekonomi berbasis komoditas unggulan serta transformasi digital yang terus meluas.

7.1.2 Komponen Lapangan Usaha

Prospek perekonomian Jambi dari sisi Lapangan Usaha (LU) diperkirakan akan bervariasi antar sektor. LU Pertanian diperkirakan tetap menjadi unggulan pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor dimaksud masih ditopang oleh panen komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan pinang. Namun, tingginya curah hujan di akhir tahun berpotensi mengganggu proses panen dan distribusi hasilnya sehingga berpotensi menahan laju pertumbuhan. Dukungan pemerintah melalui program gerakan tanam, optimalisasi lahan, cetak sawah dan bantuan sarana pertanian juga berkontribusi menjaga aktivitas produksi. Walaupun terdapat tekanan harga untuk beberapa komoditas hortikultura seperti cabai merah, beras dan bawang merah, secara keseluruhan sektor pertanian tetap berada dalam jalur pertumbuhan yang cukup terjaga.

Pada akhir 2025, aktivitas LU pertambangan diperkirakan mengalami tekanan akibat terbatasnya infrastruktur jalur tambang, penurunan permintaan ekspor, dan pembatasan operasional yang menurunkan produksi.

LU Industri Pengolahan menunjukkan prospek yang relatif lebih baik dibanding pertambangan. Pada triwulan IV 2025, diperkirakan terdapat peningkatan permintaan konsumen domestik jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) mendorong produsen menaikkan *output* industri makanan-minuman, CPO, karet, dan produk olahan lainnya. Pertumbuhan tersebut tetap berlanjut ke 2026, didukung membaiknya produktivitas perkebunan dan kenaikan permintaan global atas komoditas unggulan Jambi. Meski demikian, risiko masih ada, terutama terkait ketergantungan bahan baku dan fluktuasi harga komoditas internasional yang dapat menghambat optimalisasi kapasitas produksi. Untuk industri karet olahan masih diperkirakan tertekan karena isu pasokan bahan baku sebagai dampak alih fungsi lahan dan keterbatasan SDM penyadap getah karet.

Sementara itu, LU Konstruksi menunjukkan pemulihan bertahap setelah penurunan yang cukup dalam pada triwulan sebelumnya. Pembayaran proyek-proyek rutin regional seperti perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas publik menopang aktivitas konstruksi di akhir 2025. Aktivitas konstruksi terutama terdorong oleh penyelesaian pembangunan jalan strategis di sejumlah kabupaten seperti Tebo, Batanghari, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Barat, serta peningkatan fasilitas bandara di Kerinci dan Muaro Bungo. Meskipun progres pembangunan masih belum optimal pada paruh pertama tahun, keberlanjutannya menjadi sumber dorongan bagi pertumbuhan konstruksi di triwulan akhir. Selain konektivitas, sektor konstruksi juga mendapatkan dukungan dari proyek-proyek ketahanan pangan, terutama melalui pembangunan irigasi dan program pengolahan lahan. Pembangunan jaringan irigasi dan pengembangan lahan rawa menjadi elemen penting dalam meningkatkan kapasitas produksi pertanian Jambi.

LU Perdagangan diperkirakan tumbuh lebih kuat pada akhir 2025 seiring meningkatnya konsumsi masyarakat selama perayaan HBKN Natal dan Tahun Baru. Aktivitas ritel dan jasa perdagangan mengalami akselerasi yang berdampak langsung pada perputaran ekonomi lokal.

7.2 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2026

Prospek pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2026 diperkirakan tetap kuat dengan kisaran sebesar 4,05% hingga 4,85% (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh membaiknya kinerja lapangan usaha pertanian dan pertambangan. Di sektor pertanian, perbaikan produktivitas kelapa sawit diperkirakan mendukung peningkatan ekspor CPO, sementara di pertambangan, perbaikan distribusi batubara melalui jalur khusus yang menunggu penyelesaian pembangunan di awal 2026 memberi dampak positif pada produksi domestik. Dengan kontribusi kedua sektor utama tersebut, pertumbuhan ekonomi Jambi bergerak pada arah yang diperkirakan lebih kuat dibandingkan 2025.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap stabil dan menjadi salah satu penopang utama perekonomian Jambi. Terjaganya daya beli masyarakat tidak lepas dari perbaikan pendapatan di sektor pertanian dan pertambangan yang merupakan sumber penghasilan utama sebagian besar rumah tangga di Jambi. Selain itu, program pemerintah daerah seperti GPM dan pengendalian harga pangan membantu menjaga konsumsi masyarakat tetap terjaga. Hal ini memberi sinyal bahwa peran konsumsi rumah tangga dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi tetap signifikan sepanjang 2026. Di sisi lain, konsumsi pemerintah sedikit meningkat dibandingkan periode awal efisiensi anggaran 2025, sehingga mendorong belanja daerah dan memberikan stimulus tambahan terhadap aktivitas

ekonomi, khususnya sektor-sektor yang bergantung pada pengadaan dan layanan publik.

Dari sisi investasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga diperkirakan membaik sejalan dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur pendukung sektor pertanian dan distribusi, meskipun belum pada tingkat ekspansi yang signifikan. Kontribusi investasi tersebut memperkuat struktur pertumbuhan dengan membuka peluang peningkatan aktivitas produksi di daerah sentra komoditas. Namun demikian, prospek perdagangan luar negeri Jambi menghadapi tekanan. Melemahnya permintaan global terutama dari Tiongkok dan India menurunkan kebutuhan terhadap komoditas ekspor utama seperti batubara, karet, dan minyak kelapa sawit. Di saat yang sama, impor diperkirakan turun karena pengetatan fiskal dan melemahnya kebutuhan barang modal serta bahan baku industri.

Sementara itu, kinerja perdagangan luar negeri menunjukkan arah yang lebih positif. Ekspor diperkirakan meningkat berkat dukungan sektor pertanian dan pertambangan, khususnya dari komoditas unggulan seperti sawit, karet dan migas. Sebaliknya, impor cenderung menurun karena kebutuhan barang modal berkurang sejalan dengan melambatnya pembangunan konstruksi. Dengan komposisi tersebut, struktur pertumbuhan ekonomi Jambi 202 diperkirakan akan tetap bertumpu pada konsumsi rumah tangga dan ekspor komoditas, meskipun belanja pemerintah dan investasi belum mampu memberikan dorongan yang signifikan.

7.3 Prospek Inflasi Tahun 2025

Inflasi gabungan Provinsi Jambi pada tahun 2025 diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran target inflasi nasional sebesar $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Inflasi Provinsi Jambi sepanjang 2025 diperkirakan tetap terjaga dalam kisaran moderat dengan kecenderungan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Tekanan utama inflasi pada paruh pertama 2025 masih bersumber dari komponen bergejolak seperti cabai merah, beras dan daging ayam ras, akibat gangguan pasokan, cuaca ekstrem, serta kenaikan biaya produksi. Namun, implementasi operasi pasar, program Gerakan Pangan Murah (GPM), dan peningkatan pasokan lokal diproyeksikan mampu menahan kenaikan harga pada triwulan IV 2025. Inflasi komponen inti tetap tertekan akibat kenaikan harga komoditas emas perhiasan. Sementara itu, inflasi komponen harga diatur pemerintah hanya memberikan tekanan terbatas, terutama menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional dan penyesuaian harga layanan publik tertentu. Dengan kombinasi faktor tersebut, inflasi 2025 diperkirakan masih bergerak di dalam rentang sasaran.

7.4 Prospek Inflasi Tahun 2026

Inflasi gabungan Provinsi Jambi pada tahun 2026 diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran target inflasi nasional sebesar $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Inflasi Provinsi Jambi diperkirakan turun lebih lanjut sejalan dengan terkoreksinya harga komoditas pangan. Kelompok komponen harga bergejolak diperkirakan masih menjadi pemicu inflasi namun pasokan mulai membaik dan pola musim panen kembali normal. Komponen inti diperkirakan bergerak stabil bahkan cenderung menurun, ditopang meredanya tekanan harga global dan berkurangnya permintaan barang konsumsi bernilai tinggi. Meski demikian, tekanan inflasi komponen yang diatur pemerintah diproyeksikan meningkat secara selektif karena adanya penyesuaian tarif layanan publik, namun skalanya tidak cukup besar untuk mengganggu inflasi keseluruhan. Dengan pergeseran tekanan inflasi yang lebih terkelola, inflasi Jambi pada 2026 diperkirakan lebih dapat dikendalikan.

Hal ini tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga, melalui berbagai langkah seperti sidak pasar, operasi pasar murah, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Selain itu, program subsidi ongkos angkut komoditas pangan dan inisiatif Lahan Hortikultura Abadi (LAHTIBA) turut berperan penting dalam menjaga kestabilan pasokan, terutama untuk komoditas utama penyumbang inflasi seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.

Namun demikian, sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai sebagai potensi tekanan terhadap stabilitas harga. Secara global, harga energi dan logam mulia seperti avtur, minyak, dan emas perhiasan diperkirakan masih berada dalam tren naik, yang dapat memengaruhi biaya logistik dan transportasi dalam negeri. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan TPID dalam merespons tantangan inflasi secara adaptif dan terkoordinasi, termasuk dalam penguatan komunikasi kebijakan untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat tetap terjaga.

7.5 Rekomendasi Kebijakan

Menyikapi kondisi ekonomi dan inflasi terkini, Bank Indonesia Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus memperkuat respons kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Implementasi Pakta Mahligai** perlu ditindaklanjuti oleh seluruh TPID kabupaten/kota dengan fokus pada penyediaan alokasi anggaran khusus, menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, memperkuat kerja sama antar daerah, memanfaatkan teknologi untuk pengawasan distribusi, serta mendorong

pembentukan BUMD pangan, disertai evaluasi dan pelaporan progres berkala yang memuat capaian, kendala, dan rencana perbaikan.

2. Menyusun *masterplan* ekosistem pendukung swasta dalam hilirisasi

agar pengembangan produk unggulan Jambi seperti CPO, crumb rubber dan pinang bergerak dari bahan mentah menuju penciptaan nilai tambah melalui industri pengolahan. *Masterplan* berperan sebagai instrumen strategis untuk menciptakan kepastian arah pembangunan, mengurangi risiko koordinasi antar-aktor, serta memperkuat daya tarik swasta berinvestasi dalam diversifikasi produk turunan sawit (oleokimia, biofuel, pangan olahan) maupun karet (produk karet teknis, komponen otomotif). Dengan demikian, hilirisasi dapat memperluas basis pertumbuhan ekonomi, menekan kerentanan terhadap fluktuasi harga global, serta menempatkan Jambi pada jalur pembangunan industri yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3. Perluasan Proyek Infrastruktur Strategis dan Konektivitas

Mendorong percepatan penyelesaian proyek jalur khusus batubara, dan pembangunan serta pemeliharaan jalan-jalan strategis antarmasyarakat. Infrastruktur yang memadai akan memperlancar logistik, menekan biaya distribusi, dan memperkuat konektivitas antar sentra produksi dan pasar.

4. Peningkatan Kepatuhan dan Optimalisasi RKAB

Mendorong perusahaan tambang batubara untuk merealisasikan produksi sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) secara lebih akurat dan berbasis data aktual produksi. Pemerintah daerah perlu memperkuat *monitoring* dan evaluasi atas kinerja realisasi produksi dan pemasaran untuk mengurangi deviasi antara rencana dan capaian.

5. Penyusunan Roadmap Implementasi *Participating Interest* (PI) 10% yang Terukur dan Kolaboratif

Perlu adanya peta jalan (*roadmap*) implementasi PI 10% di Provinsi Jambi, termasuk target waktu, partisipan yang terlibat, serta skema pembiayaan yang realistis. *Roadmap* tersebut menjadi *tools* koordinasi antara Pemda, SKK Migas, KKKS, dan Kementerian ESDM agar proses bisnis berjalan terstruktur, transparan dan profesional

6. Normalisasi dan *Dredging* Sungai Batanghari untuk Alternatif Jalur Distribusi Barang

Pemerintah daerah dapat berkoordinasi secara aktif dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR untuk mendorong percepatan program normalisasi dan pengerukan Sungai Batanghari, khususnya di titik-titik dangkal dan rawan sedimentasi. Upaya tersebut dipandang penting guna memastikan kelayakan dan keselamatan jalur lintas air bagi kapal logistik dari hulu ke hilir sungai. Dalam jangka menengah, proyek *dredging* dapat dijadikan bagian

dari *Public-Private Partnership* (PPP) atau skema investasi hijau jika disertai rencana mitigasi lingkungan, sehingga tidak hanya menjadi proyek fisik semata, melainkan juga membuka peluang pendanaan non-APBD yang lebih berkelanjutan.

Dari sisi pengendalian inflasi, dalam rangka menjaga kestabilan harga di daerah dan menyikapi potensi risiko ke depan, peningkatan sinergi antar TPID, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui 7 program penguatan GNPIP 2025 sesuai dengan koridor 4K (Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, Ketersediaan Pasokan dan Komunikasi Efektif), yaitu:

- 1) Implementasi program Lahan Hortikultura Abadi (LAHTIBA) di tingkat Kota/Kabupaten sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi No. 293/ Kep.Gub/ Setda.prkm/ 2024 tanggal 24 April 2024 dalam Tim Percepatan dan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jambi (TPPKPD) Tahun 2024 dan Surat Gubernur Jambi No.S-161/DTPHP-4.1/6/2024 tanggal 19 Juni 2024 perihal Lahan Pangan Agro Abadi;
- 2) Penguatan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis dari TPIP dan TPID dengan terus mengoptimalkan GNPIP;
- 3) Penyaluran Subsidi Ongkos Angkut untuk perbaikan efisiensi dan manajemen stok pangan;
- 4) Penyaluran sarana dan prasarana pertanian untuk peningkatan produktivitas pertanian dan mitigasi risiko cuaca, serta pilot project digital farming;
- 5) Penguatan peran Pasar Bajure di Kota Sungai Penuh sebagai pasar induk penyangga bagi Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Perannya penting sebagai pusat distribusi dan pembentuk harga komoditas pangan. Dengan melengkapi fasilitas seperti zona khusus grosir dan eceran, gudang penyimpanan, informasi harga harian, serta dukungan pembayaran digital, Pasar Bajure diharapkan dapat menekan biaya distribusi, mempercepat aliran barang, dan mengurangi permainan harga.
- 6) Penguatan Data dan Informasi melalui:
 - a) Pemanfaatan data survei yang dihasilkan oleh BPS, Bank Indonesia, Disperindag, dan Dinas Ketahanan Pangan sebagai *early warning system*;
 - b) Pelaksanaan *capacity building* surveyor di lingkup wilayah Provinsi Jambi; dan
 - c) *Monitoring dashboard* LAHTIBA berbasis Power BI untuk visualisasi data analisis dan proyeksi, produktivitas, strategi pemetaan periode tanam dan distribusi komoditas hortikultura ke pasar IHK utama di Provinsi Jambi;

- 7) Penguatan koordinasi dan komunikasi melalui:
 - a) Pelaksanaan *High Level Meeting* dan rakor TPID tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b) *Capacity Building* TPID; dan
 - c) Iklan layanan masyarakat dalam mendorong penggunaan produk pangan olahan dan diversifikasi produk pangan.

Lampiran



Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Uraian	2024		2025		
	III	IV	I	II	III
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28.318.797	28.774.663	28.220.995	30.103.011	31.209.974
Pertambangan dan Penggalian	11.076.103	11.667.459	11.763.682	11.608.734	11.970.569
Industri Pengolahan	8.274.722	8.133.220	8.016.647	8.493.040	8.738.878
Pengadaan Listrik dan Gas	62.746	62.067	59.964	63.770	65.510
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	103.470	102.129	105.180	108.139	106.369
Konstruksi	6.236.419	6.414.867	5.439.279	5.801.174	5.880.675
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.089.510	11.095.046	10.920.673	12.118.428	12.243.771
Transportasi dan Pergudangan	2.635.181	2.741.303	2.801.628	2.830.266	2.907.393
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	905.179	918.203	901.161	910.893	975.184
Informasi dan Komunikasi	2.943.953	2.895.355	2.832.082	3.244.365	3.225.959
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.778.484	1.701.991	1.868.250	1.856.380	1.933.851
Real Estate	1.179.592	1.189.452	1.091.331	1.220.084	1.224.154
Jasa Perusahaan	1.251.566	1.253.259	1.280.382	1.340.851	1.375.470
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.796.745	3.028.158	2.972.208	3.114.747	2.921.786
Jasa Pendidikan	2.580.844	2.550.050	2.248.660	2.593.181	2.717.696
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.049.330	1.004.404	994.069	1.013.272	1.054.448
Jasa lainnya	746.212	830.510	743.776	832.914	798.705
PRODUK REGIONAL DOMESTIK BRUTO	83.028.852	84.362.136	82.259.967	87.253.248	89.350.393

Sumber: BPS Provinsi Jambi
Keterangan:
*Angka sementara
**Angka sangat sementara

Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Uraian	2024		2025		
	III	IV	I	II	III
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.165.249	12.445.227	11.870.775	12.546.826	13.003.855
Pertambangan dan Penggalian	9.718.598	9.759.474	9.643.721	9.910.882	10.138.690
Industri Pengolahan	4.583.190	4.489.216	4.412.009	4.629.359	4.745.734
Pengadaan Listrik dan Gas	30.126	29.808	28.687	30.651	31.458
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	57.041	56.225	56.913	57.631	56.765
Konstruksi	3.673.959	3.775.956	3.195.319	3.396.357	3.442.291
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.698.009	4.681.369	4.572.163	5.068.501	5.085.713
Transportasi dan Pergudangan	1.548.719	1.598.554	1.627.386	1.617.303	1.677.354
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	556.150	559.896	545.762	551.444	583.822
Informasi dan Komunikasi	1.970.404	1.937.491	1.885.558	2.163.722	2.147.796
Jasa Keuangan dan Asuransi	963.434	919.941	1.005.227	987.636	1.022.855
Real Estate	652.214	655.764	667.112	669.074	672.970
Jasa Perusahaan	576.432	576.060	587.235	603.620	614.596
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.321.647	1.435.204	1.354.383	1.413.561	1.342.095
Jasa Pendidikan	1.545.384	1.525.114	1.344.224	1.550.175	1.626.273
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	658.909	641.283	637.362	648.378	678.495
Jasa lainnya	467.798	509.534	456.005	500.593	478.597
PRODUK REGIONAL DOMESTIK BRUTO	45.187.262	45.596.116	43.889.840	46.345.712	47.349.355

Sumber: BPS Provinsi Jambi
Keterangan:
*Angka sementara
**Angka sangat sementara

Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Atas Harga Berlaku Menurut Penggunaan (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2024		2025		
	III	IV	I	II	III
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	32.745.888	33.588.872	33.955.771	36.623.562	35.618.639
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	474.759	505.946	472.401	516.960	501.601
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.903.883	6.517.942	3.528.222	4.901.470	5.274.443
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	17.886.436	18.800.144	16.627.637	17.686.129	18.205.443
Perubahan Inventori	1.623.821	(121.556)	(196.122)	656.986	1.402.498
Ekspor Barang dan Jasa	55.304.263	58.646.859	56.375.717	57.593.944	59.913.313
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	29.910.197	33.576.071	28.566.693	30.725.805	31.565.545
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	83.028.852	84.362.136	82.196.933	87.253.248	89.350.393

Sumber: BPS Provinsi Jambi
Keterangan:
*Angka sementara
**Angka sangat sementara

Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Atas Harga Konstan Menurut Penggunaan (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2024		2025		
	III	IV	I	II	III
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	18.937.827	19.347.298	19.446.514	20.489.190	19.781.888
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	273.355	290.717	270.847	290.925	280.179
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.748.824	3.680.465	1.979.105	2.710.091	2.906.669
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	10.775.504	11.300.919	9.978.417	10.554.806	10.849.153
Perubahan Inventori	801.468	(59.979)	(95.955)	319.121	678.851
Ekspor Barang dan Jasa	28.163.065	30.200.437	28.411.337	28.754.266	29.703.199
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	16.512.781	19.163.742	16.103.484	16.772.686	16.850.583
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	45.187.262	45.596.116	43.886.780	46.345.712	47.349.355

Sumber: BPS Provinsi Jambi
Keterangan:
*Angka sementara
**Angka sangat sementara

Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Jambi Tahun Dasar 2022

IHK Kota Jambi	2025					
Komoditi	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
Umum	108,02	107,45	107,62	107,85	107,80	108,77
Makanan, Minuman dan Tembakau	114,75	112,33	112,03	113,35	113,64	116,04
Pakaian dan Alas Kaki	102,74	102,81	102,69	102,63	102,63	102,63
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	103,33	103,34	103,40	103,39	103,39	103,43
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	103,92	103,38	103,65	103,42	103,12	102,91
Kesehatan	99,69	99,77	100,10	100,19	100,47	99,90
Transportasi	109,89	110,47	112,06	110,87	109,90	111,86
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97,92	98,26	98,15	97,99	98,06	98,04
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103,56	103,56	104,02	104,05	104,05	104,28
Pendidikan	102,95	102,95	102,95	104,24	104,58	105,07
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	107,20	107,20	107,22	107,22	107,22	107,29
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	115,30	115,58	115,89	115,49	115,07	115,95

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Bungo Tahun Dasar 2022

IHK Kota Bungo	2025					
Komoditi	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
Umum	109,73	108,89	108,70	109,39	109,39	110,43
Makanan, Minuman dan Tembakau	114,66	112,59	111,62	113,94	113,94	116,12
Pakaian dan Alas Kaki	103,03	103,03	102,93	102,93	102,93	102,97
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	104,18	104,23	104,21	104,19	104,19	104,21
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102,71	102,83	102,61	102,58	102,58	102,48
Kesehatan	105,89	105,89	105,89	105,89	105,89	105,87
Transportasi	110,19	109,18	108,81	108,75	108,75	109,14
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	101,19	101,56	101,56	101,56	101,56	101,56
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	107,74	107,74	107,87	107,87	107,87	108,57
Pendidikan	106,26	106,26	106,26	108,09	108,09	109,60
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	103,68	103,68	104,01	104,01	104,01	104,01
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	134,28	131,67	133,41	133,09	133,09	137,46

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Kerinci Tahun Dasar 2022

IHK Kota Kerinci	2025					
Komoditi	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
Umum	110,98	109,73	110,48	112,11	112,33	113,05
Makanan, Minuman dan Tembakau	112,71	109,97	111,59	115,08	115,70	116,79
Pakaian dan Alas Kaki	113,84	113,93	113,95	114,41	114,17	114,18
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	98,30	98,51	98,51	98,60	98,60	98,60
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	110,59	110,74	110,74	110,81	111,00	111,00
Kesehatan	103,60	103,73	103,73	103,52	103,52	103,52
Transportasi	113,66	112,49	112,18	112,59	112,29	112,29
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	98,33	98,81	98,81	98,81	98,81	98,83
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	119,56	120,04	120,54	120,54	120,39	120,39
Pendidikan	102,02	102,02	102,02	104,54	105,06	103,89
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	112,11	112,11	112,11	112,11	112,11	113,33
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	118,13	117,35	118,35	118,30	118,07	121,03

Sumber: BPS Provinsi Jambi



Daftar Istilah

Ekspor	Seluruh barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.
Impor	Seluruh barang yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.
PDRB atas dasar harga pasar	Penjumlahan nilai tambah bruto (NTB) yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian.
PDRB atas dasar harga konstan	Perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya.
Bank pemerintah	Bank-bank yang sebelum program rekapitalisasi merupakan bank milik pemerintah (persero) yaitu terdiri dari Bank Mandiri, BNI, BTN dan BRI.
Bank swasta	Perbankan yang sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional sebelum dilakukannya program rekapitalisasi perbankan.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Simpanan masyarakat yang ada di perbankan terdiri dari giro, tabungan, dan deposito.
Net Interest Margin (NIM)	Selisih bersih antara biaya bunga operasional dengan pendapatan bunga operasional.
Loan to Deposits Ratio (LDR)	Rasio antara kredit yang diberikan oleh perbankan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun.
Non Performing Loan (NPL)	Jumlah kredit yang termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet sesuai ketentuan.
Cash inflows	Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu.
Cash outflows	Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.
Net cashflows	Selisih bersih antara jumlah <i>cash inflows</i> dan <i>cash outflows</i> pada periode yang sama terdiri dari <i>netcash outflows</i> bila terjadi <i>cash outflows</i> lebih tinggi dibandingkan <i>cash inflows</i> , dan <i>netcash inflows</i> bila terjadi sebaliknya.
Administered prices	kelompok barang yang pergerakan harganya ditentukan oleh pemerintah baik secara keseluruhan maupun sebagian.



Tim Penyusun



Penanggung Jawab

Warsono : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi
Robby Fathir Nashary : Deputi Kepala Perwakilan

Koordinator Penyusun

Aji Wira Tama : Analis

Tim Penyusun

Nabila Inas Salma : Ekonom Yunior
Muhammad Yusuf P. : Ekonom Yunior
Desi Budiastuti : Analis Yunior
Fildzah Fajrina : Analis Yunior
Lassie Sianipar : Analis Yunior
Nabil Adika Tisnawan : Analis Yunior

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.14,
Telanaipura Jambi

Telp : (0741) 62445

Fax : (0741) 62112

Website : www.bi.go.id

Buku ini dapat diunduh di

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/default.aspx>

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

Jl. Jendr. A. Yani No. 14 Telanaipura Jambi 36122, Indonesia

Telp. (0741) 62445, Fax. (0741) 62112

<http://www.bi.go.id>

